

**PENDEKATAN PARTISIPATORIK PADA REKONSTRUKSI
HUNIAN PASCAGEMPA DI NGIBIKAN, BANTUL -
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Teknik



Disusun oleh :

PROKLAM BEKTI UTAMI
NIM. 0610653042-65

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS TEKNIK
MALANG
2010

PENGANTAR

Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas kekuatan, kesabaran dan berkah yang telah diberikanNya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik. Skripsi ini mengambil tema tentang pendekatan partisipatorik (*participatory design approach*) yang dilakukan di Indonesia, obyek penelitian adalah rekonstruksi hunian di dusun Ngibikan pasca-gempa, Bantul - Yogyakarta. Skripsi ini berusaha mendeskripsikan (menguraikan) bagaimana bentuk pendekatan partisipatorik dilakukan dengan melihat hubungan antara arsitek, partisipan dan produk arsitektur. Hasilnya berupa uraian keterlibatan masyarakat selama proses rekonstruksi .

Kehadiran skripsi ini tentu saja tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang telah banyak memberikan informasi mengenai jalannya proses rekonstruksi di dusun Ngibikan. Terimakasih kepada bapak Eko Prawoto yang membagi pengalamannya serta memberikan gambaran mengenai pendekatan partisipatorik. Terimakasih kepada bapak Maryono dan seluruh masyarakat dusun Ngibikan yang telah memberikan bantuan informasi mengenai jalannya proses rekonstruksi dusun Ngibikan.

Semoga uraian mengenai bentuk penerapan pendekatan partisipatorik dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangan wawasan dan mampu memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu di dunia arsitektur.

Malang, September 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
RINGKASAN	viii
SUMMARY	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4. Pembatasan Masalah.....	6
1.5. Tujuan	7
1.6. Manfaat	7
1.7. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Pendekatan Partisipatorik (<i>Participatory Design Approach</i>)	9
2.1.1. Pengertian participatory design (<i>desain partisipatori</i>)	9
2.1.2. Prinsip partisipasi (<i>principle participation</i>)	10
2.1.3. Tujuan partisipasi	13
2.2. Langkah-Langkah Partisipasi (<i>Stages of Participation</i>).....	14
2.3. Metode Partisipasi (<i>Participation Methods</i>).....	16
2.3.1. Perencanaan strategi (<i>strategic planning</i>).....	16
2.3.2. Visi.....	17
2.3.3. Perencanaan tindakan masyarakat (<i>community action planning</i>)	17
2.4. Teknik Partisipasi (<i>Participation Techniques</i>).....	18
2.5. Keterlibatan Masyarakat dan Tingkat Partisipasi.....	20
2.6. Konsensus (<i>Consensus</i>)	21
2.7. Definisi Rekonstruksi	22

2.8. <i>Logic Frame Analysis</i>	23
2.8.1. <i>Logic frame analysis</i> oleh BOND	23
2.8.1. <i>Logic frame analysis</i> oleh AusAID	25
2.9. Manajemen Proyek	26
2.10. Beberapa Proyek dengan penggunaan <i>Participatory Design</i>	28
2.10.1. Kampong improvement program (kip)	28
2.10.2. Permukiman pinggiran kali code	29
2.10.3. Rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat berbasis komuniras (RE-KOMPAK) di Aceh dan Nias	30

BAB III METODE PENELITIAN

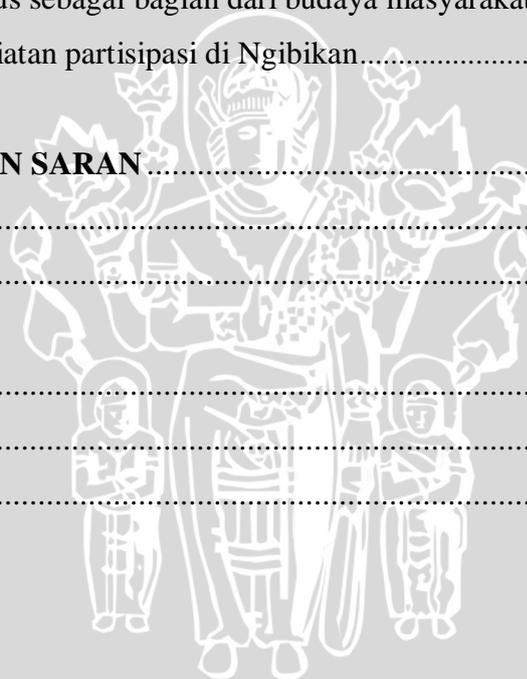
3.1. Rancangan Penelitian	33
3.2. Fokus Penelitian	33
3.3. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	34
3.3.1. Lokasi penelitian.....	34
3.3.2. Waktu penelitian.....	35
3.4. Unit Amatan Penelitian.....	35
3.5. Unit Analisis Penelitian	36
3.6. Tahap Penelitian	37
3.6.1. Metode pengumpulan data	37
3.6.2. Metode analisa data	38
3.7. Instrumen Penelitian	39
3.8. Diagram Alur Penelitian	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian	40
4.1.1. Tingkat kerusakan bangunan di Ngibikan.....	40
4.1.2. Kondisi sosial masyarakat Ngibikan.....	42
4.1.3. Latar belakang partisipasi warga dalam proses rekonstruksi	43
4.1.4. Keterlibatan perancang dan masyarakat dalam proses rekonstruksi ...	44
4.1.5. Prinsip pendekatan partisipatorik di Ngibikan	49
4.1.6. Metode desain partisipatori di Ngibikan.....	50
4.1.7. Konsensus	59



4.1.8. Manajemen rekonstruksi	59
4.1.9. Skematik desain	65
4.1.10. Produk desain dari pendekatan partisipatorik	67
4.2. Pembahasan.....	72
4.2.1. Pendekatan partisipatorik (<i>participatory design approach</i>) ala Ngibikan.....	72
4.2.2. Prinsip pendekatan partisipatorik ala Ngibikan.....	74
4.2.3. Teknik partisipasi di Ngibikan.....	77
4.2.4. Keterlibatan dan tingkat partisipasi warga Ngibikan dalam sebuah pendekatan partisipatorik.....	78
4.2.5. Pengaruh budaya masyarakat terhadap penerapan pendekatan partisipatorik.....	79
4.2.6. Konsensus sebagai bagian dari budaya masyarakat	80
4.2.7. Alur kegiatan partisipasi di Ngibikan.....	81
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	83
5.1. Simpulan	83
5.2. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
DAFTAR BACAAN	87
LAMPIRAN.....	88



DAFTAR GAMBAR

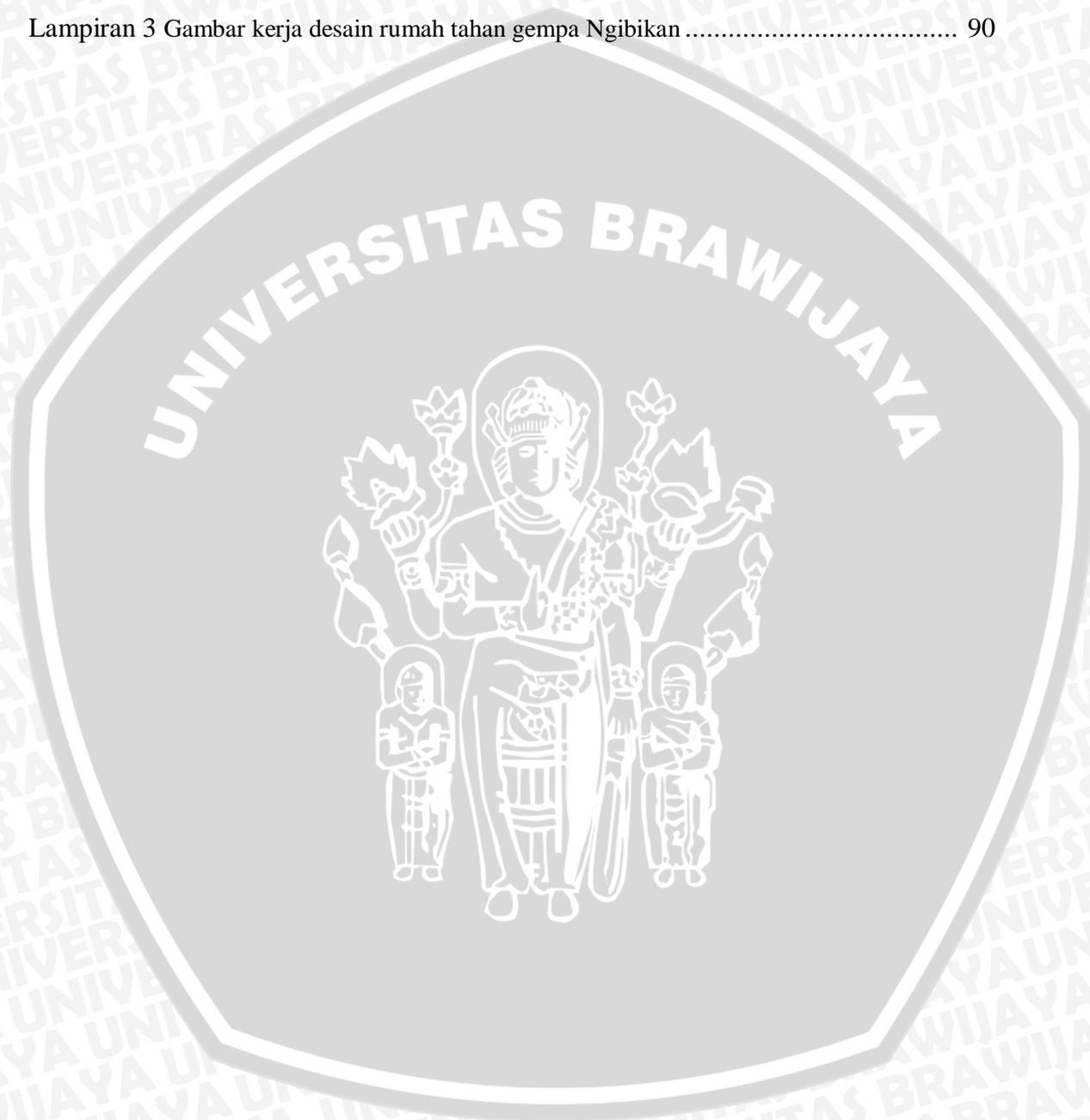
No.	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Delapan tingkatan partisipasi masyarakat.....	20
Gambar 2.2	Permukiman Kali Code	29
Gambar 3.1	Peta Dusun Ngibikan.....	34
Gambar 3.2	Diagram proses penelitian.....	39
Gambar 4.1	Aktivitas warga yang dilakukan bersama-sama.....	43
Gambar 4.2	Diagram bentuk keterlibatan dan peran para pelaku dalam proses pengambilan keputusan gagasan desain	47
Gambar 4.3	Salah satu tradisi masyarakat “selamatan menaikkan bubungan”	49
Gambar 4.4	Diagram perencanaan strategi.....	53
Gambar 4.5	Tahap kegiatan	58
Gambar 4.6	Struktur organisasi proyek rekonstruksi dusun Ngibikan.....	60
Gambar 4.7	Organisasi pelaksanaan proyek	62
Gambar 4.8	Pekerjaan pembersian lahan	63
Gambar 4.9	Pekerjaan pembuatan umpak dan pemasangan pondasi	63
Gambar 4.10	Pekerjaan kuda-kuda	64
Gambar 4.11	Menaikkan kuda-kuda	64
Gambar 4.12	Pekerjaan pemasangan atap.....	64
Gambar 4.13	Material batu bata dari reruntuhan bangunan dikumpulkan untuk digunakan kembali..	65
Gambar 4.14	Material bangunan yang berasal dari dana bantuan.....	65
Gambar 4.15	<i>Blook Plan</i> (atas) sebelum gempa dan (bawah) setelah rekonstruksi	66
Gambar 4.16	Gambar kerja bangunan	68
Gambar 4.17	Rumah-rumah dibangun di atas lantai rumah yang lama	68
Gambar 4.18	Salah satu rumah warga RT 05 RW 14 pasca gempa	69
Gambar 4.19	Pengembangan desain rumah	69
Gambar 4.20	Alur partisipasi	82

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
Tabel 2.1	<i>Action planning process</i>	18
Tabel 2.2	<i>A logical framework model</i>	23
Tabel 2.3	Struktur umum (format) <i>logical framework matrixl</i>	25
Tabel 3.1	Jadwal kegiatan penelitian	35
Tabel 3.2	Unit amatan penelitian	35
Tabel 3.3	Unit analisis penelitian	36
Tabel 3.4	Tahap analisis penelitian	38
Tabel 4.1	Tingkat kerusakan bangunan di RT 05 RW 04 dusun Ngibikan	41
Tabel 4.2	Bentuk keterlibatan para pelaku kegiatan rekonstruksi	46
Tabel 4.3	Tingkat partisipasi warga dalam proses rekonstruksi	47
Tabel 4.4	Perencanaan strategi	50
Tabel 4.5	Tahapan perencanaan	54
Tabel 4.6	<i>Action plan</i> (perencanaan tindakan)	55
Tabel 4.7	Jadwal pelaksanaan kegiatan	61
Tabel 4.8	Pembagian paket pekerjaan	63
Tabel 4.9	Perbandingan prinsip partisipasi Sanoff (2000) dan Ngibikan	75

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
Lampiran 1	Peta Kerusakan Pasca Gempa Yogyakarta 27 mei 2006	88
Lampiran 2	Daftar kelompok pekerja pada proses rekonstruksi dusun Ngibikan.....	89
Lampiran 3	Gambar kerja desain rumah tahan gempa Ngibikan	90



RINGKASAN

Proklam Bekti Utami, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Agustus 2010, Pendekatan Partisipatorik pada Rekonstruksi Hunian Pasca Gempa di Ngibikan, Bantul – Yogyakarta, Dosen Pembimbing : Susilo Kusdiwanggo, ST. MT. Dan Triandriani Mustikawati, ST. MT.

Participatory design adalah suatu pendekatan desain dan filosofi yang mendukung partisipasi secara langsung dari pengguna dan pemangku kepentingan lainnya dalam analisis sistem dan kerja desain. *Participatory Design Approach* (Pendekatan Partisipatorik) lahir dikarenakan adanya kelompok minoritas yang sering tidak terwakili dalam proses pengambilan keputusan secara politik pada perencanaan kota dan permukiman. Rekonstruksi dusun Ngibikan pasca-gempa di Bantul – Yogyakarta mungkin menunjukkan suatu bentuk kegiatan partisipasi dalam pembangunan yang dilakukan oleh warga dan arsitek (perancang). Bentuk kegiatan rekonstruksi yang dilakukan memiliki persamaan dengan pendekatan partisipatorik. Proses rekonstruksi yang cepat serta adanya peran serta masyarakat yang mengindikasikan adanya bentuk pendekatan partisipatorik dalam proses rekonstruksi tersebut membuat objek rekonstruksi dusun Ngibikan pasca-gempa menarik untuk dikaji. Tujuan penelitian yaitu, untuk menguraikan (mendeskripsikan) bentuk hubungan antara arsitek (perancang), partisipan, dan produk pada proses rekonstruksi hunian pasca-gempa di Ngibikan, bantul Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dimulai dengan mengumpulkan informasi di lapangan tanpa kerangka terstruktur. Sesuai dengan pendekatan kualitatif peneliti kemudian menyimpulkan suatu teori yang dapat menjelaskan atau memberikan pemahaman atas fenomena yang terjadi di lapangan (*theory after*). Teknik penelitian yang digunakan berdasarkan pendekatan kualitatif pada penelitian ini adalah teknik *field study* (studi lapangan), selain itu peneliti harus terjun langsung ke dalam masyarakat sehingga teknik penelitian yang mendukung berikutnya adalah *participant observation*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk hubungan antara arsitek, partisipan dan produk pada proses rekonstruksi dusun Ngibikan menunjukkan suatu bentuk pendekatan partisipatorik. Ditunjukkan dengan adanya keterlibatan langsung warga dalam proses perancangan hingga proses pelaksanaan, walaupun gagasan ide desain berasal dari arsitek, namun warga tetap memiliki kendali untuk memutuskan desain yang akan digunakan. Arsitek memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi partisipan untuk mendesain bagian dalam rumah dan mengatur penataan fasade. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk pendekatan partisipatorik yang dilakukan pada proses rekonstruksi dusun Ngibikan adalah kewenangan warga dalam pengambilan keputusan dan kesempatan sebesar-besarnya bagi warga untuk berpartisipasi pada pengembangan desain bangunan. Ditinjau dari tingkatan partisipasi masyarakat bentuk partisipasi warga berada pada tingkat kontrol masyarakat, dimana warga memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan dan pengembangan desain.

Kata kunci : *participatory design approach*, rekonstruksi

SUMMARY

Proklam Bakti Utami, Department of Architecture, Faculty of Engineering, University of Brawijaya, August 2010, *Participatory Design Approach in Post-Earthquake Reconstruction of Residential Ngibikan, Bantul - Yogyakarta*, Academic Supervisor : Susilo Kusdiwanggo, ST. MT. and Triandriani Mustikawati, ST. MT.

Participatory design is a design approach and philosophy that supports the direct participation of users and other stakeholders in systems analysis and design work. Participatory Design Approach was born due to the minority groups that often are not represented in political decision-making process on planning cities and settlements. Reconstruction of post-earthquake Ngibikan hamlets in Bantul - Yogyakarta may indicate some form of participation in development activities conducted by residents and architects (designers). Shape reconstruction activities undertaken in common with participatory design approaches. Rapid reconstruction process and the existence of community participation that indicate a form of participatory design approaches in the reconstruction process that makes the object of reconstruction post-earthquake village Ngibikan interesting to study. The purpose of this study was to describe the form of the relationship between an architect (designer), participants, and products in the reconstruction process of post-earthquake occupancy in Ngibikan, Bantul Yogyakarta. This study uses a qualitative approach. The study begins by collecting information on the field without a structured framework. In accordance with the qualitative approach the researcher to conclude a theory that can explain or give an understanding of the phenomena that occur in the field (theory after). Research techniques used are based on qualitative approach in this study is the technique of field studies, except that researchers must go directly to the public so that supports the following research techniques were participant observation.

The results showed that the shape of the relationship between architect, participants and products in the reconstruction process hamlet Ngibikan shows a form of participatory design approaches. Indicated by the direct involvement of citizens in the process design to process execution, although the idea of design ideas come from architects, but residents still have control to decide which design will be used. Architects provide maximum opportunity for participants to design the interior of the house and set the arrangement of the facade. From the results it can be concluded that this form of participatory design approaches conducted in the reconstruction process is a hamlet Ngibikan citizens in decision-making authority and opportunity as possible for citizens to participate in the development of building design. Viewed from the level of public participation in the form of citizen participation at the level of community control, where citizens have the authority in decision making and design development.

Key words : participatory design approach, reconstruction

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Arsitektur dibangun untuk mampu menjawab kebutuhan manusia dan mengangkat derajat hidupnya menjadi lebih baik, sehingga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kebudayaan. Arsitektur itu sendiri adalah buah dari Budaya (Ruskin dalam Wiranto, 1999).

Pada awalnya arsitektur lahir karena adanya kebutuhan manusia. Pada masa lalu untuk memenuhi kebutuhannya, manusia memanfaatkan apa yang tersedia di alam dan membangun sendiri rumahnya (arsitektur), sehingga setiap manusia memiliki kendali atas apa yang dibangunnya. Seiring dengan perkembangan zaman, peradaban manusia pun berkembang. Manusia menjadi lebih maju dan diiringi dengan meningkatnya kebutuhan akan arsitektur yang semakin kompleks. Lingkungan tempat tinggal manusia berkembang semakin luas. Kelompok kecil masyarakat bergabung dengan kelompok masyarakat yang lebih besar. Pada saat itu untuk memenuhi kebutuhan akan arsitektur (rumah), manusia membutuhkan peran orang lain yang bertindak sebagai juru rancang (arsitek). Arsitektur berkembang semakin pesat, produksi perumahan secara masal pun dapat dilakukan.

Dalam lingkup arsitektur yang lebih luas seperti perancangan kota, terdapat kelompok-kelompok (pemerintah, pengembang) yang berperan sebagai perencana serta perancang kota, pemerintah mengatur perencanaan permukiman bagi masyarakat. Seringkali perencanaan kota yang dilakukan oleh pihak pemerintah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Masyarakat melihat adanya penurunan kualitas arsitektur, dan mulai menuntut adanya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan kota.

Dari tahun 1960an dan seterusnya muncul tuntutan untuk lebih mempertimbangkan opini masyarakat dalam pengambilan keputusan utama. Perencanaan kota adalah yang pertama diantara pekerjaan desain yang dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Segmen yang besar dari populasi masyarakat menemukan bahwa pekerjaan arsitek tidak relevan dan bertentangan dengan hidup mereka. Metode tradisional dari perencanaan kota ditantang oleh tuntutan masyarakat untuk berpartisipasi dalam keputusan yang akan secara material mempengaruhi mereka. Pertumbuhan lingkungan menuntut adanya pemeriksaan ulang pada perencanaan tata

guna lahan, untuk itu masyarakat mulai dilibatkan dalam proses tersebut melalui pendekatan *participatory design*. *Participatory design* (desain partisipatorik) pada awalnya lahir dikarenakan adanya kelompok masyarakat minoritas yang sering tidak terwakili dalam proses pengambilan keputusan secara politik pada perencanaan kota dan permukiman. Oleh karena itu perencanaan kota atau permukiman dengan melibatkan partisipasi masyarakat atau dengan *participatory design* dibuat untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan mereka.

Participatory Design Approach (PDA) atau Pendekatan Partisipatorik adalah suatu metode desain dimana arsitek atau perancang tidak lagi menjadi satu-satunya pengambil keputusan, melainkan mengajak pengguna atau masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada proses perancangan. *Participatory design* juga ditunjukkan sebagai desain komunitas (*community design*), desain partisipasi telah mencapai suatu tingkat dimana tidak lagi suatu aktivitas di perankan oleh sang arsitek yang berperan di luar kaidah bidang dunia arsitektur.

Participatory design merupakan pendekatan perancangan desain dengan melibatkan pengguna dalam proses perancangannya. Pendekatan *participatory design* disini diwujudkan dengan mempertimbangkan aktivitas pengguna sebagai salah satu acuan dalam perancangan. Dalam proses desain, pendekatan ini dilakukan untuk membantu memastikan bahwa desain yang dihasilkan akan memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat dipergunakan. Desain partisipatori adalah sebuah pendekatan yang difokuskan pada proses dan prosedur dari desain dan bukan dari *style* (gaya) desain.

Dalam *participatory design*, partisipan diminta untuk bekerjasama dengan desainer, penelitian dan pengembangan selama proses inovasi (perubahan). Para partisipan berpartisipasi pada beberapa langkah dari proses inovasi: mereka berpartisipasi pada waktu awal eksplorasi dan menentukan masalah untuk membantu menegaskan permasalahan dan gagasan focus untuk penyelesaian, dan selama pengembangan, mereka membantu mengevaluasi solusi-solusi yang diusulkan. Dalam prakteknya pendekatan *participatory design* menekankan kepada kerjasama antara perancang dan pengguna, bagaimana mengajak mereka untuk ikut berpartisipasi pada setiap proses perancangan atau pengambilan keputusan. Desain tidak lagi diputuskan oleh perancang (arsitek) melainkan perancang/arsitek hanya berperan sebagai fasilitator.

Merancang dengan partisipasi adalah pekerjaan yang tidak mudah. Arsitek harus membuang egonya dan bertukar pikiran dengan masyarakat. Setiap individu dalam

masyarakat juga memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda, namun melalui proses diskusi proses tersebut dapat dilalui dengan baik. Pada perancangan dengan menggunakan partisipasi ini, arsitek tidak lagi merancang dengan menggunakan standar yang ada, namun merancang berdasarkan masyarakat yang akan menggunakan rancangan tersebut.

Pendekatan manusiawi dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perancangan dan perencanaan bangunan, setidaknya dapat mengatasi sejumlah kendala yang bisa mengakibatkan kegagalan suatu perumahan. Dengan pendekatan ini produk arsitektur yang merupakan hasil rancangan partisipatif dapat memberikan nilai baru yang menaikkan harkat dan martabat (*dignity*) masyarakat sebagai suatu yang bisa menjadi kebanggaan bagi masyarakat dan sumbangan yang berharga bagi peta budaya kita (Bharuna, 2004).

Di Indonesia perancangan permukiman dengan pendekatan partisipatorik (*participatory design approach*) juga telah diterapkan, akan tetapi penerapannya belum terlalu banyak dan metode tersebut juga belum banyak dikenal oleh masyarakat. Contoh perancangan maupun perbaikan lingkungan dengan menggunakan metode partisipasi masyarakat di Indonesia adalah KIP Komprehensif. Selain KIP komprehensif, penerapan metode *participatory design* juga dilakukan pada penataan permukiman di pinggiran Kali Code yang diprakarsai oleh arsitek YB Mangun Wijaya.

KIP Komprehensif adalah sebuah program pembangunan kampung terpadu. KIP Komprehensif bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan, sasaran program tersebut adalah lingkungan permukiman yang kumuh. Pada program tersebut warga masyarakat diajak untuk berpartisipasi memperbaiki lingkungan tempat tinggal mereka, akan tetapi peran pemerintah pada program tersebut masih lebih dominan. Program pembangunan kampung terpadu tersebut dilakukan secara bertahap.

Sama dengan KIP, pengembangan permukiman di pinggiran Kali Code juga menggunakan pendekatan desain partisipatori. Pemukiman ini adalah suatu proyek revitalisasi kota yang berbasis partisipasi masyarakat. Di lokasi ini, lingkungan pemukiman yang dulunya kumuh dan tidak higienis berhasil ditata dengan cara pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat sendiri yang diajak membenahi lingkungannya sendiri (Gunawan, 2009).

Kedua obyek tersebut adalah contoh pendekatan partisipatorik yang dilakukan di kota. Kedua program yang disebutkan memiliki tujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Pendekatan partisipatorik dilakukan untuk mendekati penduduk agar dapat berperan serta dalam pembangunan lingkungannya. Sasaran partisipasi adalah masyarakat yang bertempat tinggal di kampung kota atau lingkungan kumuh (*slum area*) di perkotaan.

Area-area kumuh atau wilayah kampung kota yang menjadi sasaran memiliki masyarakat dengan tingkat hubungan sosial yang masih cukup tinggi, maksudnya adalah interaksi sosial warganya lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang tinggal di permukiman atau kawasan perumahan kota yang teratur, hal tersebut dikarenakan tingkat pendidikan serta ekonominya masyarakatnya lebih tinggi. Interaksi sosial yang terjadi antar warga tidak mendalam dibandingkan dengan masyarakat di lingkungan perkampungan kota atau area kumuh.

Di lain sisi kondisi sosial masyarakat pada wilayah perkampungan kota juga dapat ditemui pada kondisi sosial masyarakat di pedesaan, di mana tingkat hubungan sosial antar warganya juga masih tinggi, ditambah rasa kekeluargaan, saling membantu dan kegotongroyongan yang masih erat. Akar dari bentuk kegiatan partisipasi sebenarnya telah ditunjukkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat di desa. Bentuk kegiatan partisipasi ditunjukkan lewat interaksi sosial masyarakat desa dengan tetangga, saling tolong menolong, tepa selira dan kegotongroyongan.

Pada bulan Mei tahun 2006 terjadi bencana gempa bumi yang melanda daerah Yogyakarta¹. Rekonstruksi dusun Ngibikan pasca-gempa di Bantul – Yogyakarta mungkin menunjukkan suatu bentuk kegiatan partisipasi dalam pembangunan yang dilakukan oleh warga dan arsitek (perancang). Bentuk kegiatan rekonstruksi yang dilakukan memiliki persamaan dengan pendekatan partisipatorik, namun terjadi pada lingkungan pedesaan.

¹ Gempa bumi yang melanda Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 merupakan gempa tektonik berkekuatan 5,9 skala Richter. Gempa tersebut begitu dahsyat hingga getarannya juga dirasakan di kota Solo, Semarang, Purworejo, Kebumen dan Banyumas. Getaran juga sempat dirasakan sejumlah kota di provinsi Jawa Timur seperti Ngawi, Madiun, Kediri, Trenggalek, Magetan, Pacitan, Blitar dan Surabaya. BMG menentukan pusat gempa berada di 8.03 LS dan 110,32 BT pada kedalaman 11,3 Km dan kekuatan 5.9 SR Mb (Magnitude Body) atau setara 6.3 SR Mw (Magnitude Moment). Secara umum posisi gempa berada sekitar 25 km selatan-barat daya Yogyakarta, 115 km selatan Semarang, 145 km selatan-tenggara Pekalongan dan 440 km timur-tenggara Jakarta. Walaupun hiposenter gempa berada di laut, tetapi tidak mengakibatkan tsunami. Gempa tersebut menyebabkan kerusakan yang hebat di Kabupaten Bantul dan beberapa kota lainnya di Yogyakarta. Ribuan masyarakat terluka dan kehilangan rumah bahkan korban jiwa mencapai lebih dari lima ribu orang. Kabupaten Bantul mengalami kerusakan yang sangat parah, 70 % rumah di kecamatan Jetis salah satu kecamatan di Bantul rata dengan tanah (www.id.wikipedia.org). Salah satu dusun di desa Canden, kecamatan Jetis, kabupaten Bantul yaitu dusun Ngibikan hampir, seluruh bangunannya rata dengan tanah (www.id.wikipedia.org).

Secara kultural latar belakang kehidupan masyarakat Yogyakarta berkaitan erat dengan sejarah kehidupannya, sehingga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kebiasaan atau perilaku masyarakatnya. Bagi masyarakat Yogyakarta, di mana setiap tahapan kehidupan mempunyai arti tersendiri, tradisi adalah sebuah hal yang penting dan masih dilaksanakan sampai saat ini. Tradisi budaya dan keseharian masyarakat diperhatikan pada proses pelaksanaan rekonstruksi.

Pada proses rekonstruksi dusun Ngibikan pasca-gempa Yogyakarta, peran masyarakat pada proses rekonstruksi tersebut sangat besar. Penerapan pendekatan partisipatorik di Ngibikan Bantul terjadi karena kondisi khusus, yaitu adanya bencana gempa bumi, dimana masyarakat memiliki keterikatan senasib dan kepentingan yang sama ingin membangun kembali rumahnya. Pada proses pembangunan kembali (rekonstruksi) dusun Ngibikan, Jetis-Bantul arsitek yaitu Eko Prawoto menggunakan pendekatan yang memiliki persamaan ciri dengan pendekatan partisipatorik (*participatory design approach*). Arsitek mengajak masyarakat untuk ikut berembuk berdiskusi selama proses mendesain. Sehingga desain yang rumah yang dibuat adalah desain yang disetujui oleh masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Pangarsa (2008) ².

Masyarakat secara bersama-sama memilih alternatif desain yang ditawarkan oleh arsitek melalui diskusi bersama. Selain itu pelaksanaan proses rekonstruksi dilakukan secara bergotong royong dan dapat diselesaikan hanya dalam waktu tiga bulan saja. Hal tersebut berbeda dengan KIP maupun pengembangan permukiman pinggiran Kali code yang dilakukan secara bertahap. Proses rekonstruksi yang cepat serta adanya peran serta masyarakat yang mengindikasikan adanya bentuk pendekatan partisipatorik dalam proses rekonstruksi tersebut membuat objek rekonstruksi dusun Ngibikan pasca-gempa menarik untuk dikaji. Hal tersebut menjadi latar belakang dipilihnya objek rekonstruksi dusun Ngibikan pasca-gempa sebagai objek kajian dalam penelitian ini.

² Buku Arsitektur untuk Kemanusiaan, Teropong Visual *Culture* atas Karya-karya Eko Prawoto. Salah satu bahasan dalam buku ini adalah Rekonstruksi Ngibikan pasca-gempa Yogyakarta. *Desain yang dimufakati oleh seluruh warga adalah desain yang emansipatorik sekaligus partisipatorik. Emansipatorik, karena ternyata warga mempunyai hak yang sama dalam menentukan rancangan, dapat "menyimpangkan" programming arsitektural telah dimufakati bersama.... sekaligus juga partisipatorik, karena hampir dalam seluruh proses warga terlibat. (Pangarsa, 2008).*

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang maka identifikasi masalah yang muncul adalah sebagai berikut :

1. Timbulnya permasalahan pada perencanaan dan perancangan kota menuntut adanya pertimbangan atas pendapat dan saran masyarakat dalam pengambilan keputusan pada proses perencanaan dan perancangan kota.
2. Adanya golongan minoritas yang sering kali tidak terwakili dalam proses pengambilan keputusan secara politik mengakibatkan munculnya suatu metode baru dalam perancangan yaitu pendekatan partisipatorik (*participatory design approach*).
3. Di Indonesia penerapan pendekatan desain partisipatori sebagai metode perancangan masih sangat kurang. Sebagai metode perancangan pendekatan tersebut belum banyak dikenal oleh masyarakat.
4. Adanya hambatan-hambatan dalam perencanaan rekonstruksi dusun Ngibikan pasca gempa yang menyebabkan indikasi munculnya pendekatan partisipatorik (*participatory design approach*) sebagai metode perancangan dalam proses rekonstruksinya.

1.3. Rumusan Masalah

Pendekatan *Participatory design* (desain partisipatori) berarti memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi user (pengguna) untuk ikut berpartisipasi dalam proses perancangan. Partisipasi masyarakat Ngibikan dalam proses pembangunan kembali permukiman pasca-gempa merupakan sebuah proses desain partisipasi (*participatory design*). Pendekatan partisipatorik menunjukkan suatu bentuk hubungan antara perancang (arsitek) dan partisipan (pengguna) dalam dan selama proses rekonstruksi (perancangan, pengembangan desain, dan pelaksanaan).

Bagaimana bentuk hubungan antara arsitek, partisipan, dan produk pada pembangunan kembali (rekonstruksi) permukiman warga di Ngibikan, Bantul pasca-gempa Yogyakarta?

1.4. Pembatasan Masalah

Agar kajian dalam penelitian ini menjadi lebih terfokus, maka kajian penelitian ini dibatasi pada masalah-masalah:

1. Objek penelitian akan dibatasi pada kawasan dusun Ngibikan yaitu pada wilayah RT. 05 RW 14, Desa Canden, Jetis-Bantul.
2. Kajian penelitian difokuskan pada pembahasan untuk menguraikan bentuk hubungan antara arsitek, partisipan, dan produk pada proses rekonstruksi hunian warga dusun Ngibikan pasca-gempa Yogyakarta.
3. Bentuk hubungan antara arsitek, partisipan, dan produk yang diamati melingkupi bentuk hubungan pada proses perencanaan, perancangan, dan pelaksanaan rekonstruksi permukiman warga dusun Ngibikan pasca-gempa Yogyakarta.
4. Penelitian ini tidak bertujuan untuk membuat generalisasi hasil.

1.5. Tujuan

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu, untuk mendeskripsikan bentuk hubungan antara arsitek, partisipan, dan produk pada proses rekonstruksi hunian pasca-gempa di Ngibikan, Bantul - Yogyakarta.

1.6. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada perkembangan ilmu dunia arsitektur khususnya pada bidang akademis di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan lingkungan sosial atau masyarakat. Kajian tentang desain partisipasi tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran baru dalam metode perancangan arsitektur khususnya dalam lingkup pendidikan Arsitektur di Indonesia.

1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan dilakukan sesuai dengan tema dan judul kajian adalah sebagai berikut :

1. Bab I. PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang penelitian, hal-hal yang menjadi alasan penulis untuk memilih kajian penelitian, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi, dan sistematika pembahasan. Hal tersebut untuk memberikan gambaran umum mengenai kajian yang sedang dilakukan.

2. Bab II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang deskripsi singkat dan jelas mengenai pustaka acuan yang terkait dengan bidang kajian. Sesuai dengan tema kajian, maka pada tinjauan pustaka berisi teori-teori yang mendukung tentang *participatory design* dan sebagainya. Pustaka acuan berasal dari buku, jurnal ilmiah dan sumber elektronik.

3. Bab III. METODE KAJIAN

Bab ini berisi tentang penguraian tahapan-tahapan penelitian dan cara (metode) pelaksanaan penelitian. Tahapan penelitian dimulai dari pemilihan metode, pemilihan lokasi penelitian serta pemilihan metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan adalah teknik *field study* (studi lapangan), karena data yang diperlukan perlu digali langsung dari para partisipan kegiatan rekonstruksi dan peneliti harus terjun langsung ke dalam masyarakat sehingga sub teknik penelitian adalah *participant observation*.

4. Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan berisi tentang penguraian data-data empirik dan analisis data. Analisis data dapat dilkakukan dengan berbagai langkah yaitu: (1) data reduction: pengurangan data-data yang tidak penting, (2) pemahaman dan pengujian teori, (3) dan interpretasi data.

5. Bab V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan yang merupakan jawaban secara teoritis dari rumusan masalah yang diangkat dan memberikan saran-saran yang sesuai dengan penyelesaian masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pendekatan Partisipatorik (*Participatory Design Approach*)

2.1.1. Pengertian *Participatory Design* (Desain Partisipasi)

Participatory design adalah suatu pendekatan desain dan filosofi yang mendukung partisipasi secara langsung dari pengguna dan stakeholder lainnya dalam analisa sistem dan kerja desain (Ehn; Grønbaeck, Grudin, Bødker & Bannon dalam: Shuler dan Namioka, 1993)

Participatory design menunjukkan proses perancangan dimana stake-holders yang berbeda-beda, dilibatkan dalam proses perancangan untuk meningkatkan proses perancangan itu sendiri atau hasil dari proses perancangan (Granath, Lindahl, & Rehal, 1996).

Menurut Albrecht (1988) *Participatory design* sejauh ini akan memiliki arti bahwa arsitek mendesain contoh atau bagian-bagian penting dari proyek, sedangkan partisipan mengerjakan sisanya. Menurut Kensing (2003) di dalam proses partisipasi ini, stakeholder bertukar data dan model dalam jumlah besar, dan diperbolehkan menghabiskan banyak waktu berdiskusi untuk memecahkan konflik dan isu desain yang spesifik. Aktivitas seperti komunikasi dan perubahan yang menyangkut artefak desain adalah dimensi kunci untuk proses desain.

Partisipasi mungkin dilihat sebagai bentuk keterlibatan masyarakat secara langsung di dalam proses pengambilan keputusan. Pada tipe partisipasi ini, warga kota ikut serta dalam keputusan yang menentukan kualitas dan arah hidup mereka. Orang-orang akan datang bersama-sama jika perubahan akan dan dapat terjadi. Partisipasi dapat difungsikan apabila aktif dan secara langsung, serta komunitas yang dituju memiliki rasa kepuasan (Sanoff, 2000).

Menurut Bharuna (2004) jika mengacu kepada pemikiran politik dan arsitektur, dengan kata lain proses *participatory design* merupakan kombinasi antara *self-conscious tradition* yang menekankan pada otoritas arsitek dan *unself-conscious tradition* yang menekankan pada otoritas rakyat.

Partisipasi dalam desain dapat mengumpulkan masyarakat secara bersama-sama untuk berbicara tentang masalah-masalah yang ada yang menguntungkan bagi sebuah komunitas atau organisasi besar yang tidak saling mengenal. Sommer juga

menambahkan bahwa partisipasi dalam desain menciptakan sebuah hubungan antara manusia dengan lingkungan fisiknya serta mampu menciptakan rasa kebersamaan diantara mereka yang terlibat dalam proses perencanaan tersebut (Sommer, 1983).

Peran arsitek dalam perancangan partisipatif tidak lagi sebagai pendeta yang secara kosmologis, punya wewenang untuk mengubah kosmos dengan memandang arsitektur sebagai model surgawi, tidak sebagai seorang master builders yang individualistis terhadap kreatifitas rancangannya semata, melainkan lebih sebagai seorang fasilitator dengan gagasan-gagasan yang lebih demokratis (Bharuna, 2004).

Dari penjelasan-penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *Participatory design* merupakan pendekatan perancangan desain dengan melibatkan secara langsung pengguna (masyarakat) dalam proses perancangannya. Pendekatan tersebut tidak lagi menempatkan perancang (arsitek) sebagai satu-satunya penentu atau pembuat keputusan desain. Keterlibatan pengguna dilakukan pada penentuan keputusan, baik dalam hal penentuan permasalahan, penyelesaian permasalahan maupun pada saat pengambilan keputusan desain akhir.

2.1.2. Prinsip Partisipasi (*Principle Participation*)

Konsep dari partisipasi saat ini berpusat pada tujuan untuk menciptakan komunitas yang berkelanjutan (sustainable) di berbagai Negara di dunia. Hal tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat yang dapat menilai isu dari kejahatan dan rasa takut akan kejahatan tersebut di lingkungan mereka, dan oleh karena itu memahami proses partisipasi adalah penting (Colquhoun, 2004).

Di dalam Arsitektur, *community building* dan inisiatif regenasi kota adalah panggung utama untuk mempraktekkan desain partisipatori. Praktisi desain partisipatori mengarahkan untuk memastikan bahwa masyarakat yang akan menghuni suatu bangunan baru atau runcana peningkatan lingkungan diwakili dengan baik selama proses desain berlangsung. Proses tersebut dapat dilakukan dengan berbagai jalan, menggunakan peralatan dan teknik yang memungkinkan pihak non-arsitek dilibatkan secara langsung di dalam pengambilan keputusan tentang permasalahan arsitektural (Rank, O’Coill, Boldyreff, & Doughty, 2004).

Menurut Sanoff (2000) prinsip dari partisipasi dapat diringkas menjadi lima pernyataan, sebagai berikut :

1. Tidak terdapat “solusi terbaik” bagi permasalahan desain; setiap permasalahan memiliki beberapa solusi. Solusi pada permasalahan perencanaan dan desain pada dasarnya terdiri dari dua kriteria :
 - a. Fakta—data empiris mengenai kekuatan material, ekonomis, building codes (peraturan bangunan), dan sebagainya.
 - b. Perilaku—interpretasi dari fakta tersebut, langgam tertentu pada suatu daerah, pendekatan secara tradisional dan kebiasaan/adat dan nilai hukum, keputusan perencanaan dan desain dipengaruhi oleh pengambil keputusan.
2. Keputusan yang dihasilkan oleh seorang ahli tidak selalu lebih baik dari masyarakat dengan diberikannya fakta-fakta yang dipergunakan untuk membuat keputusan, pengguna mampu mengamati alternatif-alternatif yang ada dan memilih diantaranya, desainer dan perencana yang terlibat dalam pendekatan tersebut dianggap sebagai salah satu dari partisipan yang mampu mengidentifikasi berbagai alternatif yang mungkin dan mendiskusikan konsekuensi dari berbagai macam konsekuensi tersebut dan memberikan opini—bukan keputusan—seperti partisipan (pengguna lainnya)
3. Perencanaan desain dibuat transparan, para ahli hanya mengkomunikasikan ide mereka untuk didiskusikan dengan masyarakat (warga). Setelah masyarakat memahami ide-ide tersebut, maka diharapkan masyarakat dapat mengembangkan desain tersebut, bukan hanya merespon desain saja. Hasil produk dengan proses tersebut lebih berhasil karena lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan pengguna (warga)
4. Seluruh individu dan kelompok-kelompok yang terlibat harus berada secara bersama dalam suatu forum yang terbuka. Dengan cara tersebut masing-masing warga dapat mengutarakan pendapat mereka secara langsung dan didiskusikan, dan pada akhirnya tiba pada keputusan yang dapat diterima bagi semua pihak
5. Proses tersebut berlanjut dan berubah. Produk bukan merupakan hasil akhir dari proses, produk harus diolah (diatur), dievaluasi ulang, dan disesuaikan terhadap perubahan kebutuhan. Dan yang paling baik dalam melakukan hal tersebut adalah pengguna sendiri, karena mereka yang berinteraksi langsung dengan produk tersebut.

Telah diyakini bahwa partisipasi dalam perancangan adalah suatu jawaban untuk mengurangi banyaknya pertanyaan dari masyarakat yang berkenaan dengan kota ke

permasalahan yang teknis. Menurut Bharuna (2004) pendekatan manusiawi dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perancangan dan perencanaan bangunan, setidaknya dapat mengatasi sejumlah kendala yang bisa mengakibatkan kegagalan suatu perumahan. Dengan pendekatan ini produk arsitektur yang merupakan hasil rancangan partisipatif dapat memberikan nilai baru yang menaikkan harkat dan martabat (*dignity*) masyarakat sebagai suatu yang bisa menjadi kebanggaan bagi masyarakat dan sumbangan yang berharga bagi peta budaya kita.

Becker dalam Sommer (1983) mengidentifikasi lima jenis partisipasi pengguna (user participation) pada desain lingkungan, yaitu:

1. Menciptakan bentuk dan objek mereka sendiri
2. Seleksi dan perencanaan bentuk yang telah disediakan
3. Sebuah pilihan diantara rencana-rencana alternatif yang mampu diselesaikan oleh mereka sendiri
4. Menyediakan informasi kepada perancang yang menggambarkan rencana
5. Tidak ada konsultasi dan pilihan.

Partisipasi bermakna berbeda untuk setiap orang yang berbeda-dan bahkan untuk orang yang sama-tergantung pada isu, waktu, dan keadaan politik dimana hal tersebut terjadi. Perencanaan yang menyertai perkembangan dari berbagai program partisipasi harus lebih dahulu memasukkan ketentuan dari sasaran, seperti (Sanoff, 2000:11):

- a. Apakah partisipasi diharapkan untuk menghasilkan sebuah ide?
- b. Apakah partisipasi itu untuk mengidentifikasi perilaku?
- c. Apakah partisipasi itu untuk menyebarkan informasi?
- d. Apakah partisipasi itu untuk menyelesaikan beberapa masalah yang telah diidentifikasi?
- e. Apakah partisipasi itu untuk membuktikan suatu opini?
- f. Apakah partisipasi itu untuk meninjau ulang sebuah teori / proposal?
- g. Ataupun partisipasi itu hanya untuk melayani?

Daftar sasaran mungkin akan berbeda dari waktu ke waktu dan dari isu ke isu lain. Suatu ketika sasaran partisipasi dinyatakan dengan jelas menurut jenis isu dan orang-orang yang terlibat.

Menurut Sommer (1983) terdapat lima kondisi yang dapat menunjang keberhasilan pada proses partisipasi, yaitu:

- a. Klien (individu, kelompok, maupun perusahaan) yang secara sadar menginginkan untuk memperbaiki kondisi dari pengguna.
- b. Perancang dengan telinga yang besar yang mau mendengarkan pengguna. Terpenuhinya kebutuhan pengguna harus lebih diutamakan dari pada ego perancang.
- c. Pengguna mampu berkomitmen pada diri mereka sendiri untuk bekerja keras dan berkontribusi secara efektif terhadap proses perancangan. Individu yang sama harus berpartisipasi dalam seluruh proses perencanaan dan mampu mewakili suara yang sah dari pengguna. Jika mereka merasa bahwa mereka hanya mewakili diri mereka sendiri, mereka mungkin tidak bersungguh-sungguh untuk mengutarakan opini dan argument mereka.
- d. Waktu yang cukup dan kebebasan dari rasa tertekan untuk mengenal, saling memahami bahasa masing-masing, pertukaran informasi yang tersedia dan mengeksplorasi berbagai macam alternatif.
- e. Bantuan informasi dan peralatan yang fleksibel untuk merealisasikan proyek dan memindahkan secara cepat dan lancar dari yang hanya verbal ke visual. Sebuah diskusi tidak akan berjalan jika dokumen-dokumen seperti cetak biru dan sebagainya hanya dimengerti oleh para ahli sedangkan masyarakat tidak mengeti apapun. Maka menterjemahkan adalah sesuatu yang penting untuk membuat informasi teknis dan grafis tersebut dimengerti oleh masyarakat, sehingga mereka mampu memberikan pendapatnya.

Pendekatan perancangan partisipatif memberikan kemungkinan terciptanya suatu pemahaman yang sama antara arsitek dan masyarakat calon penghuni tentang rumah (*home*), sesuai dengan konsep yang dipegang oleh masyarakat akan *dunia-hidup-nya (Lebenswelt)* (Bharuna, 2004).

2.1.3. Tujuan Partisipasi

Tujuan partisipasi telah lebih disederhanakan, yaitu untuk pertukaran informasi, penyelesaian suatu masalah, dan pengembangan rencana maupun desain. Tujuan utama dari partisipasi adalah sebagai berikut (Sanoff, 2000:4):

1. Untuk melibatkan masyarakat (warga) dalam proses “mendesain” serta “membuat (menciptakan)” dan, sebagai hasilnya meningkatkan kepercayaan dan rasa percaya diri mereka dalam berorganisasi, membuatnya seolah-olah masyarakat akan

menerima keputusan dan rencana yang ada serta mampu bekerja dalam sistem yang sudah ditetapkan ketika mencari solusi terhadap masalah yang ada.

2. Memberikan masyarakat (warga) sebuah suara dalam desain dan pembuatan keputusan, dengan tujuan untuk memperbaiki rencana, keputusan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Untuk meningkatkan rasa kebersamaan dengan membawa masyarakat (warga) secara bersama-sama yang memiliki satu tujuan.

2.2. Langkah-Langkah Partisipasi (*Stages of Participation*)

Dalam bukunya *Design Out Crime: Creating Safe and Sustainable Community*, Colquhoun (2004) menyebutkan tujuh tahap partisipasi:

Tahap pertama: menetapkan sasaran (*define objectives*)

Merencanakan program partisipasi sebaiknya lebih dahulu memasukkan identifikasi dari sasaran (Sanoff, 2000:16):

- Mengapa proses tersebut dibutuhkan?
- Apakah bentuk penyelesaian yang dibutuhkan?
- Bagaimana kelompok tersebut melaksanakan?
- Bagaimana suatu keputusan akan dibuat?
- Apa jadwal / rencana yang disusun?
- Siapakah yang akan menerima dan bertindak pada produk akhir?

Tahap kedua: riset, penilaian lingkungan dan sosial (*research, environmental and social assessment*)

Landasan untuk perencanaan dan desain selanjutnya adalah sebuah penilaian lingkungan yang seksama pada area. Proses ini melibatkan penduduk dalam menilai lingkungan fisik mereka sehari-hari, dan kekurangan serta kelebihanannya. Peneliti harus dengan baik memberi informasi untuk masyarakat, menurut sejarah dan menurut ilmu social, melalui catatan, wawancara, observasi, dan beberapa partisipasi dalam kehidupan masyarakat (Colquhoun, 2004:262).

Tahap ketiga: menetapkan tujuan (*define goals*)

Penilaian lingkungan perlu digunakan dalam cara positif untuk membantu masyarakat mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai. Tujuan adalah ide terbuka yang

didapatkan dari mengumpulkan pengetahuan dari masyarakat, keahlian, kemampuan, dan pengalaman. Yaitu (Colquhoun, 2004:263):

- Apakah yang kita harapkan untuk kita jaga?
- Apakah yang perlu ditambahkan yang tidak ada?
- Apakah yang perlu dihilangkan?
- Apakah yang kita tidak miliki dan diperlukan?

Tahap keempat: pemilihan strategi (*strategy selection*)

Menyediakan arah untuk tujuan yang ingin dicapai sebuah hasil yang spesifik. Setiap partisipan dapat menentukan dan menyampaikan prioritas mereka sendiri dan didiskusikan hingga ditemukan suatu kesepakatan yang paling penting untuk seluruh masyarakat (Colquhoun, 2004:264).

Tahap kelima: memasang informasi (*assemble information*)

Partisipan bertukar informasi dan mengidentifikasi tambahan informasi yang diperlukan. Proses ini meliputi wawancara dengan tenaga ahli, presentasi slide dan meninjau ulang catatan teknis, jurnal dan buku (Colquhoun, 2004:264).

Tahap keenam: menetapkan kunci masalah (*define the key problems*)

Metode untuk menetapkan masalah dapat menggunakan deskripsi verbal, diagram, flow chart dan model. Konsensus pada pernyataan masalah dapat dicapai dari pernyataan kembali masalah oleh setiap partisipan dalam bahasa mereka sendiri, dengan begitu dapat dipastikan bahwa semua partisipan mengerti semua elemen dari masalah (Colquhoun, 2004:264).

Tahap ketujuh: menghasilkan visi (*generate the vision*)

Tahap ini adalah tahap untuk membuat visi masa depan yang ideal dikembangkan dalam kelompok kecil dan diperankan oleh semua orang. Tahap ini harus menganjurkan alternatif solusi, yang diprioritaskan oleh partisipan dari yang paling banyak dan paling sedikit menginginkan, atau keuntungan dan kerugian yang dapat diidentifikasi untuk setiap pilihan.

2.3. Metode Partisipasi (*Participation Methods*)

Metode partisipasi biasanya menghasilkan produk desain yang teratur pada skala manusia. Pada umumnya masyarakat tidak mendesain suatu hal bagi kebutuhan mereka sendiri yang mengucilkan kehidupan, rumah dan tetangga mereka (Sommer, 1983). Dalam hal ini yang dimaksud mengucilkan adalah mereka lebih cenderung menutup diri dari tetangga atau lingkungan sekitar. Metode partisipasi tersebut dapat menjadi sebuah langkah yang mempertemukan masyarakat dalam suatu forum diskusi bersama.

2.3.1. Perencanaan Strategi (*Strategic Planning*)

Strategi adalah sebuah perilaku untuk menggerakkan sumber daya pada suatu tujuan utama. Termasuk pada penetapan tujuan dan prioritas, mengidentifikasi isu dan daerah pilihan, mengembangkan organisasi, mengambil tindakan dan mengevaluasi hasil (Checkowe dalam Sanoff, 2000).

Menurut Sanoff (2000) perencanaan strategi memerlukan pengumpulan informasi, eksplorasi dari alternatif-alternatif yang ada, dan menegaskan gambaran ke depan mengenai keputusan yang akan diambil. Sebuah perencanaan strategi dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, dan mampu mengakomodasi minat dan nilai-nilai yang berbeda, dan mampu membantu pengembangan dari keputusan yang akan diambil dan implementasi yang sukses.

Bryson dalam Sanoff (2000) mengemukakan bahwa perencanaan strategi memiliki orientasi pada tindakan, mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang ada di masa depan, dan focus kepada implikasi dari keputusan dan tindakan yang dibuat dan berhubungan dengan kemungkinan tersebut.

Berbagai kondisi harus dipenuhi agar proses perencanaan strategi berjalan efektif (Sanoff, 2000:43):

- a. Harus ada alasan yang memaksa untuk menjalankan suatu *strategic planning* (perencanaan strategi). Pengambil keputusan harus mampu melihat keuntungan yang penting dari perencanaan strategi atau rencana tersebut menjadi tidak efektif
- b. Proses tersebut harus didukung oleh pemimpin yang berpengaruh dan kuat
- c. Harus ada penganjur / penyokong proses, seseorang yang percaya dalam *strategic planning* dan mengambil keputusan
- d. Proses tersebut harus disesuaikan pada situasi dari suatu masyarakat
- e. Pengambil keputusan harus berbicara antara satu dengan yang lainnya tentang apa yang penting untuk seluruh komunitas

- f. Sumberdaya yang dibutuhkan, merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan dan sebuah komitmen dari pengambil keputusan.

2.3.2. Visi

Suatu visi proses pada umumnya adalah elemen penting dalam suatu rencana strategi masyarakat. Partisipan diminta untuk berfikir bagaimana seharusnya suatu komunitas dan mencari cara untuk mengidentifikasi, memperkuat dan bekerja untuk mencapai visi dari suatu komunitas (masyarakat) (Sanoff, 2006).

Visi adalah sebuah proses mencari untuk “menciptakan hidup, pemandu yang bermanfaat bagi tindakan public yang diharapkan memposisikan masyarakat untuk masa depan (Thomas, Means, and Grieve dalam Sanoff, 2000 ; 43).

Menurut Sanoff (2000) proyek visi masyarakat disusun oleh warga, yang sering kali ditujukan sebagai stakeholder yang peduli tentang masa depan komunitasnya. Visi proses yang sukses mampu meliputi segala perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Sebagai kelompok perencanaan untuk visi proses, mereka menetapkan tujuan dan mengembangkan rencana tindakan dan mengimplementasikan strategi.

2.3.3. Perencanaan Tindakan Masyarakat (*Community Action Planning*)

Community Action Planning (CAP) adalah pendekatan yang mampu memberikan wewenang kepada masyarakat untuk mendesain, mengimplementasikan, dan mengatur program penyelesaian (perbaikan) lingkungan mereka sendiri. Karakteristik utama dari CAP adalah bersifat partisipasi, berbasis masyarakat, pengendalian masalah, dan bersifat cepat (Sanoff, 2000). Menurut Sanoff (2000) walaupun partisipasi masyarakat merupakan inti dari *action planning*, fokus dari CAP adalah penggabungan antara pemerintah dengan kelompok non-pemerintah, antara departemen pemerintah dan kelompok masyarakat yang bersaing.

Di Inggris, Nick Wates (1996), *Prince of Wales Institute of Architecture* menerbitkan *Action Planning* sebagai alat untuk desain masyarakat (*community design*). *Action Planning* (perencanaan tindakan) berguna untuk diterapkan pada peningkatan kualitas kota, perencanaan pengembangan baru, dan perencanaan dalam masa krisis, seperti pembangunan kembali masyarakat yang menderita karena bencana alam atau karena kondisi politik. *Action planning* dalam sebuah kegiatan adalah penting untuk membantu memfokuskan perhatian pada sasaran jangka panjang dan

meningkatkan proses dari kegiatan tersebut (Sanoff, 2000). Contoh dari *action planning* akan ditunjukkan pada tabel (tabel 2.1) berikut ini.

Tabel 2.1. Action Planning Process

	<i>Getting Started</i> 1-2 months*	<i>Preparation</i> 2-4 months*	<i>The Event</i> several days*	<i>Follow-up</i> ongoing*
<i>Local Interest</i> Individuals and organizations	<ul style="list-style-type: none"> • Concern to improve environment • Stimulate action • Establish steering Group and Host (see below) 	<ul style="list-style-type: none"> • Build momentum, enthusiasm and expectation through discussion and by focusing attention on the main issues 	<ul style="list-style-type: none"> • Participate in public session 	<ul style="list-style-type: none"> • Analyse proposals • Develop support for strategies and projects • Apply pressure for implementation • Ongoing participation
<i>Steering Group/ Host/ Organiser</i> Main enthusiast and technical advisors	<ul style="list-style-type: none"> • Formation/ appointment • Explore options for action • Prepare proposal • Stimulate enthusiasm • Secure commitment from all affected parties • Raise funds • Commitment to proceed 	<ul style="list-style-type: none"> • Select team Chairperson, Team members, Advisors and consultants • Establish administration and technical support • Gather information • Prepare venues • Publicise 	<ul style="list-style-type: none"> • Event management and administration 	<ul style="list-style-type: none"> • Assess proposals and prioritise • Agree plan for action • Publicity • Spearhead and co-ordinate implementation • Maintain momentum
<i>Event Team</i> Specialists from complementary disciplines		<ul style="list-style-type: none"> • Homework on the locality and the Action Planning process • Reconnaissance visit by Chairperson 	<ul style="list-style-type: none"> • Arrive • Reconnaissance • Briefings • Topic workshops • Design workshops • Brainstorm • Prepare proposals • Presentation • Leave 	<ul style="list-style-type: none"> • Revisit and assist as requested
<i>Support Bodies</i> National, International and regional organizations	<ul style="list-style-type: none"> • Supply general information and advice • Evaluation visit if requested 	<ul style="list-style-type: none"> • Supply detailed information and contacts 	<ul style="list-style-type: none"> • Observe • Participate • Assist if asked 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitor and evaluate • Assist if asked

Action Planning Process, Diadaptasi dari Nick Wates (1996), *Prince of Wales Institute of Architecture*
Sumber : Sanoff, 2000

2.4. Teknik Partisipasi (Participation Techniques)

Terdapat cakupan yang luas dari teknik yang tersedia bagi perancang dan perencana. Beberapa teknik ini telah menjadi metode standar yang digunakan dalam proses *participatory*. Contohnya, partisipasi yang jarang terjadi tanpa menggunakan teknik pengambilan keputusan kelompok interaktif dalam workshop. Diwaktu yang sama, teknik lapangan seperti kuisisioner, wawancara, memusatkan kelompok dan memetakan kelompok telah digunakan secara efektif oleh perancang dan perencana untuk memperoleh informasi (Sanoff, 2000:67).

Sanoff (2000) mengklasifikasikan teknik partisipasi menjadi lima kategori utama:

1. Metode kesadaran (*Awareness Methods*)

Pameran, orang-orang perlu tahu isu tentang apa yang dapat merangsang keputusan mereka untuk berpartisipasi. Media berita, mengirim berita pada Koran, radio atau televisi adalah salah satu cara untuk menarik perhatian media dalam membuat cerita. Tur keliling, pendekatan lain untuk memudahkan kesadaran pengguna terhadap situasi lingkungan, terutama dimana orang-orang telah beradaptasi untuk keadaan yang tidak tertahankan, tur keliling ini direncanakan pada daerah studi.

2. Metode Tidak Langsung (*Indirect Methods*)

Survey dan kuisioner membantu mengumpulkan informasi, sikap, dan pendapat dari sampel populasi pengguna. Pendekatan ini hasilnya lebih mudah diukur, hasilnya cepat.

3. Metode Interaksi kelompok (*Group Interaction Methods*)

Fokus kelompok biasanya terdiri dari enam sampai sepuluh orang secara hati-hati dipilih dengan fasilitator sebagai pemandu diskusi untuk isu yang relevan. Ini adalah sebuah proses yang mengumpulkan kepentingan kelompok dalam seri pertemuan interaktif yang diarahkan pada penyelesaian permasalahan khusus.

4. Metode Terbuka (*Open-Ended Methods*)

Forum publik, pertemuan publik mengizinkan pemimpin masyarakat untuk memperkenalkan informasi proyek kapanpun selama proses berlangsung. Walaupun ini menunjukkan sebuah partisipasi masyarakat, hanya yang cenderung kepribadiannya sangat agresif untuk berpartisipasi dan sering mendominasi diskusi.

5. Metode Pengungkapan Pendapat (*Brainstorming Methods*)

Pengungkapan pendapat yang klasik adalah metode lisan dari penyelesaian masalah digunakan dengan kelompok kecil terdiri dari tiga sampai Sembilan orang, dengan tiga peraturan yang harus di ikuti:

- Menghasilkan sebanyak mungkin solusi
- Gagasan yang liar di dukung
- Tidak ada kritik yang diijinkan-penilaian ditunda

2.5. Keterlibatan Masyarakat dan Tingkat Partisipasi

Partisipasi mempunyai arti keterlibatan diri secara utuh penuh pada suatu tekad yang menjadi kesepakatan bersama, tiap pihak yang terlibat, berkepentingan (pemerintah, swasta, masyarakat) merupakan bagian dari proses pembangunan itu (Kadir, 2009). Kadir juga menambahkan bahwa bagian terpenting dari partisipasi adalah kewenangan masyarakat untuk memutuskan sebagai pelaku utama tanpa ada paksaan dan bergerak atas dasar kesadaran sendiri.

Menurut Arnstein (1969) terdapat delapan tingkatan partisipasi masyarakat yang akan ditunjukkan dalam gambar (gambar 2.1). kedelapan tingkatan partisipasi tersebut diatur dalam dalam pola sesuai dengan tingkat dari kekuasaan masyarakat dalam menentukan hasil akhir.

	Tingkat Partisipasi	Tingkat pemberian kekuasaan
8	Kontrol Masyarakat	
7	Pendelegasian Kekuasaan	Kontrol Masyarakat
6	Kemitraan	
5	Placation	
4	Konsultasi	Tokenism
3	Pemberitahuan	
2	Terapi	
1	Manipulasi	Tidak ada Partisipasi

Gambar 2.1 Delapan Tingkatan Partisipasi Masyarakat
Sumber : Arnstein (1969)

Dari delapan tingkatan partisipasi digolongkan menjadi tiga berdasarkan tingkat kewenangan (kekuasaan) masyarakat dalam berpartisipasi. Pada tingkat (1) manipulasi dan (2) terapi menunjukkan (menguraikan) tingkat dari “non-partisipasi” sasaran dari tingkat tersebut bukanlah untuk memungkinkan masyarakat untuk mengambil bagian di (dalam) perencanaan atau melaksanakan program, tetapi memungkinkan powerholders untuk " mendidik" atau " menyembuhkan" peserta (partisipan).

Tingkat (3) pemberitahuan dan (4) konsultasi berada pada tingkat “tokenism” dimana masyarakat didengarkan dan mempunyai suara. Tetapi di bawah kondisi-kondisi

mereka kekurangan kuasa untuk mengasuransikan bahwa pandangan mereka akan diperhatikan oleh yang kuat. Keikutsertaan terbatas pada tingkatan ini, tidak ada lanjutan, tidak ada jaminan mengubah keadaan tetap pada suatu saat tertentu. Tingkatan (5) placation adalah suatu tingkat tokenism yang lebih tinggi sebab peraturan mengizinkan masyarakat untuk menasehati, tetapi saran masyarakat tidak selalu dilaksanakan.

Lebih lanjut tingkatan teratas adalah tingkat kewenangan masyarakat pada pengambilan keputusan. Warga dapat masuk pada tingkat (6) kemitraan yang memungkinkan mereka untuk merundingkan dan terlibat dalam tarik-menarik dengan pemilik yang tradisional. Tingkat (7) pendelegasian kekuasaan dan tingkat (8) kontrol masyarakat pada tingkat ini masyarakat memperoleh kewenangan mayoritas dari pengambilan keputusan, atau kekuasaan managerial penuh.

Menurut Kadir (2009) keberhasilan dan kegagalan pendekatan masyarakat dapat disebabkan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti kemampuan masyarakat dalam menyikapi atau merespon permasalahan yang berkembang didaerahnya, terdapat tokoh masyarakat yang menjadi motivator, adanya organisasi yang intens dengan permasalahan yang ada. Faktor eksternal seperti adanya sikap pemerintah dan para profesional dari provider menjadi *enabler* yang sering kali membutuhkan waktu lama, diperlukan unsur pendamping yang profesional untuk mengisi kelemahan masyarakat awam sebagai penyandang proyek.

2.6. **Konsensus (*Consensus*)**

Konsensus berasal dari bahasa latin “*concensus genetium*” yang berarti persetujuan (Gove dan Merriam-Webster dalam Sanoff, 2000).

Brody dalam Sanoff (2000) mengemukakan “consensus terjadi setelah seluruh anggota diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka dan dapat mencapai sebuah keputusan yang dapat didukung oleh semua orang. Proses datangnya sebuah konsensus bersifat bebas dan saling bertukar gagasan secara terbuka, yang berlanjut hingga persetujuan tercapai. Proses tersebut memastikan bahwa setiap kepentingan individu didengar dan dimengerti dan usaha yang sungguh-sungguh dibuat untuk membawa mereka kepada pemikiran untuk mencari sebuah penyelesaian. Penyelesaian ini mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh setiap anggota, namun

karena tidak merugikan kepentingan semua orang, keputusan dapat disetujui oleh semua orang.”

2.7. Definisi Rekonstruksi

Pada proses penanggulangan pasca bencana sering kali dijumpai kata rekonstruksi atau pembangunan kembali. Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana terdapat penjelasan mengenai pengertian rekonstruksi, yaitu sebagai berikut:

Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana.

Rencana Rekonstruksi adalah dokumen yang akan digunakan sebagai acuan bagi penyelenggaraan program rekonstruksi pasca-bencana, yang memuat informasi gambaran umum daerah pasca bencana meliputi antara lain informasi kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, sarana dan prasarana sebelum terjadi bencana, gambaran kejadian dan dampak bencana beserta semua informasi tentang kerusakan yang diakibatkannya, informasi mengenai sumber daya, kebijakan dan strategi rekonstruksi, program dan kegiatan, jadwal implementasi, rencana anggaran, mekanisme/prosedur kelembagaan pelaksanaan.

Pelaksana Rekonstruksi adalah semua unit kerja yang terlibat dalam kegiatan rekonstruksi, di bawah koordinasi pengelola dan penanggungjawab kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada lembaga yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana di tingkat nasional dan daerah.

2.8. *Logic Frame Analysis*

2.8.1. *Logical Framework Analysis (LFA) oleh BOND (Networking for International Development)*

Manajemen Bantuan Pembiayaan

Mengapa menggunakan sebuah *logical framework analysis* (LFA), karena kebanyakan pendonor (penderma) menyukai LFA. LFA dapat menjadi alat yang bermanfaat, keduanya pada perancangan, monitoring dan evaluasi manajemen pada pengembangan proyek. Bukan merupakan satu-satunya alat perencanaan, namun penggunaannya mendorong kedisiplinan berfikir yang rinci dan jelas. LFA juga menyediakan ringkasan yang singkat untuk menginformasikan staff proyek, pendonor (penderma), penerima bantuan, dan stakeholder lainnya.

Sebuah *logic frame* (juga dikenal sebagai suatu kerangka proyek) adalah suatu alat untuk perencanaan dan memanager pengembangan proyek. Seperti sebuah tabel (atau kerangka) dan mengarahkan untuk menyajikan informasi tentang komponen kunci dari suatu proyek jelas, ringkas, sistematis dan logis.

Ringkasan sebuah *logic frame* dalam format standar:

- a. Apa yang akan dicapai oleh sebuah proyek?
- b. Apa aktivitas yang akan dilakukan untuk dapat mencapai hasil dan tujuan?
- c. Apa sumber daya (masukan) yang diperlukan?
- d. Apakah permasalahan yang potensial yang dapat mempengaruhi kesuksesan proyek?
- e. Bagaimana kemajuan dan keberhasilan akhir dari proyek akan dibuktikan

Sebagian istilah yang dilibatkan dalam LFA tampak agak mengintimidasi. Penderma yang berbeda menggunakan istilah yang sedikit berbeda, tetapi kerangka yang logis adalah sama saja pada prinsipnya. Model atau format dari *logical framework* akan ditunjukkan pada tabel (tabel 2.2) berikut ini.

Tabel 2.2. *A logical framework model*

<i>Objectives</i>	<i>Measurable indicators</i>	<i>Means of verification</i>	<i>Important assumptions</i>
<u>GOAL:</u> <i>Wider problem the project will help to resolve</i>	<i>Quantitative ways of measuring or qualitative ways of judging timed achievement of goal</i>	<i>Cost-effective methods and sources to quantify or assess indicators</i>	<i>(Goal to supergoal)</i> <i>External factors necessary to sustain objectives in the long run</i>
<u>PURPOSE:</u> <i>The immediate impact on the project area or</i>	<i>Quantitative ways of measuring or qualitative ways of</i>	<i>Cost-effective methods and sources to quantify</i>	<i>(Purpose to Goal)</i> <i>External conditions necessary if achieved</i>

<i>target group i.e. the change or benefit to be achieved by the project</i>	<i>judging timed achievement of purpose</i>	<i>or assess indicators</i>	<i>project purpose is to contribute to reaching project goal</i>
<u>OUTPUTS:</u> <i>These are the specifically deliverable results expected from the project to attain the purpose</i>	<i>Quantitative ways of measuring or qualitative ways of judging timed production of outputs</i>	<i>Cost-effective methods and sources to quantify or assess indicators</i>	<u>(Outputs to purpose)</u> <i>Factors out of project control which, if present, could restrict progress from outputs to achieving project purpose</i>
<u>ACTIVITIES:</u> <i>These are the tasks to be done to produce the outputs</i>	<u>INPUTS:</u> <i>This is a summary of the project budget</i>	<i>Financial out-turn report as agreed in grant agreement</i>	<u>(Activity to output)</u> <i>Factors out of project control which, if present, could restrict progress from activities to achieving outputs</i>

A logical framework (DFID model)

Sumber : DFID's "Guidelines on Humanitarian Assistance", May 1997 dalam BOND, 2003

DFID menguraikan logical framework sebagai "suatu alat untuk membantu para perancang dari proyek untuk berfikir secara logika tentang apa tujuan yang ingin dicapai oleh suatu proyek, hasil dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai hasil. Tujuan proyek dari sudut pandang DFID untuk melayani sasaran hasil yang tingkatnya lebih tinggi (gol)"

Tiga langkah untuk menyukseskan:

- a. Top down (sasaran)
 - Gol
 - Tujuan
 - Hasil
 - Kegiatan
 - Sumber daya (masukan)
- b. Work across (alat yang terukur dan makna verifikasi)
 - Indikator
 - Sumber informasi
- c. Bottom up (asumsi)
 - Faktor eksternal
 - Cek sekali lagi

2.8.2. Logical Framework Approach oleh AusAID

Pendekatan logical framework (LFA) adalah suatu metodologi desain yang digunakan oleh pendonor (penderma) bilateral dan multilateral, yang juga mencakup Australia. Hal tersebut didasarkan pada suatu analisa yang sistematis dari situasi pengembangan, terutama permasalahan pengembangan, dan pilihan untuk menunjukkan permasalahan.

LFA adalah sebuah analisis, presentasi dan alat manajemen yang dapat membantu perencana dan para manajer:

- a. Meneliti situasi yang ada selama persiapan aktivitas
- b. Menetapkan suatu hirarki makna yang logis yang mana sasaran hasil akan dicapai
- c. Mengidentifikasi resiko yang potensial menuju keberhasilan sasaran hasil dan hasil yang didapat
- d. Menetapkan bagaimana cara terbaik keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dimonitor dan dievaluasi
- e. Jika diperlukan, menyajikan suatu ringkasan dari bentuk aktivitas
- f. Monitor dan tinjauan ulang aktivitas selama implementasi

Sebuah produk analisis dari LFA adalah *Logical Framework Matrix* (LFM). Terdiri dari suatu matriks dengan empat kolom dan sejumlah baris, yang meringkas aspek terpilih dari suatu aktivitas desain, yaitu:

- a. Apakah aktivitas yang akan dilakukan, dan apakah yang akan dihasilkan (uraian aktivitas)
- b. Hirarki aktivitas dari tujuan dan sasaran hasil (juga merupakan uraian aktivitas)
- c. Asumsi kunci yang dibuat (asumsi)
- d. Bagaimana aktivitas yang dicapai akan diukur, dimonitor dan dievaluasi (Indikator dan alat pembuktian)

Struktur yang umum dari suatu *logical framework matrix* ditunjukkan dalam tabel (tabel 2.3) berikut ini.

Tabel 2.3. Struktur umum (format) *logical framework matrix*

Activity Description	Indicators	Means of Verification (MOVs)	Assumption
Goal/ Impact	Indicators	MOVs	Assumption
Purpose/ Outcome	Indicators	MOVs	Assumption
Component Objectives/ Intermediate Result	Indicators	MOVs	Assumption
Outputs	Indicators	MOVs	Assumption

Work (optional)	program	Indicators	MOVs	Assumption
-----------------	---------	------------	------	------------

Struktur umum (format) *logical framework matrix*

Sumber : AusAID *Australian Agency for International Development*, 2005

Menggunakan angka-angka acuan bermanfaat untuk membantu pengguna *logframe* merundingkan logika dari matriks. Hal ini juga membantu pembaca memahami aktivitas, keluaran dan hasil yang dihubungkan serta menyediakan suatu acuan yang jelas ketika menyiapkan rencana implementasi yang lebih terperinci menggunakan implementasi, sumber daya dan jadwal biaya yang dihubungkan pada matriks *logframe*.

Dalam menyiapkan matriks *logframe*, fokusnya berada pada melukiskan keluaran (output), bahwa aktivitas yang dilakukan mengarah pada hasil. Bagaimanapun keluaran yang dihasilkan mungkin tidak sama dengan keluaran dari suatu kontraktor. Keluaran aktivitas pada umumnya memerlukan tindakan yang dilakukan oleh stakeholders dimana kontraktor tidak memiliki kendali langsung, misalnya mitra pemerintah yang menerapkan para agen.

2.9. Manajemen Proyek

Manajemen proyek adalah semua perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan koordinasi suatu proyek dari awal (gagasan) hingga berakhirnya proyek untuk menjamin pelaksanaan proyek secara tepat waktu, tepat biaya dan tepat mutu (Ervianto, 2002).

A. Tahap Perancangan

Tahap perancangan (desain) bertujuan untuk melengkapi penjelasan proyek dan menentukan tata letak, rancangan, metoda konstruksi, dan taksiran biaya agar mendapatkan persetujuan dari pemilik proyek dan pihak berwenang yang terlibat.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah (Ervianto, 2002):

- a. Mengembangkan ikhtisar proyek menjadi penyelesaian akhir
- b. Memeriksa masalah teknis
- c. Meminta persetujuan akhir ikhtisar dari pemilik proyek
- d. Mempersiapkan
 - Rancangan skema (prarancangan) termasuk taksiran biaya
 - Rancangan terinci

- Gambar kerja, spesifikasi dan jadwal
- Daftar kuantitas
- Taksiran biaya akhir
- Program pelaksanaan pendahuluan, termasuk jadwal waktu.

B. Tahap Perencanaan

Sebelum pelaksanaan kegiatan proyek konstruksi dimulai, biasanya didahului dengan penyusunan rencana kerja waktu kegiatan yang disesuaikan dengan metode konstruksi yang akan digunakan. Dalam penyusunan rencana kerja, perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut (Ervianto, 2002):

- a. Keadaan lapangan lokasi proyek
- b. Kemampuan tenaga kerja
- c. Pengadaan material konstruksi
- d. Pengadaan alat pembangunan
- e. Gambar kerja
- f. Kontinuitas pelaksanaan pekerjaan

Hal-hal yang mendasar dari kegiatan perencanaan adalah pencarian informasi dan data, pengembangan dari berbagai alternatif yang mungkin, melakukan analisis dan evaluasi dari berbagai alternatif, pemilihan alternatif, pelaksanaan dan memberi masukan.

C. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan (konstruksi) bertujuan untuk mewujudkan bangunan yang dibutuhkan oleh pemilik proyek dan sudah dirancang oleh konsultan perencana dalam batasan biaya dan waktu yang telah disepakati, serta dengan mutu yang telah disyaratkan.

Kegiatan yang dilakukan adalah merencanakan, mengoordinasi, mengendalikan semua operasional di lapangan. Kegiatan perencanaan dan pengendalian adalah (Ervianto, 2002):

- Perencanaan dan pengendalian jadwal waktu pelaksanaan
- Perencanaan dan pengendalian organisasi lapangan
- Perencanaan dan pengendalian tenaga kerja
- Perencanaan dan pengendalian peralatan dan material

Kegiatan koordinasi adalah:

- Mengoordinasikan seluruh kegiatan pembanguna, baik untuk bangunan sementara maupun bangunan permanen, serta semua fasilitas dan perlengkapan yang terpasang
- Mengoordinasikan para subkontraktor
- Penyeliaan umum

2.10. Contoh Penerapan Pendekatan Partisipatorik (*Participatory Design Approach*) pada Program Perbaikan Permukiman

2.10.1. Kampung Improvement Program

KIP Komprehensif adalah sebuah program pembangunan kampung terpadu. KIP lebih berkonsentrasi pada perbaikan infrastruktur untuk menangani suatu lingkungan yang kumuh. KIP adalah program yang memiliki tiga tahapan. Tahapan pertama dan kedua lebih berkonsentrasi pada perbaikan infrastruktur. Sedangkan tahapan ketiga ditambahkan dimensi sosial atau ekonomi yang bertujuan untuk pembangunan ekonomi. KIP atau program perbaikan kampung ini dalam pengertiannya adalah program perbaikan suatu lingkungan yang penduduknya terdiri dari msyarakat berpenghasilan rendah dan menengah dengan maksud meningkatkan suatu standar hidup masyarakat pada suatu taraf yang layak. Peningkatan standar hidup masyarakat tersebut dilakukan melalui peningkatan dan pengadaan fasilitas sosial seperti sekolah, puskesmas, tempat rekreasi, dan prasarana seperti jalan, listrik, air minum, saluran sanitasi, dan tempat pembuangan sampah.

KIP (*Kampung Improvement Program*) diperkenalkan pertama kali pada tahun 1923 pada awalnya bertujuan untuk mengatasi permasalahan sanitasi permukiman penduduk yang saat itu banyak dihuni orang-orang Eropa. KIP diperkenalkan kembali pada tahun 1960an di Jakarta dan Surabaya dengan tujuan untuk memperluas sasaran pembangunan wilayah perkotaan kepada penduduk yang berpenghasilan rendah. Tujuan dari proyek perbaikan kampung (KIP) yaitu, menyediakan perumahan dan perkotaan yang menawarkan dukungan penting dalam mengurangi kemiskinan perkotaan dan meningkatkan koordinasi antara badan-badan independen yang terhubung dalam pelaksanaan proyek perbaikan kampung/ *kampung improvement project/programme* (KIP).

KIP Komprehensif di Bandarharjo Semarang, proyek peremajaan Bandarharjo, menganut prinsip participatory planning dan community design. Sang arsitek Ir. Andy Siswanto, M.Arch. M.Sc mengajak warga sejauh mungkin untuk ikut memberi masukan dalam perencanaan penataan kawasan dan dalam rancangan rumah. Peremajaan Bandarharjo menganut prinsip tidak menggusur, sehingga proses peremajaan permukimannya di laksanakan secara bertahap.

KIP Komprehensif di Surabaya, Johan Silas adalah tokoh yang tidak lepas dari kepiawaian dalam mengolah KIP Komprehensif di Surabaya. KIP yang dikembangkan oleh Johan Silas memprioritaskan pembangunan permukiman untuk orang-orang yang berpendapatan rendah yang memang sudah banyak di contoh oleh negara-negara berkembang lain seperti India.

2.10.2. Permukiman Pinggiran Kali Code

YB Mangunwijaya (1929-1999), seorang Romo Katolik yang banyak dikenal sebagai seorang budayawan, sebenarnya juga merupakan seorang arsitek yang sangat istimewa. Salah satu karya beliau adalah pemukiman di pinggiran kali Code Yogyakarta yang mendapatkan penghargaan internasional Aga Khan Award for Architecture tahun 1992. Pemukiman ini adalah suatu proyek revitalisasi kota yang berbasis partisipasi masyarakat. Di lokasi ini, lingkungan pemukiman yang dulunya kumuh dan tidak higienis berhasil ditata dengan cara pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat sendiri yang diajak membenahi lingkungannya sendiri (Gunawan, 2009).



Gambar 2.2 Permukiman Kali Code
Sumber: Gunawan, 2009

Pada mulanya kampung kali Code adalah pemukiman kumuh di pinggiran Kali Code beranggotakan 30-40 keluarga. Pada tahun 1983 pemerintah bermaksud menggusur pemukiman ini, namun atas permohonan ketua RT Willi Prasetya dan Romo Mangun, rencana tersebut ditanggihkan. Sebagai gantinya diselenggarakan suatu

proyek revitalisasi dengan melibatkan 2 koran lokal untuk mendukung pendanaan (Gunawan, 2009).

Perencanaan dan pembangunan area ini dimulai pada tahun 1983 dan selesai selama kurang lebih 2 tahun. Hampir tidak ada gambar atau dokumen konstruksi dibuat untuk proyek ini. Semua berlangsung secara spontan dan alamiah. Secara umum konstruksi rumah berbentuk huruf A dengan rangka dari bambu, dinding bilik bambu dan atap seng. Hanya tiga tukang kayu dan 2 tukang batu dipekerjakan untuk proyek ini, selebihnya adalah tenaga partisipasi warga dan sukarelawan. Mahasiswa seni rupa ikut terjun sebagai relawan untuk membimbing warga memperindah tampilan luar rumah mereka (Gunawan, 2009).

2.10.3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (RE-KOMPAK) di Aceh dan Nias

Program berbasis komunitas adalah suatu program dimana masyarakat dilibatkan dalam semua aspek program mulai dari perencanaan hingga pembangunan dengan dana dan pekerjaan tetap diawasi ReKompak. Program yang dilaksanakan ReKompak terdiri dari beberapa kegiatan yaitu Bantuan Dana Rumah (BDR), Bantuan Dana Lingkungan (BDL), dukungan pelaksanaan dan peningkatan kapasitas serta dukungan program, monitor dan evaluasi proyek.

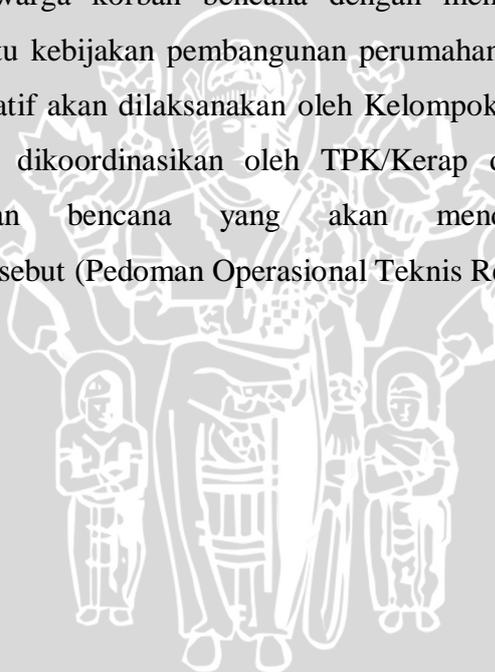
Dalam Proyek Re-Kompak yang diselenggarakan jumlah dana bantuan yang akan diperoleh tiap keluarga ditentukan oleh tingkat kerusakan rumah mereka. Kerusakan rumah di bagi menjadi 2 kategori :

- Rusak Ringan : akan mendapat bantuan dana untuk rehabilitasi
- Rusak Berat : akan mendapat bantuan dana untuk rekonstruksi

Penetapan tingkat kerusakan rumah harus dilakukan secara musyawarah yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 80% dari Panitia Penetapan Penerima Hibah, yang terdiri dari 3 anggota Panitia Survei Swadaya, 3 anggota Kerap dan 3 tokoh masyarakat, calon penerimamanfaat dan 2 orang saksi. Penetapan tingkat kerusakan dan calon penerima bantuan dilakukan pada proses survei swadaya. Survei swadaya adalah kegiatan penggalian data dan informasi tentang kondisi lingkungan permukiman yang dilakukan oleh masyarakat korban bencana gempa dan tsunami di NAD dan Nias sebagai bahan untuk menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan dan perumahan mereka (Pedoman Operasional Teknis Re-Kompak, 2005).

Detail perencanaan rehab-rekon permukiman terdiri atas perencanaan lingkungan secara partisipatif dan perencanaan perumahan secara partisipatif. Perencanaan lingkungan permukiman secara partisipatif adalah proses penyusunan rencana rehab-rekon prasarana lingkungan permukiman di tingkat kelurahan/desa/geuchik yang akan dibiayai oleh BDL dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku dan penentu kebijakan pembangunan lingkungan permukiman mereka. BDL digunakan untuk pembangunan prasarana lingkungan yang disepakati masyarakat. Apabila disepakati, BDL dapat digunakan secara luwes, misalnya untuk membangun hunian sementara yang nantinya dialihfungsikan untuk bangunan publik, atau dapat juga digunakan untuk menutupi kekurangan biaya pembangunan rumah.

Perencanaan perumahan secara partisipatif adalah proses penyusunan rencana rehab-rekon perumahan warga korban bencana dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku dan penentu kebijakan pembangunan perumahan mereka. Perencanaan perumahan secara partisipatif akan dilaksanakan oleh Kelompok- Kelompok Pemukim (KP) yang dibentuk dan dikoordinasikan oleh TPK/Kerap dengan beranggotakan keluarga-keluarga korban bencana yang akan mendapatkan BDR di kelurahan/desa/geuchik tersebut (Pedoman Operasional Teknis Re-Kompak, 2005).



Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya mengenai pendekatan partisipatif pada perancangan pernah dilakukan oleh **Anak Agung Gde Djaja Bharuna** dalam jurnalnya yang berjudul **Arsitektur Untuk Rakyat? Suatu Kajian Tentang Pendekatan Perancangan Partisipatif**.

Tema yang diangkat pada penelitian tersebut adalah permasalahan arsitektur untuk rakyat berpenghasilan rendah di daerah urban/perkotaan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah solusi yang dilakukan dan diarahkan pada pembahasan mengenai pendekatan perancangan partisipatif sebagai suatu metode perancangan untuk pengadaan perumahan. Pembahasan penelitian ini lebih banyak pada masalah perumahan karena merupakan wujud arsitektur yang paling dekat dengan masyarakat. Ada dua isu besar yang terkandung dalam substansi tulisan ini, yaitu pertama isu budaya yang menelaah perancangan partisipatif akan potensinya dalam ruang lingkup arsitektur sebagai produk budaya, dan kedua isu politik yang menelaah pendekatan ini dari lingkup pembangunan yang menyangkut masalah ideologi dalam memandang solusi/pemecahan permasalahan ini.

Penelitian yang saya lakukan lebih pada pembahasan mengenai bentuk partisipasi masyarakat pada proses rekonstruksi hunian dilihat dari hubungan antara arsitek, partisipan, dan produk desain (produk arsitektur), dengan cara mendeskripsikan bagaimana bentuk hubungan antara arsitek, partisipan, dan produk desain yang terjadi selama proses rekonstruksi berlangsung

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan (menguraikan) tema kajian yang diangkat, yaitu mengenai hubungan antara arsitek, partisipan, dan produk pada proses rekonstruksi dusun Ngibikan pasca-gempa. Penelitian dimulai dengan mengumpulkan informasi dilapangan tanpa kerangka terstruktur. Sesuai dengan pendekatan kualitatif peneliti kemudian menyimpulkan suatu teori yang dapat menjelaskan atau memberikan pemahaman atas fenomena yang terjadi di lapangan (*theory after*). Penelitian ini tidak bertujuan untuk membuat generalisasi hasil.

Teknik penelitian yang digunakan berdasarkan pendekatan kualitatif pada penelitian ini adalah teknik *field study* (studi lapangan), karena data yang diperlukan perlu digali langsung dari para partisipan kegiatan rekonstruksi yaitu arsitek, masyarakat peserta (partisipan) dan produk. Untuk dapat melakukan hal tersebut, peneliti perlu melakukan studi lapangan pada lokasi penelitian, selain itu peneliti harus terjun langsung ke dalam masyarakat sehingga teknik penelitian yang mendukung berikutnya adalah *participant observation*.

3.2. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai penerapan pendekatan partisipatorik (*participatory design approach*) pada pelaksanaan rekonstruksi permukiman di dusun Ngibikan pasca gempa, yang ditunjukkan melalui bentuk hubungan antara arsitek, partisipan, dan produk. Pembahasan mengenai penerapan pendekatan partisipatorik pada proses rekonstruksi dusun Ngibikan ditekankan pada segi proses, yaitu bagaimana manajemen perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan ditinjau dengan pendekatan partisipatorik. Siapa saja yang berpartisipasi, bagaimana teknik dan metode pelaksanaannya, dan hal-hal yang berkaitan dengan pendekatan partisipatorik lainnya.

3.3.2. Waktu Penelitian

Waktu untuk kegiatan penelitian ini mulai dari tahap persiapan hingga tahap penulisan laporan adalah selama satu semester. Penetapan waktu penelitian dimaksudkan agar tahap-tahap pelaksanaan penelitian terarah. Pelaksanaan kegiatan studi lapangan dilakukan selama sepuluh hari, pelaksanaan kegiatan studi lapangan dilakukan pada bulan April. Adapun jadwal kegiatan penelitian akan ditunjukkan pada tabel (tabel 3.1) berikut ini.

Tabel 3.1. Jadwal Kegiatan Penelitian

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	Maret 2010	Pengajuan Proposal Penelitian
2.	Maret 2010	Mengumpulkan data sekunder dan review literature
3.	April 2010	Mengurus perijinan ke lokasi penelitian
3.	April 2010	Studi lapangan (observasi partisipasi dan wawancara tidak terstruktur)
4.	Mei 2010	Analisa data dan menguraikan proses desain partisipasi

Pelaksanaan studi lapangan dilakukan pada bulan April, yaitu pada tanggal 17 hingga 27 April. Waktu penelitian tidak dibatasi pada pagi, siang, maupun sore hari. Pemilihan waktu untuk pengumpulan data dan dokumentasi foto dilaksanakan pada waktu yang memungkinkan peneliti dapat berinteraksi langsung dengan warga.

3.4. Unit Amatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana unit amatan akan diperoleh pada lokasi penelitian setelah adanya proses *grand touring* pada setting penelitian. Unit amatan pada penelitian ini adalah produk desain dan masyarakat dusun Ngibikan sebagai peserta pada rekonstruksi dengan menggunakan desain partisipatori. Unit Amatan Penelitian akan ditunjukkan pada tabel (tabel 3.2) berikut ini.

Table 3.2. Unit Amatan Penelitian

No.	Unit Amatan	Metode
1.	Metode pendekatan partisipatorik di Ngibikan	Observasi dan wawancara tidak terstruktur
2.	Langkah-langkah pendekatan partisipatorik di Ngibikan	Observasi dan wawancara tidak terstruktur

3.	Prinsip pendekatan partisipatorik di Ngibikan	Observasi dan wawancara tidak terstruktur
4.	Para pelaku (partisipan)	Observasi dan wawancara tidak terstruktur
5.	Bentuk keterlibatan para pelaku	Observasi dan wawancara tidak terstruktur
6.	Proses pelaksanaan rekonstruksi	Observasi dan wawancara tidak terstruktur
7.	Manajemen pelaksanaan	Observasi dan wawancara tidak terstruktur
8.	Manajemen pembiayaan	Observasi dan wawancara tidak terstruktur
9.	Produk desain	Observasi, dokumentasi foto, dan sketsa denah
10.	Latar belakang budaya masyarakat Ngibikan	Observasi dan wawancara tidak terstruktur
11.	Kondisi Ngibikan pasca gempa	Arsip dokumen foto

3.5. Unit Analisis Penelitian

Dari unit amatan yang telah ditentukan dideskripsikan menjadi unit informasi sesuai dengan kondisi di lapangan. Dari unit informasi tersebut akan dihasilkan unit-unit analisis. Dengan menggunakan unit-unit analisis tersebut maka data yang telah didapat dapat diolah (dianalisis) hingga kemudian didapatkan hasil.

Table 3.3. Unit Analisis Penelitian

Unit Amatan	Unit Informasi	Unit Analisis
<ul style="list-style-type: none"> Bentuk penerapan pendekatan partisipatorik di Ngibikan 	<ul style="list-style-type: none"> Bentuk penerapan pendekatan partisipatorik di Ngibikan 	<ul style="list-style-type: none"> Bentuk penerapan pendekatan partisipatorik di Ngibikan
<ul style="list-style-type: none"> Para pelaku (partisipan) 	<ul style="list-style-type: none"> Para pelaku (partisipan) 	<ul style="list-style-type: none"> Para pelaku (partisipan)
<ul style="list-style-type: none"> Bentuk keterlibatan para pelaku 	<ul style="list-style-type: none"> Bentuk keterlibatan para pelaku 	<ul style="list-style-type: none"> Bentuk keterlibatan para pelaku
<ul style="list-style-type: none"> Proses pelaksanaan rekonstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen Konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen Konstruksi
<ul style="list-style-type: none"> Manajemen pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> Produk desain 	<ul style="list-style-type: none"> Produk desain

-
- Manajemen pembiayaan
 - Produk desain
 - Latar belakang budaya masyarakat Ngibikan
 - Kondisi Ngibikan pasca gempa
-

3.6. Tahap Penelitian

Penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap yaitu metode pengumpulan data dan metode analisa data. Metode pengumpulan data berhubungan dengan teknik *field study* (studi lapangan) yang digunakan pada penelitian ini.

3.6.1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada studi lapangan antara lain observasi, wawancara, dan partisipasi. Di luar lokasi penelitian adalah penelitian arsip dan studi pustaka. Terdapat dua jenis sumber data, sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini adalah perancang (arsitek) dan masyarakat Ngibikan. Data primer merupakan hasil observasi dan hasil wawancara di lapangan. Sedangkan data sekunder merupakan data dari pustaka baik buku maupun media elektronik. Tujuan *field study* (studi lapangan) adalah untuk mendapatkan informasi langsung dari para partisipan mengenai proses rekonstruksi, untuk itu langkah-langkah pengumpulan data antara lain :

- Metode Observasi

Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian berupa produk desain bangunan dan observasi terhadap partisipan kegiatan rekonstruksi dalam hal ini adalah masyarakat Ngibikan. Mendokumentasikan foto-foto produk dan beberapa kegiatan sehari-hari masyarakat

- Metode Wawancara Tidak Terstruktur

Pada penelitian ini, wawancara tidak terstruktur dilakukan untuk mendapatkan data mengenai penerapan pendekatan desain partisipatori pada proses rekonstruksi. Wawancara dilakukan pada warga sebagai partisipan dan pada arsitek. Untuk memudahkan proses perolehan data, maka dipilih dua key person sebagai nara sumber. Key person pertama adalah arsitek dan key person kedua adalah warga yang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai proses rekonstruksi.

- Metode Berpartisipasi

Pada penelitian observasi dilakukan dengan cara peneliti terlibat langsung dalam setting penelitian. Keterlibatan peneliti pada penelitian ini adalah *participant as observer*, yaitu peneliti terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat, tetapi diketahui identitas dan tujuan.

- Penelitian Arsip

Penelitian arsip di sini adalah mencari data dokumentasi kegiatan rekonstruksi dusun Ngibikan pasca-gempa yang telah dilaksanakan. Arsip pelaksanaan kegiatan didapatkan melalui wawancara dengan penduduk, arsip yang dimaksud bukan berupa catatan tertulis melainkan cerita pengalaman masyarakat selama melakukan rekonstruksi.

3.6.2. Metode Analisis Data

Data lapangan akan didapatkan setelah adanya proses pengamatan. Untuk memulai pengamatan pertama ditentukan terlebih dahulu unit amatan. Unit amatan didapatkan dari adanya proses *grand touring* yang dilakukan pada setting penelitian. Kemudian dari unit amatan tersebut dideskripsikan menjadi unit informasi sesuai dengan kondisi di lapangan. Dari unit informasi akan dihasilkan unit-unit analisis. Dengan menggunakan unit-unit analisis tersebut maka data yang telah didapat dapat diolah (dianalisa) hingga kemudian didapatkan hasil. Untuk menganalisa data digunakan teori pendekatan partisipatorik yang terdiri atas prinsip, metode dan langkah-langkah penerapan, selain itu digunakan teori manajemen konstruksi dan LFA (*logic frame analysis*).

Table 3.4. Tahap Analisis Data

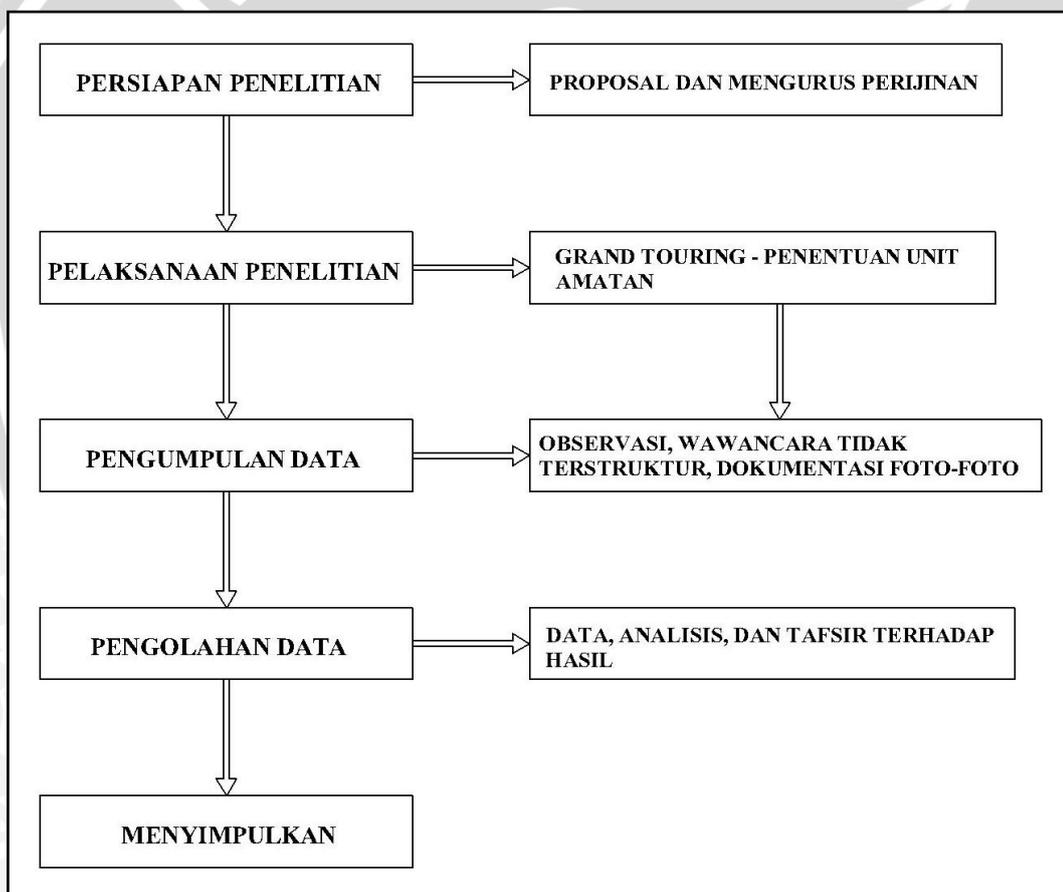
No.	Unit Analisis	Metode Analisis
1.	• Bentuk penerapan pendekatan partisipatorik di Ngibikan	Prinsip, langkah-langkah, metode, dan teknik partisipatorik (<i>participatory design</i>). Konsensus
2.	• Para pelaku (partisipan)	Prinsip partisipatorik (<i>participatory design</i>)
3.	• Bentuk keterlibatan para pelaku	Prinsip partisipatorik (<i>participatory design</i>) dan tingkat partisipasi
4.	• Manajemen Konstruksi	LFA (<i>logic frame analysis</i>) dan manajemen pelaksanaan konstruksi
5.	• Produk desain	Konsensus

3.7. Instrumen Penelitian

Untuk mempermudah penelitian dan analisa data secara relevan, maka dalam penelitian ini diperlukan instrumen sebagai berikut :

1. Peneliti, yang menjadi instrumen kunci dengan segala aktivitas dalam menyerap dan mengambil data dengan menggunakan memorinya yang juga berperan sebagai partisipan, artinya peneliti terlibat dalam kehidupan warga Ngibikan secara langsung.
2. Orang, yang menjadi pengamatan dari peneliti untuk memperoleh data mengenai penerapan pendekatan partisipatorik dan keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut.

3.8. Diagram Proses Penelitian



Gambar 3.2 Diagram Proses Penelitian

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Rekonstruksi dusun Ngibikan telah dilaksanakan dan diselesaikan pada tahun 2006. Penerapan pendekatan partisipatorik pada proses rekonstruksi ini merupakan suatu metode desain dan rekonstruksi yang diterapkan secara tidak terorganisir. Perencanaan rekonstruksi berlangsung secara alami dimana perencanaan dilakukan arsitek bersama-sama dengan masyarakat. Pada bab hasil ini akan diuraikan bentuk penerapan pendekatan partisipatorik pada proses rekonstruksi dusun Ngibikan dan factor-faktor yang melatarbelakangi penerapan pendekatan partisipatorik pada proses rekonstruksi dusun Ngibikan.

4.1.1. Tingkat Kerusakan Bangunan di Ngibikan Pasca-Gempa

Gempa yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 membawa kerusakan yang besar di daerah Yogyakarta. Menurut Peta Kerusakan Gempa (sementara) yang dibuat oleh UNOSAT 2006 Kecamatan Jetis merupakan daerah dengan kerusakan berat. Sedangkan Ngibikan yang merupakan bagian dari Kecamatan Jetis sendiri tergolong dalam daerah kerusakan sedang. Meskipun demikian tingkat kerusakan yang terjadi di dusun Ngibikan juga tergolong cukup parah. Dahsyatnya gempa bumi telah meluluhlantakkan dusun Ngibikan, bangunan-bangunan runtuh menjadi puing-puing. Di wilayah RT 05 RW 14 bahkan kerusakan terjadi hampir di seluruh bangunan rumah. Hanya satu rumah yang tidak roboh, yaitu rumah milik pak Maryono ketua RT di wilayah tersebut. Selain itu gempa bumi juga menyebabkan puluhan warga dari anak-anak, orang dewasa, lelaki, maupun perempuan terluka. Gempa bumi telah membawa rasa sakit dan kesedihan yang amat mendalam bagi warga di Ngibikan. Beberapa hari setelah gempa warga Ngibikan harus tidur di bawah tenda dan dalam kegelapan malam dikarenakan hampir sebagian besar wilayah di Bantul belum teraliri listrik kembali pasca gempa.

Sebagian besar bangunan rumah yang roboh seluruh bagian rumahnya tidak dapat diselamatkan, namun beberapa rumah masih menyisakan sebagian dari rumah, seperti dinding, atap, maupun kusen. Tingkat kerusakan di RT 05 RW 14 dapat dikategorikan menjadi kategori berat, sedang dan ringan, yang akan ditunjukkan pada tabel (tabel 4.1) berikut ini:

Tabel 4.1 Tingkat Kerusakan bangunan di RT 05 RW 04 dusun Ngibikan

No.	Tingkat Kerusakan	Gambar
1.	Ringan	
2.	Sedang	
3.	Berat	

Sumber gambar : Prawoto, 2006

4.1.2. Kondisi Sosial Masyarakat Ngibikan

Ngibikan merupakan salah satu dusun di desa Canden yang memiliki enam buah RT. Dari hasil pengamatan didapatkan bahwa wilayah Ngibikan bukan merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Menurut data BPS jumlah penduduk di desa Canden tahun 2008 adalah 10.289 jiwa dengan rata-rata jiwa per dusun adalah 411 jiwa. Kenaikan jumlah penduduk pada tingkat kecamatan jetis dari tahun 2006 hingga 2007 sebesar 1,4 %, sedangkan dari tahun 2007 ke tahun 2008 sebesar 0,6 %. Prosentase sama dengan tingkat kenaikan banyaknya rata-rata jiwa perdusun, pada tahun 2007 jumlah total rata-rata jiwa perdusun adalah 798 jiwa (tingkat kecamatan) dan pada tahun 2008 adalah 803 jiwa (tingkat kecamatan) naik sebesar 0,6 %. Berdasarkan perhitungan tersebut maka jumlah rata-rata jiwa per dusun di desa Canden lebih kurang masih dalam angka 400 jiwa, jika dibagi per RT maka rata-rata jiwa di RT 05 RW 14 adalah sebesar ± 66 jiwa.

Dari jumlah penduduk menurut umur di kecamatan jetis (data BPS 2009), penduduk dengan umur 0-19 jumlahnya lebih kecil dibandingkan penduduk dengan umur 20-24 dan 40+. Di dusun Ngibikan sendiri dari hasil pengamatan, jumlah remaja lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah orang dewasa (orang tua).

Mata pencaharian sebagian besar masyarakat Ngibikan adalah petani. Yang kedua adalah pekerja konstruksi (mandor dan pekerja bangunan). Untuk membantu ekonomi keluarga sebagian besar ibu rumah tangga bekerja sebagai penjahit, selain itu beberapa penduduk juga beternak sapi. Menurut data BPS jumlah keluarga di desa Canden pada tahun 2007 adalah 3.336 keluarga, dari jumlah tersebut 23, 14 % merupakan keluarga pra sejahtera, 20,89 % merupakan keluarga sejahtera (KS) I, 31,32 % adalah KS II, 20,65 % adalah KS III, dan 3,39 % adalah KS III+. Perbandingan data pada tahun 2006 dengan tahun 2007, tahun 2007 jumlah keluarga pra sejahtera mengalami penurunan dibanding tahun 2006. Sedangkan KS I, II, III, III+ mengalami peningkatan. Dengan melihat data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat ekonomi masyarakat di Ngibikan pada tahun 2006 berada pada tingkat menengah ke bawah.

Sebagai bagian dari masyarakat Yogyakarta, warga Ngibikan memiliki karakteristik budaya dan keseharian masyarakat jawa. Warga Ngibikan sejak dahulu telah menyukai sikap kegotongroyongan. Ketika salah seorang tetangga akan membuat rumah, maka warga yang lain akan datang untuk membantu secara sukarela. Selain itu

pada saat membangun rumah mereka akan mengadakan selamatan menaikkan bubungan sebagai salah satu tradisi budaya. Sikap kekeluargaan dan kebersamaan di antara warga juga masih sangat erat. Interaksi sosial yang dilakukan oleh warga tinggi. Pada pagi dan sore hari masyarakat berkumpul bersama untuk mengobrol di depan rumah. Walaupun rumah mereka agak berjauhan karena tanah halaman mereka yang luas, akan tetapi masyarakat saling mengenal antar tetangga. Masyarakat di Ngibikan sangat ramah dan penolong, terhadap tamu yang berkunjung ke lingkungan tempat tinggal mereka, mereka pun juga sangat *welcome*. Kehidupan masyarakat cukup sederhana, kondisi sosial seperti tingkat kejahatan sangat rendah, hal tersebut terbukti dengan kebiasaan masyarakat yang mengundang hewan ternak disamping rumah dan bahkan meninggalkannya dalam keadaan pintu kandang terbuka.



Gambar 4.1 Aktivitas Warga yang dilakukan Bersama-Sama
Sumber : Dok. Peneliti 2010

Posisi warga yang memiliki pengetahuan yang luas, kekuasaan dan tingkat ekonomi yang tinggi memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan social masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dari sikap masyarakat yang patuh dan hormat terhadap pemimpin masyarakat. Karena pengetahuan dan sikap kepemimpinan yang baik, masyarakat akan lebih percaya dan mematuhi setiap saran dan pengarahan yang diberikan oleh pemimpin masyarakat.

4.1.3. Latar Belakang Partisipasi Warga dalam Proses Rekonstruksi

Salah satu hal yang harus diperhatikan untuk penanganan permasalahan hunian pasca bencana adalah kebudayaan masyarakat lokal. Beberapa factor yang mempengaruhi antara lain adalah kondisi sosial, faktor ekonomi, dan kebudayaan masyarakat setempat. Pada proses rekonstruksi dusun Ngibikan dilakukan pendekatan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses rekonstruksi. Untuk dapat membangun keinginan masyarakat dalam berpartisipasi tentu terdapat pendekatan atau penggerak yang mampu memotivasi warga untuk ikut berpartisipasi.

Pada proses rekonstruksi dusun Ngibikan faktor yang menjadi penggerak warga untuk ikut berpartisipasi adalah faktor budaya masyarakat. Dari budaya kegotongroyongan (kegotongroyongan) yang dimiliki oleh masyarakat Ngibikan, warga dapat dimotivasi untuk bersama-sama membangun lingkungannya yang hancur akibat bencana gempa bumi. Warga secara bersama-sama membangun lingkungan dengan kesadaran diri dan kepentingan yang sama, tidak memandang perbedaan tingkat ekonomi ataupun pendidikan. Karena kegotongroyongan dan kegotongroyongan warga Ngibikan dalam melaksanakan rekonstruksi, maka proses rekonstruksi dapat berjalan dengan cepat.

Partisipasi yang dilakukan masyarakat Ngibikan merupakan suatu bentuk partisipasi sosial yang dilakukan dengan spontan. Dapat disebut spontan karena perencanaan yang tidak terorganisir dan waktu yang singkat. Dalam hal ini tidak terdapat LSM ataupun NGO (*Non-Government Organization*) yang dengan sengaja merencanakan proses rekonstruksi dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Sang arsitek Eko Prawoto memiliki keterikatan dengan beberapa warga Ngibikan yang bekerja sebagai tenaga tukang untuknya, sehingga pasca terjadinya gempa ia bersama keluarga berkunjung untuk melihat kondisi masyarakat yang memang telah ia kenal. Perencanaan rekonstruksi selanjutnya berlangsung secara alami dimana Eko Prawoto bersama dengan pemimpin masyarakat Pak Maryono memotivasi warga untuk bersama-sama membangun rumah mereka kembali. Pertimbangan atas potensi warga Ngibikan sebagai tukang juga dilakukan untuk memaksimalkan partisipasi dalam pelaksanaan rekonstruksi. Kondisi social dan budaya masyarakat juga diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap jalannya proses rekonstruksi. Untuk memaksimalkan partisipasi seluruh warga, maka Eko Prawoto memberikan kebebasan (kewenangan) bagi warga untuk berpartisipasi dalam pengembangan desain, sehingga setiap warga memiliki kontrol terhadap pembangunan serta perancangan desain rumahnya.

4.1.4. Keterlibatan Perancang dan Masyarakat dalam Proses Rekonstruksi

A. Keterlibatan Perancang (Arsitek) pada Proses Rekonstruksi

Pendekatan partisipatorik pada rekonstruksi permukiman pasca-gempa di Ngibikan terjadi tanpa adanya sebuah rencana pada awalnya. Proses Rekonstruksi bangunan dilakukan bersama secara partisipatif antara warga dan arsitek. Keterlibatan arsitek dalam proses perancangan adalah sebagai fasilitator warga. Dalam menentukan desain Eko Prawoto hanya memberikan gagasan, terlebih dahulu gagasan tersebut

ditawarkan pada warga untuk dipertimbangkan. Dari proses tersebut diketahui seperti apakah desain yang diinginkan oleh warga. selain itu pemilihan material yang digunakan juga melalui kesepakatan yang dilakukan warga. Pada proses perancangan tersebut, warga berperan sebagai pengambil keputusan dan arsitek sebagai konsultan desain yang juga memberikan saran, namun setiap keputusan tetap sesuai dengan keinginan warga. Desain yang dihasilkan merupakan desain yang telah dimufakati bersama.

Selanjutnya desain yang telah dihasilkan diserahkan pada warga untuk dilakukan pengembangan desain selama proses rekonstruksi berlangsung. Pengembangan desain oleh warga berupa pengaturan ruang dalam dan fasade rumah. *Design rule* yang ditegaskan oleh arsitek berupa struktur konstruksi bangunan saja, sedangkan untuk bagian bangunan yang lain diserahkan pada warga walaupun begitu arsitek tetap menyediakan gambar kerja utuh yang dapat dipatuhi maupun tidak oleh warga. Hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan partisipasi warga, sehingga warga akan merasa bahwa mereka ikut dalam merancang rumah mereka.

B. Keterlibatan dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Ngibikan pada proses Rekonstruksi

Pendekatan partisipatorik pada proses rekonstruksi dusun Ngibikan adalah bahwa warga dilibatkan secara langsung selama proses rekonstruksi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Tidak hanya memberikan saran maupun gagasan, setiap warga memiliki kontrol terhadap pembangunan rumahnya masing-masing, karena merekalah yang melaksanakan pembangunan dan mereka dapat mengembangkan desain sesuai dengan keinginan mereka. Arsitek yaitu Eko Prawoto hanya merancang bagian terpenting dari desain bangunan, yaitu hanya sebatas merancang konstruksi. Penataan ruang dalam dan pengaturan fasade sepenuhnya di serahkan kepada warga.

Aktor-aktor (pelaku) yang berperan dalam proses rekonstruksi tersebut antara lain:

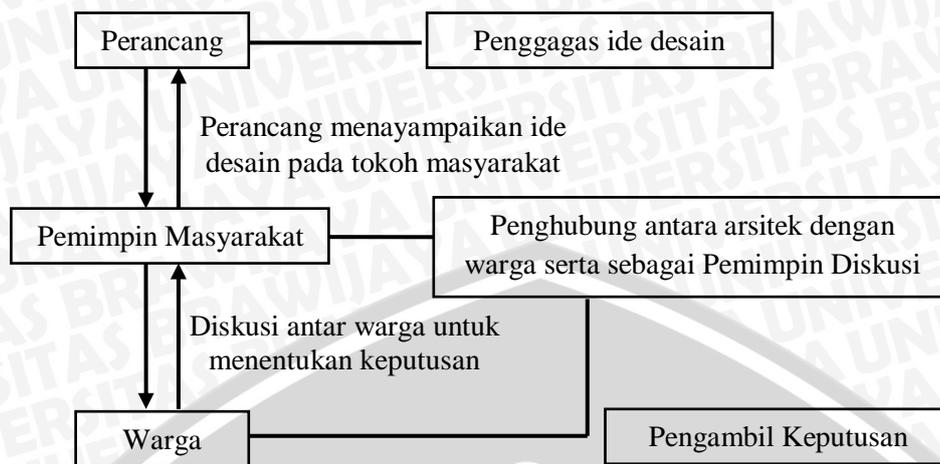
- a. Warga RT 05 RW 14 dusun Ngibikan
- b. Pemimpin formal : ketua RT (Maryono)
- c. Tim pendamping : arsitek (Eko Prawoto)
- d. Pendonor dana : Dana Kemanusiaan Kompas (DKK)

Pada kegiatan rekonstruksi tersebut setiap pelaku memiliki peran yang menentukan berjalannya kegiatan rekonstruksi tersebut. Bentuk keterlibatan para pelaku akan ditunjukkan pada tabel (tabel 4.2) sebagai berikut.

Tabel 4.2 Bentuk Keterlibatan para Pelaku Kegiatan Rekonstruksi

Pelaku	Bentuk Keterlibatan para Pelaku
Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • pembuat keputusan dan pelaksana proyek rekonstruksi, pengembang desain inside (desain dalam bangunan) pada proses pelaksanaan, dan sebagai pengguna
Pemimpin Formal (Ketua RT)	<ul style="list-style-type: none"> • Tokoh Masyarakat : penghubung antara arsitek dan masyarakat , sebagai leader umum dalam pengambilan keputusan dan dalam pelaksanaan proyek (koordinator lapangan)
Arsitek	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan gagasan ide desain kepada masyarakat, penghubung antara pemberi dana dan masyarakat.
Pendonor Dana	<ul style="list-style-type: none"> • memberikan dana bagi proyek rekonstruksi untuk 65 rumah warga

Pada proses rekonstruksi dusun Ngibikan adalah bahwa perancang (arsitek) tidak lagi berperan sebagai pengambil keputusan utama. Tingkat partisipasi warga cukup besar pada saat proses pelaksanaan rekonstruksi, pada tahap tersebut warga tidak hanya melaksanakan pembangunan, namun juga berpartisipasi pada pengembangan desain. Pada tahap perencanaan dan perancangan awal tingkat partisipasi warga masih pasif, walaupun demikian warga tetap berperan dalam proses penentuan keputusan desain. Peran yang paling menonjol pada proses ini adalah peran pemimpin formal dalam hal ini adalah pemimpin RT yaitu Maryono. Pemimpin RT sebagai penghubung antara arsitek dan warga dalam hal ini peran pemimpin adalah menyampaikan gagasan serta memberikan saran-saran kepada masyarakat, pada tahap awal tersebut warga cenderung menyerahkan keputusan kepada pemimpin atau dalam bahasa mereka “nurut” kepada ketua RT. Bentuk keterlibatan dan peran perancang, pemimpin masyarakat dan warga dalam proses pengambilan keputusan gagasan desain akan ditunjukkan pada gambar (gambar 4.2) berikut ini.



Gambar 4.2 Diagram Bentuk keterlibatan dan peran para pelaku dalam proses pengambilan keputusan gagasan desain

Pada proses diskusi pemimpin memiliki andil besar dalam penentuan keputusan. Warga tidak terlalu agresif dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil selanjutnya disampaikan kepada arsitek. Hasil desain yang dibuat oleh arsitek merupakan desain dari kesepakatan bersama antara warga dengan perancang. Hasil desain yang dibuat arsitek bukan merupakan keputusan akhir, warga dapat mengembangkan desain sesuai dengan ide dan gagasan mereka.

Tingkat partisipasi warga secara aktif ditunjukkan pada tahap pelaksanaan rekonstruksi. Pada tahap ini peran warga selain sebagai pelaksana, warga juga berperan sebagai desainer ruang dalam bangunan. Pada tahap pelaksanaan tersebut, warga dapat mengembangkan desain bangunan awal sesuai dengan keinginan mereka. Tingkat partisipasi warga pada proses rekonstruksi akan ditunjukkan pada tabel (tabel 4.3) berikut ini.

Tabel 4.3 Tingkat Partisipasi Warga dalam Proses Rekonstruksi

Tahap Perancangan	Tahap Perencanaan	Tahap Pelaksanaan
Pada tahap perancangan, peran yang terbesar dilakukan oleh arsitek. Pada tahap ini peran yang menonjol adalah peran ketua RT. Meskipun segala keputusan diserahkan kepada warga, namun dalam kegiatan diskusi warga tidak berperan terlalu aktif.	Pada tahap ini warga bersama arsitek merencanakan proses rekonstruksi dan strategi pelaksanaan. Strategi perencanaan yang dihasilkan antara lain perencanaan biaya bangunan yang minimum.	Pada tahap pelaksanaan, partisipasi warga tinggi, warga berperan sebagai pelaksana dan juga desainer ruang dalam. Setiap warga memiliki kebebasan untuk mengembangkan desain awal sesuai dengan keinginan dan pemikiran mereka.
Tingkat partisipasi sedang	Tingkat partisipasi sedang	Tingkat partisipasi tinggi

C. Faktor Budaya Masyarakat Ngibikan pada Penerapan Pendekatan Partisipatorik

Salah faktor yang berpengaruh pada keberhasilan penerapan pendekatan partisipatorik di Ngibikan adalah faktor budaya masyarakat. Warga Ngibikan memiliki budaya hidup sederhana dan apa adanya. Ketika warga ditimpa musibah bencana gempa yang telah menghancurkan rumah mereka, mereka tidak berputus asa dan bersama-sama berusaha untuk membangun kembali lingkungan mereka, selain itu warga juga memiliki rasa kegotongroyongan dan kekeluargaan yang tinggi sehingga mereka dapat dengan mudah bekerja sama untuk membangun kembali rumah mereka. Sikap kegotongroyongan tersebut tidak hilang ketika mereka ditimpa oleh bencana gempa bumi yang menghancurkan rumah dan kampung mereka. Justru sikap kegotongroyongan tersebut semakin kuat. Proses rekonstruksi rumah tinggal mereka, juga dikerjakan secara bergotong royong. Karena kuatnya sikap kegotongroyongan tersebut proses rekonstruksi rumah warga juga dapat berjalan dengan cepat.

Faktor budaya atau kebiasaan masyarakat berpengaruh besar terhadap penerapan pendekatan partisipatorik pada proses rekonstruksi dusun Ngibikan, karena kebiasaan atau budaya yang berbeda juga akan berpengaruh pada berhasil atau tidaknya sebuah pendekatan partisipatorik dilakukan. Hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan penerapan pendekatan partisipatorik di Ngibikan, antara lain :

1. Warga Ngibikan yang memiliki keinginan kuat untuk membangun kembali permukiman mereka. Warga Ngibikan terbuka terhadap saran dan masukan dari pihak luar.
2. Warga memiliki prinsip hidup yang sederhana
3. Kegotongroyongan di antara warga Ngibikan masih sangat kuat
4. Peran pemimpin yang baik yang mampu mengarahkan warga pada proses rekonstruksi (proses diskusi dan pengambilan keputusan) dan selalu menjadi motivator bagi warga untuk membangun kembali lingkungannya
5. Warga tidak mendahulukan keinginan dan kepentingan masing-masing

Posisi pemimpin dalam masyarakat cukup kuat. Warga memiliki rasa hormat dan patuh yang cukup tinggi kepada pemimpin. Ketika proses rekonstruksi dilaksanakan, tokoh masyarakat (ketua RT) dapat dengan mudah dalam mengarahkan pekerjaan. Hal tersebut juga menjadi salah satu kunci yang menyebabkan pekerjaan rekonstruksi berlangsung dengan cepat.

Untuk menghormati kebudayaan dan tradisi masyarakat setempat dilakukan selamatan (upacara) menaikkan bubungan dengan cara meletakkan bendera dan hasil pertanian/perkebunan di atas bubungan rumah yang akan dibangun, dengan dilaksanakan upacara tersebut diharapkan masyarakat tetap terjaga tradisinya dan lebih meningkatkan kebersamaan diantara warga.



Gambar 4.3 Salah satu tradisi masyarakat “selamatan menaikkan bubungan”
Sumber : Prawoto, 2006

4.1.5. Prinsip Partisipasi pada Rekonstruksi Dusun Ngibikan

Dari penjelasan mengenai tingkat partisipasi masyarakat dan pengaruh kebudayaan masyarakat Ngibikan terhadap penerapan pendekatan partisipatori maka dapat disimpulkan prinsip partisipasi pada proses rekonstruksi dusun Ngibikan sebagai berikut:

1. Perencanaan rekonstruksi yang dilakukan disesuaikan dengan kemampuan warga, budaya atau kebiasaan warga juga berpengaruh terhadap jalannya proses rekonstruksi. Keputusan perancangan, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai dengan keputusan warga.
2. Pada proses rekonstruksi, arsitek tidak memiliki wewenang untuk mengatur maupun menentukan keputusan. Segala keputusan diserahkan sepenuhnya kepada warga, arsitek hanya memberikan saran dan gagasan ide yang diserahkan kepada warga (pengguna) untuk dipertimbangkan
3. Arsitek menawarkan gagasan desain kepada warga, warga berdiskusi untuk mengambil keputusan, hasil keputusan akan menjadi acuan arsitek untuk

mendesain. Hasil desain yang dibuat bersifat fleksibel sehingga warga (pengguna) dapat mengembangkannya sesuai dengan keinginan mereka

4. Warga berkumpul bersama untuk mendiskusikan setiap rencana maupun keputusan yang akan diambil
5. Produk desain yang dihasilkan berupa konstruksi (rangka bangunan) dan pengolahan atau pengembangannya diserahkan sepenuhnya pada warga (pengguna)

4.1.6. Metode Partisipatorik di Ngibikan

Rekonstruksi metode partisipatorik di Ngibikan terdiri atas perencanaan strategi, dan perencanaan tindakan.

A. Rekonstruksi Perencanaan Strategi

Perencanaan strategi pada pelaksanaan rekonstruksi dusun ngibikan terdiri atas strategi pembiayaan, strategi penyediaan material, penyediaan tenaga kerja dan strategi pelaksanaan. Perencanaan strategi pada rekonstruksi Ngibikan ditunjukkan dalam tabel (tabel 4.4) berikut ini.

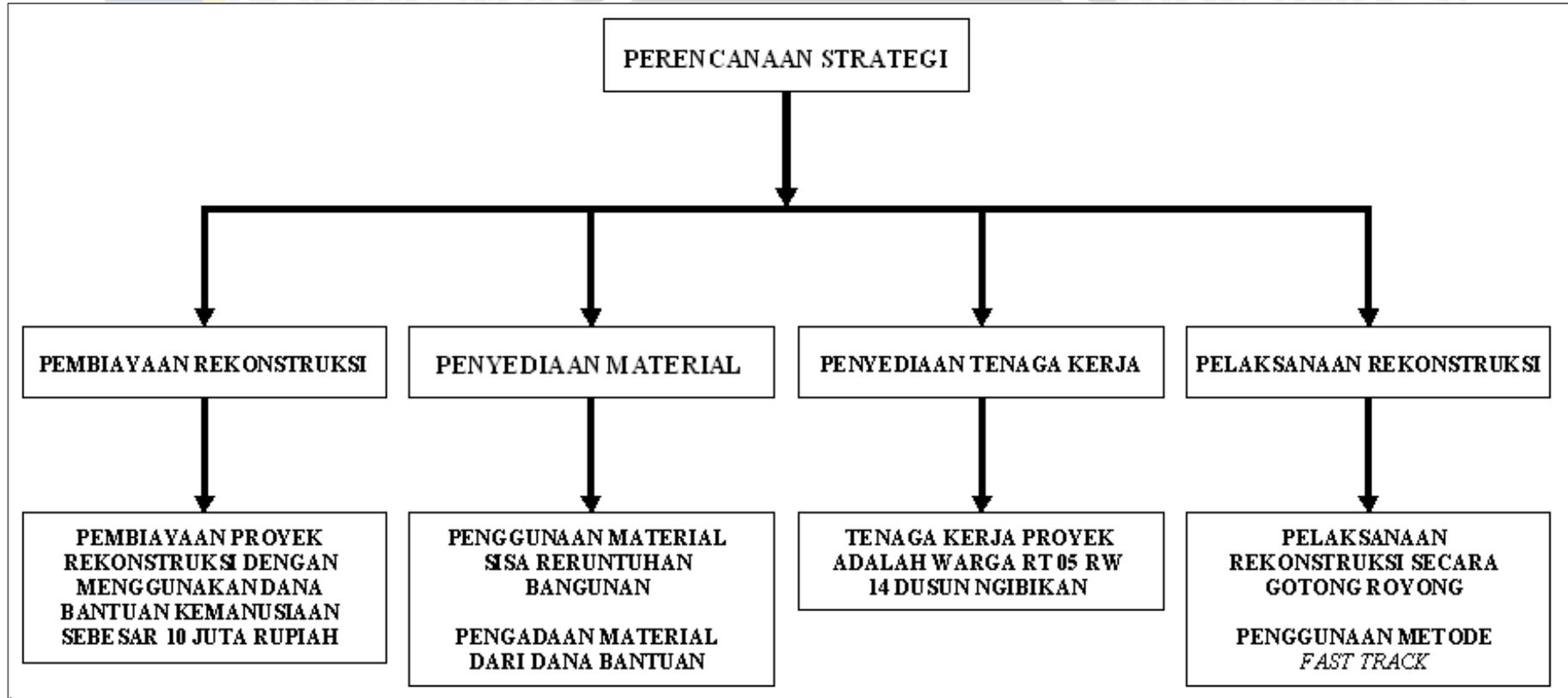
Tabel 4.4 Perencanaan Strategi

No.	Permasalahan	Strategi	Kondisi di Lapangan
1.	Pembiayaan Rekonstruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan rekonstruksi direncanakan dari anggaran bantuan yang akan didapatkan warga. Anggaran pembiayaan dibuat minimum yaitu sepuluh juta rupiah dengan luasan yang memadai seluas satu limasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran bantuan yang akan diberikan oleh pihak pemerintah berkisar antara 10 - 30 juta rupiah (kondisi awal yang dijadikan alasan perencanaan pembiayaan) • Warga terlebih dahulu mendapatkan bantuan dari pihak non pemerintah sebesar 10 juta rupiah
2.	Penyediaan Material	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan material sisa reruntuhan rumah yang masih dapat digunakan sebagai bahan material 	<ul style="list-style-type: none"> • Hampir seluruh bangunan rumah baru menggunakan material kusen, pintu, dan jendela dari sisa rumah

-
- | | | |
|-----------------------------|--|--|
| | rumah yang baru, langkah untuk menekan biaya. | lama |
| | <ul style="list-style-type: none">• Dana bantuan yang didapat oleh warga, diberikan dalam bentuk material bangunan yang disesuaikan dengan anggaran kebutuhan bahan setiap rumah. Pengelolaan dana dilakukan oleh tim perancang. | <ul style="list-style-type: none">• Bahan material yang didapat dari dana bantuan berupa glass-fiber reinforced cemen (GRC) untuk bahan dinding. Bahan non-asbestos fiber cement untuk bahan atap dan juga semen |
| 3. Penyediaan Tenaga Kerja | <ul style="list-style-type: none">• Tenaga kerja berasal dari warga | <ul style="list-style-type: none">• Semua warga bekerja, laki-laki membangun rumah dan para perempuan bekerja di dapur umum untuk menyediakan konsumsi |
| 4. Pelaksanaan rekonstruksi | <ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan rekonstruksi dilaksanakan dengan cara bergotong royong. | <ul style="list-style-type: none">• Penggunaan metode gotong royong awalnya kurang berhasil karena jumlah pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah pekerja. Tenaga kerja yang banyak namun pekerjaan sedikit, sehingga proses pekerjaan tidak efektif |
| | <ul style="list-style-type: none">• Penggunaan metode <i>fast track</i> dengan membagi warga dalam kelompok-kelompok kerja | <ul style="list-style-type: none">• Pembagian warga dalam kelompok-kelompok kerja mempercepat waktu pengerjaan bangunan |
-

Seperti uraian dalam tabel 4.4 bahwa perencanaan strategi pada proses rekonstruksi dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu pembiayaan rekonstruksi, penyediaan material, penyediaan tenaga kerja dan pelaksanaan (tahap pembangunan). Dari uraian tersebut dapat disederhanakan dalam bentuk diagram seperti yang ditunjukkan dalam gambar (gambar 4.4) berikut ini.





Gambar 4.4 Diagram Perencanaan Strategi

B. Rekonstruksi Perencanaan Tindakan (Action Planning)

Pada setiap kegiatan biasanya diawali dengan perencanaan rencana tindakan. Perencanaan tindakan membantu memfokuskan kegiatan yang akan dilakukan. Pada proses rekonstruksi dusun Ngibikan perencanaan tindakan (kegiatan) dilakukan secara tidak terstruktur, dalam hal ini artinya bahwa kegiatan yang dilakukan berlangsung secara alami dan tanpa perencanaan yang mendetail sebelumnya. Tahapan perencanaan pada proses rekonstruksi dusun Ngibikan akan ditunjukkan pada tabel (tabel 4.5) berikut ini :

Tabel 4.5 Tahapan Perencanaan

Tahap Perencanaan	Uraian
Lokasi Rekonstruksi	: area rekonstruksi berada di dusun Ngibikan RT 05 RW 14 desa Canden
Tujuan Utama	: Warga RT 05 RW 14 dusun Ngibikan dapat membangun kembali rumahnya yang roboh akibat gempa Yogyakarta pada 27 Mei 2006
Sasaran	: Kegiatan rekonstruksi tersebut ditujukan untuk warga masyarakat dusun Ngibikan RT 05 RW 14 yang kehilangan rumah pada saat gempa Yogyakarta
Strategi	: Penggunaan material bekas untuk menekan biaya pembangunan : Pelaksanaan rekonstruksi dilakukan dengan cara gotong royong : Metode fast track dengan membagi masyarakat dalam kelompok-kelompok kerja yang diketuai satu orang sebagai kepala pekerja : Perencanaan dan perancangan dengan melibatkan partisipasi masyarakat : Pengolahan dana bantuan dengan pemberian bantuan berupa bahan bangunan

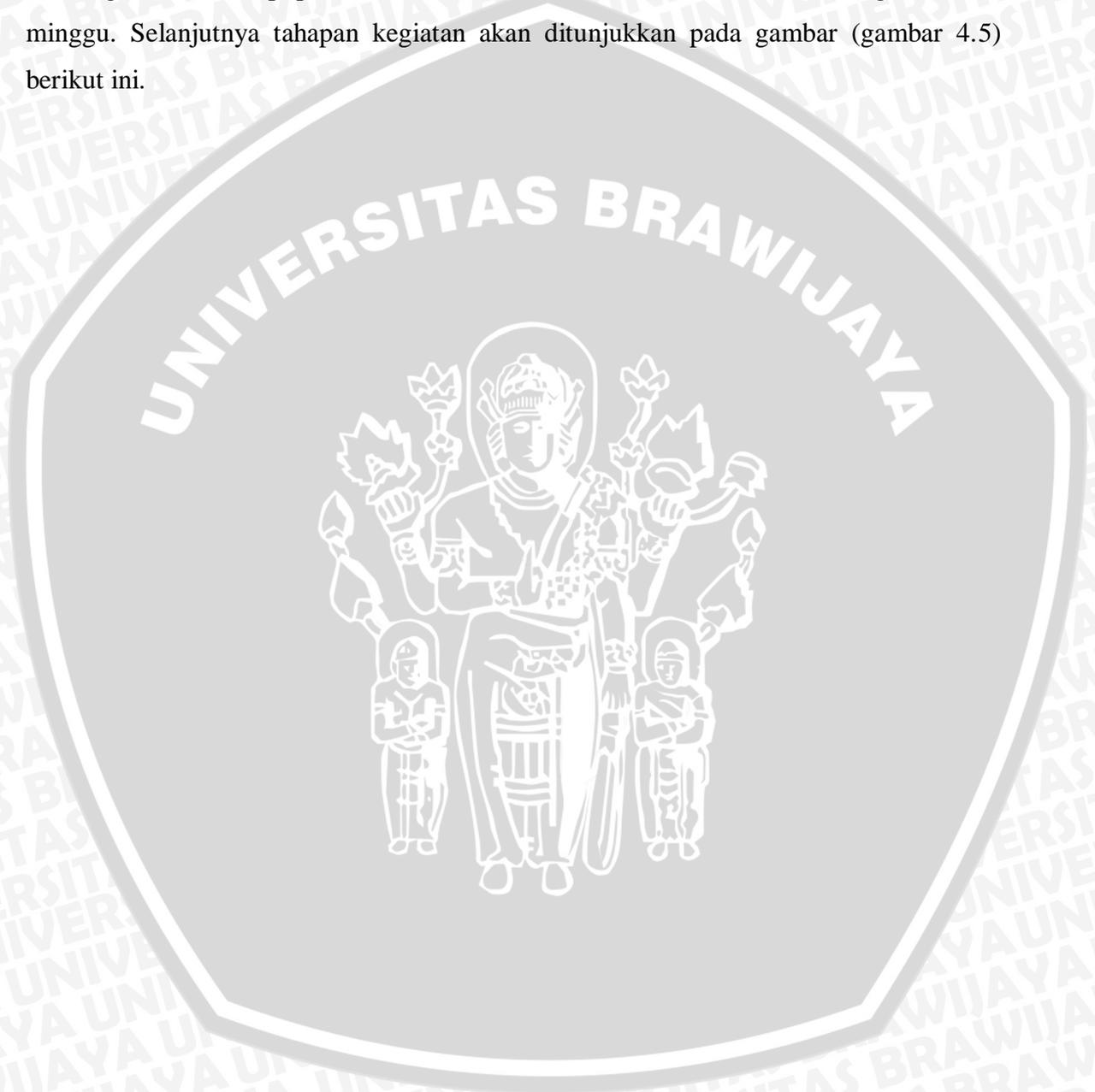
Pada tabel 4.6 berikut ini akan ditunjukkan rekonstruksi perencanaan tindakan (action planning) kegiatan yang dilakukan pada proses rekonstruksi (pembangunan kembali) dusun Ngibikan.

Tabel 4.6 *Action Plan* (Perencanaan Tindakan)

	Tahap Perancangan dan Perencanaan (< 2 minggu)	Tahap Pelaksanaan (3 bulan)
Gol	Warga RT 05 RW 14 dusun Ngibikan dapat membangun kembali rumahnya yang roboh akibat gempa Yogyakarta pada 27 Mei 2006	
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> Menemukan solusi terbaik untuk membangun kembali rumah-rumah yang telah hancur pasca-gempa 	<ul style="list-style-type: none"> Terbangunya kembali rumah warga 05 RW 14 dusun Ngibikan yang roboh akibat gempa
Pencapaian / Hasil (Output)	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan rekonstruksi dengan metode kegotongroyongan Pembiayaan mandiri melalui penggunaan material-material bangunan sisa dari reruntuhan rumah warga Pembiayaan rekonstruksi dengan biaya minimum disesuaikan dengan jumlah anggaran bantuan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pembangunan kembali 65 rumah warga dilaksanakan dalam waktu tiga bulan
Aktivitas	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi antara warga dengan arsitek untuk memutuskan rencana rekonstruksi Diskusi warga dengan tokoh masyarakat untuk pengambilan keputusan desain yang ditawarkan oleh arsitek. Warga mengumpulkan material sisa reruntuhan yang dapat dipakai kembali untuk menekan pembiayaan rekonstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pembangunan oleh warga dengan cara gotong royong

Indikator	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat perbedaan pendapat yang signifikan antara individu satu dengan individu lainnya dalam diskusi • Warga mampu bekerja sama dengan mudah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan metode fast track dengan cara membagi warga dalam beberapa kelompok kerja.
Minat Lokal Individu	<ul style="list-style-type: none"> • Perhatian yang besar untuk membangun kembali lingkungan mereka • Merencanakan tindakan untuk rekonstruksi rumah 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan proses rekonstruksi dengan cara bergotong royong.
Tim Pengarah Tim Arsitek	<ul style="list-style-type: none"> • Mengeksplorasi pilihan-pilihan / potensi-potensi untuk tindakan rekonstruksi • Merencanakan rencana pembiayaan untuk proses rekonstruksi • Memberikan saran desain kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengolah bantuan dana bagi masyarakat, dana bantuan diberikan berupa bahan material bangunan • Mendampingi masyarakat pada proses pelaksanaan rekonstruksi
Badan Pendukung Penyokong Dana	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi mengenai rencana bantuan kepada tim arsitek • Mengadakan survei ke lokasi rekonstruksi • Memberikan persetujuan atas pemberian bantuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan bantuan dana yang ditujukan untuk pembangunan 65 rumah warga

Dari uraian pada tabel 4.6 ditunjukkan bahwa perencanaan tindakan terdiri atas gol, tujuan, hasil, aktivitas dan indikator. Kelima hal tersebut di kelompokkan menjadi tahap perencanaan/perancangan dan tahap pelaksanaan. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan tindakan lebih banyak terkonsentrasi pada tahap perencanaan walaupun dari segi waktu tahap perencanaan dilakukan dalam kurun waktu kurang dari dua minggu. Selanjutnya tahapan kegiatan akan ditunjukkan pada gambar (gambar 4.5) berikut ini.



PELAKU	TAHAP KEGIATAN	FUNGSI	KEGIATAN
ARSITEK	TAHAP PERANCANGAN/PERENCANAAN	Fasilitator perancangan (konsultan)	<ul style="list-style-type: none"> Mengeksplorasi pilihan-pilihan / potensi-potensi untuk tindakan rekonstruksi, Memberikan gagasan desain kepada masyarakat
	TAHAP PELAKSANAAN	Pendamping	<ul style="list-style-type: none"> Mengolah bantuan dana bagi masyarakat, dana bantuan diberikan berupa bahan material bangunan Mendampingi masyarakat pada proses pelaksanaan rekonstruksi
PENDONOR DANA	TAHAP PERANCANGAN/PERENCANAAN	Donor dana rekonstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan informasi mengenai rencana bantuan kepada tim arsitek Mengadakan survei ke lokasi rekonstruksi Memberikan persetujuan atas pemberian bantuan
	TAHAP PELAKSANAAN	Donor dana rekonstruksi	Memberikan bantuan dana yang ditujukan untuk pembangunan 65 rumah warga
WARGA NGIBIKAN	TAHAP PERANCANGAN/PERENCANAAN	Pengambil keputusan desain	<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan tindakan untuk rekonstruksi bangunan bersama arsitek Mengumpulkan material sisa reruntuhan yang dapat dipakai kembali untuk menekan pembiayaan rekonstruksi
	TAHAP PELAKSANAAN	Tim Pelaksana pembangunan dan desainer ruang dalam serta tampilan bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan proses rekonstruksi dengan cara bergotong royong
PEMIMPIN FORMAL	TAHAP PERANCANGAN/PERENCANAAN	Pemberi saran, pemimpin diskusi kelompok, pengambil keputusan desain	<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan tindakan untuk rekonstruksi bangunan bersama arsitek Mengumpulkan material sisa reruntuhan yang dapat dipakai kembali untuk menekan pembiayaan rekonstruksi
	TAHAP PELAKSANAAN	Koordinator lapangan	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan proses rekonstruksi dengan cara bergotong royong Memberikan pengarahan kerja kepada warga

Gambar 4.5 Tahap Kegiatan

Dari gambar 4.5 dapat disimpulkan bahwa fungsi yang diperankan terbanyak pada tahap perancangan/perencanaan adalah fungsi yang diperankan oleh pemimpin formal dan arsitek. Sedangkan pada tahap pelaksanaan fungsi yang diperankan terbanyak adalah fungsi yang diperankan oleh masyarakat dan pemimpin formal.

4.1.7. Konsensus

Konsensus adalah sebuah kesepakatan bersama yang didapatkan melalui proses diskusi oleh masyarakat. Beberapa konsensus yang dihasilkan oleh masyarakat pada proses rekonstruksi dusun Ngibikan antara lain :

1. Konsensus pendanaan : pembagian dana bantuan per KK, kesepakatan diprakarsai oleh ketua RT
2. Konsensus pelaksanaan : pembangunan awal rumah dilakukan dengan membangun beberapa (2-3) rumah yang berada di dekat rumah pemimpin, kesepakatan diambil untuk mempermudah koordinasi awal
3. Konsensus perencanaan : penggunaan material kayu sebagai konstruksi, kesepakatan diambil berdasarkan kemudahan pengerjaan dan potensi alam wilayah Ngibikan
4. Konsensus perencanaan : penggunaan material non-asbestos (pengganti genting) kesepakatan berdasarkan mudahnya pemasangan, tidak banyak menggunakan kayu dan keinginan masyarakat
5. Konsensus pelaksanaan : penggabungan dua hingga tiga rumah, diprakarsai oleh ketua RT

4.1.8. Manajemen Rekonstruksi

Pada proses rekonstruksi dusun Ngibikan terdapat pihak-pihak yang terkait pada proses perencanaan hingga proses pelaksanaan. Pihak-pihak tersebut antara lain pemilik proyek, badan pendukung, tim perencana, tim pendamping, dan tim pelaksana. Pada proyek rekonstruksi ini, pemilik proyek adalah seluruh warga yang akan menempati rumah tinggal yang baru. Badan pendukung pada proyek ini adalah penyokong dana yang menanggung pembiayaan proyek sehingga proyek dapat berlangsung. Tim perencana terdiri dari arsitek dan warga, tim pendamping yang mendampingi di

lapangan selama proses pelaksanaan adalah tim arsitek, dan tim pelaksana adalah seluruh warga. Struktur organisasi dapat digambarkan seperti yang ditunjukkan pada gambar (gambar 4.6) berikut ini.



Gambar 4.6 Struktur Organisasi Proyek Rekonstruksi Dusun Ngibikan

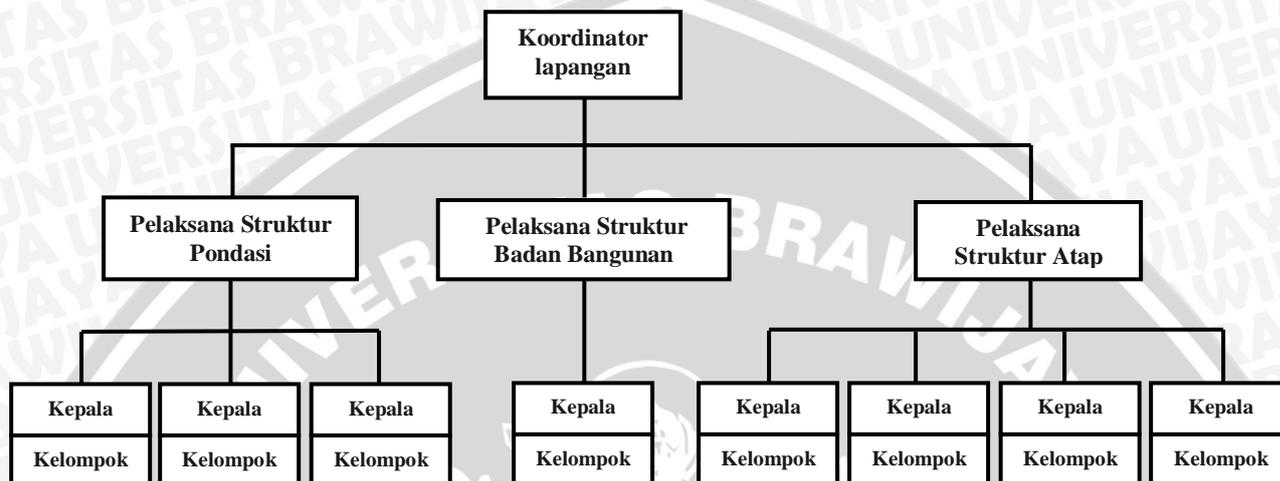
A. Jadwal Kegiatan Rekonstruksi

Perencanaan pembangunan dirumah pada proses rekonstruksi ini direncanakan selesai dalam waktu secepat-cepatnya. Proses pelaksanaan rekonstruksi berlangsung selama tiga bulan. Jumlah rumah yang dibangun kembali adalah 65 buah rumah. Proses pelaksanaan pembangunan dimulai pada bulan Juni dan berakhir pada bulan September. Pelaksanaan rekonstruksi dilakukan dengan cara bergotong royong. Pekerjaan rekonstruksi dilaksanakan oleh seluruh warga. Para lelaki bekerja membangun rumah dan para wanita bekerja di dapur umum untuk menyediakan konsumsi pada saat pembangunan.

Agar dapat mempersingkat waktu pembangunan rumah dilakukan dengan metode *fast track*, dimana para pekerja dikelompok-kelompokkan dan paket pekerjaan dibagi berdasarkan kelompok keahlian. Proses pelaksanaan rekonstruksi menghabiskan waktu yang cepat, yaitu tiga bulan untuk membangun 65 rumah warga. Jadwal pelaksanaan rekonstruksi ditunjukkan pada tabel (tabel 4.7) berikut ini :

B. Pelaksanaan Proses Rekonstruksi dan Tenaga Kerja

Pelaksanaan rekonstruksi dusun Ngibikan dilakukan dengan cara bergotong royong. Ketua RT yaitu Maryono bertindak sebagai koordinator lapangan dan warga dibagi dalam kelompok-kelompok pekerja sesuai bidang keahlian. Organisasi pelaksanaan rekonstruksi akan ditunjukkan pada gambar (gambar 4.7) berikut ini.



Gambar 4.7 Organisasi Pelaksanaan Proyek

Penerapan Metode *Fast Track*

Pekerjaan yang dilakukan secara gotong royong harusnya dapat dengan cepat selesai, namun kenyataannya jumlah pekerja dan pekerjaan tidak sebanding. Sehingga banyak tenaga kerja yang menganggur dan pekerjaan menjadi tidak efektif. Selama dua minggu awal pelaksanaan pembangunan berjalan lambat, dari jumlah warga yang hadir tidak semuanya melakukan pekerjaan. Banyaknya tenaga kerja tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan, sehingga banyak warga yang menganggur. Pelaksanaan pembangunan satu rumah menghabiskan waktu yang begitu lama. Kemudian sistem pekerjaan diubah. Maryono (ketua RT) yang juga berperan sebagai pengarah pekerjaan (koordinator pelaksana) menerapkan suatu metode agar pekerjaan dapat berjalan dengan cepat. Maryono membagi warga dalam beberapa kelompok sesuai dengan keahlian mereka, kemudian membuat list daftar kelompok pekerja dan warga bebas memilih untuk masuk ke dalam kelompok pekerja tersebut. Cara kerja dari metode pekerjaan tersebut contohnya adalah tukang kayu selesai mengerjakan kuda-kuda dan kolom dari satu rumah maka mereka akan berpindah ke rumah lainnya, kemudian pekerjaan dilanjutkan oleh pekerja yang bertugas mendirikan kuda-kuda, lalu pekerjaan diteruskan oleh tukang batu (pekerjaan dinding) begitu seterusnya hingga rumah benar-

benar selesai. Pembagian paket pekerjaan akan ditunjukkan pada tabel (tabel 4.8) berikut ini.

Tabel 4.8 Pembagian Paket Pekerjaan

No.	Pekerjaan Struktur	Paket Pekerjaan	Kelompok Pelaksana
1.	Struktur Pondasi	Membuat umpak	1 kelompok pelaksana
		Menyetel umpak	1 kelompok pelaksana
		Set pondasi	1 kelompok pelaksana
2.	Struktur Badan Bangunan	Mendirikan rangka dan kuda-kuda	1 kelompok pelaksana
3.	Struktur Atap	Mengamplas kayu	1 kelompok pelaksana
		Membuat kuda-kuda	1 kelompok pelaksana
		Menyambung gording	1 kelompok pelaksana
		Memasang gording dan asbes	1 kelompok pelaksana

Dari tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dalam proses pelaksanaan terdapat delapan kelompok pekerja struktur. Masing-masing kelompok dibagi berdasarkan bidang kemampuan (keahlian).

Beberapa gambar proses rekonstruksi rumah warga pasca-gempa akan diperlihatkan pada gambar – berikut ini :



Gambar 4.8 Pekerjaan Pembersian Lahan
Sumber : Prawoto2006



Gambar 4.9 Pekerjaan pembuatan umpak dan pemasangan pondasi
Sumber : Prawoto2006



Gambar 4.10 Pekerjaan Kuda-kuda
Sumber : Prawoto 2006



Gambar 4.11 Menaikkan Kuda-kuda
Sumber : Prawoto 2006



Gambar 4.12 Pekerjaan Pemasangan Atap
Sumber : Prawoto 2006

C. Pembiayaan Rekonstruksi

Terdapat dua sumber pembiayaan pada proses rekonstruksi rumah warga RT 05 RW 14 di dusun Ngibikan. Yang pertama pembiayaan proyek dilakukan dengan cara mengumpulkan kembali material bangunan yang masih dapat digunakan dari reruntuhan rumah pasca gempa. Dengan cara tersebut warga dapat menekan biaya pembangunan agar tidak membengkak. Yang kedua sumber pembiayaan berasal dari Bantuan pihak non-pemerintah sebesar 10 juta rupiah per KK. Dana bantuan tidak diberikan langsung

kepada warga berupa berupa uang. Namun dengan bantuan dari studio kerja Arsitek pengolahan bantuan diberikan berupa bahan bangunan untuk membangun setiap rumah.

Jumlah besarnya dana bantuan sesuai dengan anggaran yang direncanakan antara arsitek dan warga dengan menentukan biaya minimum untuk membangun rumah seluas ukuran satu limas an. Jumlah dana bantuan yang didapatkan warga per KK sama besar, karena besaran rumah yang dibangun untuk seluruh warga sama. Kegiatan pembiayaan dengan cara mengumpulkan kembali material sisa reruntuhan dan bantuan material dari dana bantuan ditunjukkan pada gambar (gambar 4.13 dan 4.14) berikut ini.



Gambar 4.13 Material batu bata dari reruntuhan bangunan dikumpulkan untuk digunakan kembali
Sumber : dok. Prawoto 2006



Gambar 4.14 Material bangunan yang berasal dari dana bantuan
Sumber : dok. Prawoto 2006

4.1.9. Skematik Desain

Beberapa daerah di Yogyakarta banyak yang mengalami kerusakan. Terdapat pula daerah yang tanahnya turun hingga dua meter. Daerah dengan kondisi parah tersebut menyebabkan penduduknya direlokasi ke daerah lain yang lebih aman. Bentuk rekonstruksi di Ngibikan tidak bersifat relokasi, karena meskipun banyak kerusakan bangunan namun keadaan lingkungan masih dapat ditempati lagi. Rekonstruksi tersebut berada di lingkungan yang sama, sehingga masyarakat tidak perlu lagi melakukan

penyesuaian diri. Setiap bangunan rumah dibangun kembali di atas tanah masing-masing pemilik rumah sama dengan letak dari rumah yang lama. Blok plan RT 05 RW 14 sebelum dan pasca rekonstruksi akan ditunjukkan pada gambar (gambar 4.15) berikut ini.



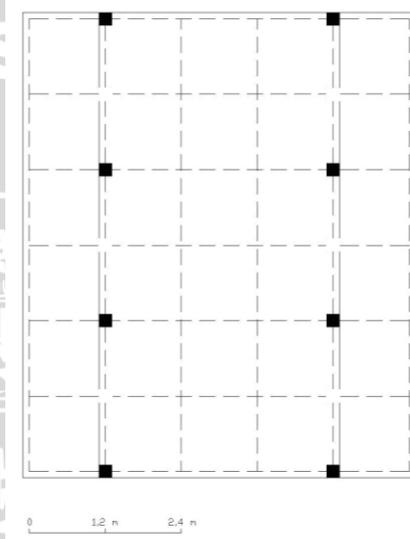
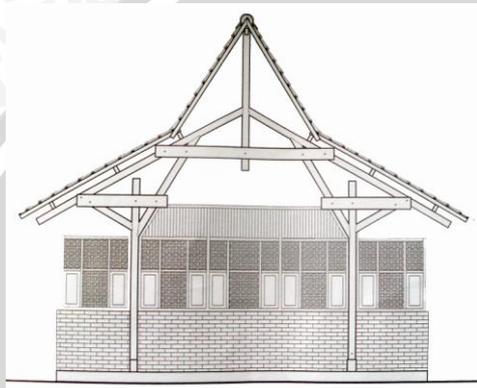
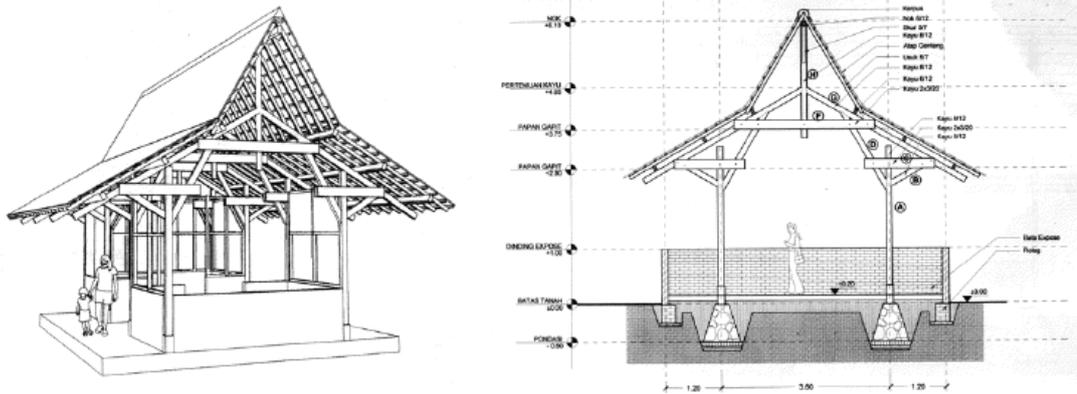
Gambar 4.15 *Blook Plan* (atas) sebelum gempa dan (bawah) setelah rekonstruksi
Sumber : www.akdn.org

Desain yang dibuat adalah desain bangunan rumah tahan gempa. Konstruksi yang digunakan merupakan konstruksi kuda-kuda sederhana. Konstruksi tersebut dapat dengan mudah dibuat dan proses pengerjaannya cukup cepat. Sambungan kuda-kuda yang digunakan adalah sambungan paku. Bentang kuda-kuda empat meter. Kuda-kuda dirangkai menjadi satu dengan rangka bangunan. Setiap rumah memiliki empat buah kuda-kuda yang berjarak 2,4 m.

Desain yang dibuat adalah desain rumah yang familiar dengan warga. Sehingga warga dengan mudah dapat mengembangkannya. Material bangunan yang digunakan juga dapat dengan mudah dipasang. Rumah yang didesain menggunakan dinding bata setinggi satu meter. Pondasi yang digunakan berupa pondasi umpak. Bahan dinding atas menggunakan GRC dan atapnya menggunakan bahan *non-asbestos fiber cement*.

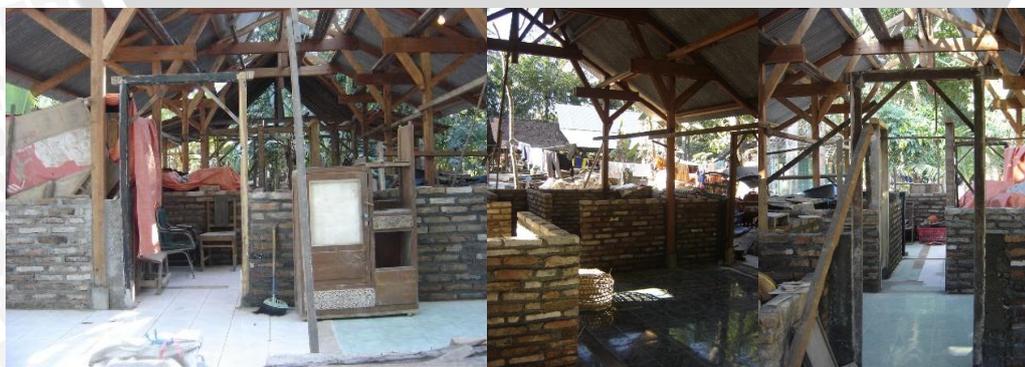
4.1.10. Produk Desain dari Pendekatan Partisiparorik

Produk desain dari metode *participatory design* tersebut merupakan rumah dengan luasan 6 x 7,2 m² kurang lebih satu ukuran limasan. Desain rumah menggunakan kerangka kayu sebagai konstruksinya. Jumlah dari kuda-kuda pada setiap rumah ada empat buah kuda-kuda. Jarak antar kuda-kudanya sebesar 2,4 m. Bagian dinding rumah setinggi 1 m menggunakan dinding bata, dan selebihnya menggunakan bahan glass-fiber reinforced cemen (GRC). Bagian atap menggunakan dari bahan non-asbestos fiber cement. Gambar kerja awal yang dibuat oleh arsitek, bagian atap menggunakan atap genting, pemilihan atap dengan bahan dari non-asbestos fiber cement dikarenakan masyarakat masih trauma menggunakan genting, selain itu lebih praktis dan tidak memerlukan banyak kayu untuk reng. Produk rumah juga memanfaatkan material dari reruntuhan rumah yang masih dapat digunakan. Seperti kusen pintu dan jendela menggunakan kusen dari rumah lama yang masih dapat digunakan. Pada gambar (gambar 4.16) berikut ini akan ditunjukkan gambar kerja bangunan tahan gempa yang dihasilkan.



Gambar 4.16 Gambar kerja bangunan
Sumber : dok. Prawoto 2006

Setiap bangunan didirikan di atas tanah milik warga yang sama seperti saat sebelum gempa. Lantai bangunan yang digunakan juga merupakan lantai dari rumah yang sebelumnya roboh ketika gempa. Beberapa bangunan juga menggunakan pondasi dari bangunan lama. Sehingga posisi rumah warga pada saat sebelum dan saat dibangun kembali sesudah gempa sama, seperti yang ditunjukkan pada gambar (gambar 4.17 dan 4.18) berikut ini.

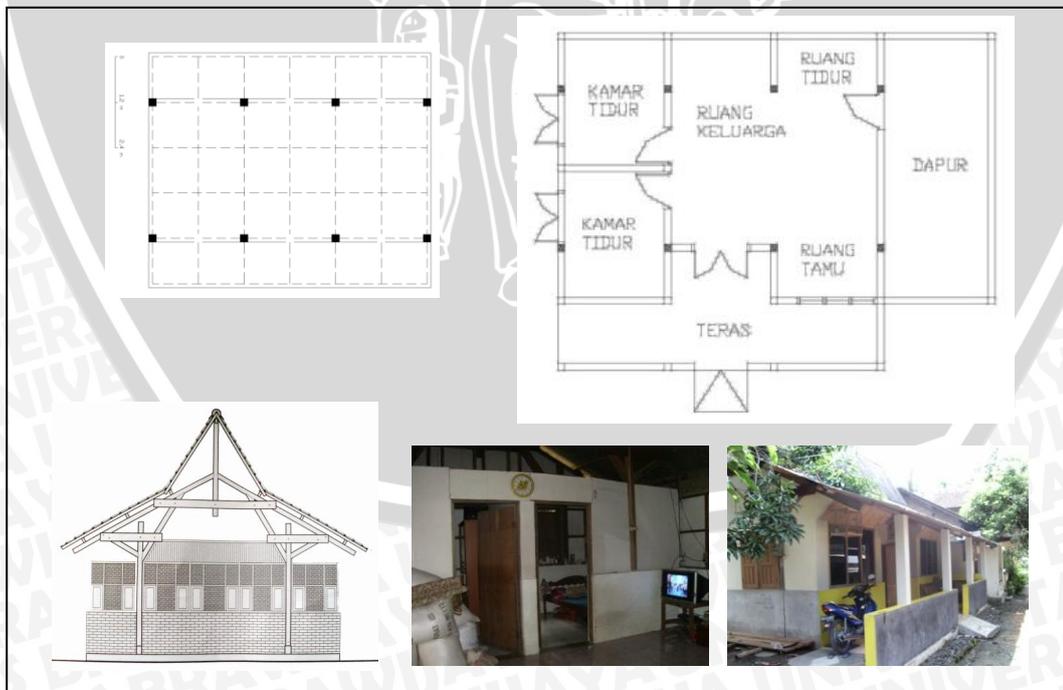


Gambar 4.17 Rumah-rumah dibangun di atas lantai rumah yang lama
Sumber : dok. Prawoto 2006

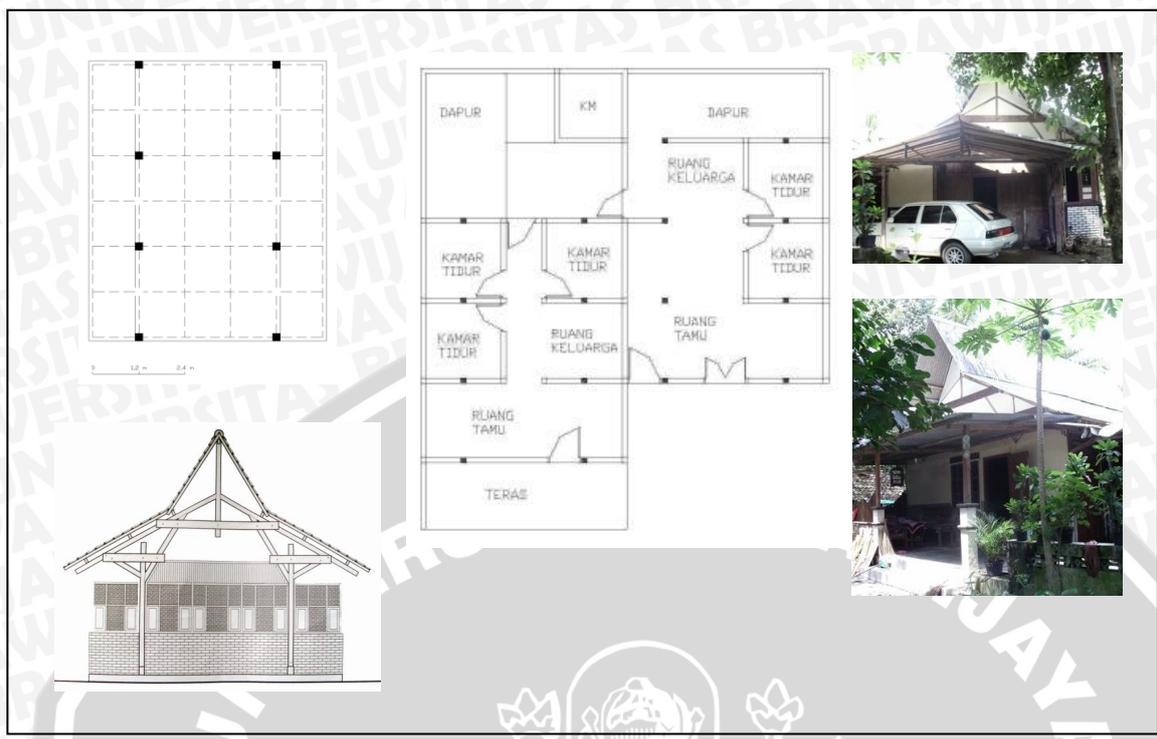


Gambar 4.18 Salah satu rumah warga RT 05 RW 14 pasca gempa
Sumber : Prawoto 2006

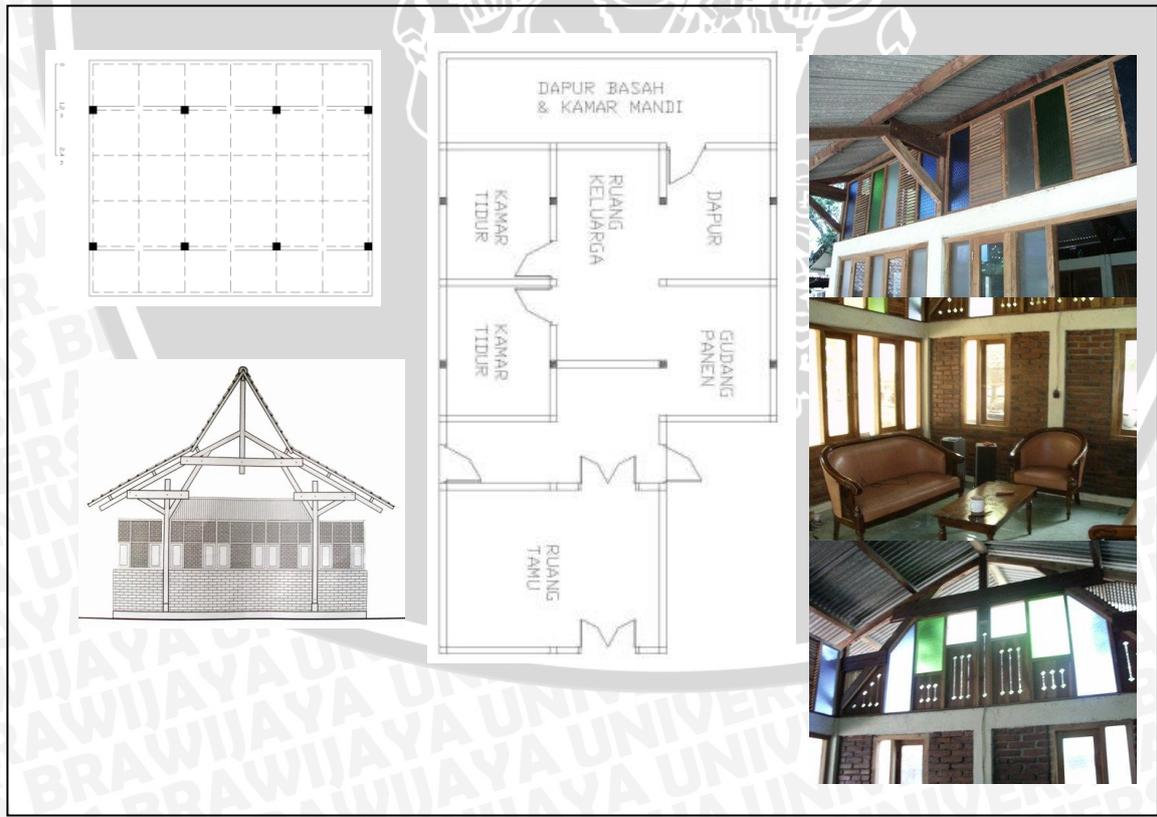
Pada proses desain rekonstruksi tersebut, arsitek hanya mendesain bagian kerangka bangunan. Sedangkan bagian dalam bangunan (pengaturan ruang dalam), pemilihan orientasi bangunan, dan juga perletakan pintu dan jendela seluruhnya ditentukan oleh pemilik rumah. Oleh karena itu hasil desain yang diterapkan menghasilkan produk rumah yang sangat beragam. Desain rumah juga fleksible untuk dikembangkan. Beberapa rumah warga bahkan telah ditambahkan bagian depan atau bagian sampingnya. Beberapa pengembangan rumah akan ditunjukkan pada gambar (gambar 4.19) berikut ini. Pengaturan desain sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Dari desain tersebut, tiga buah rumah dapat dirangkai menjadi satu. Bahkan terdapat rumah yang memanjang ke belakang. Hal tersebut merupakan keputusan antara tokoh masyarakat dan warga dengan mempertimbangkan jumlah keluarga.



(a)

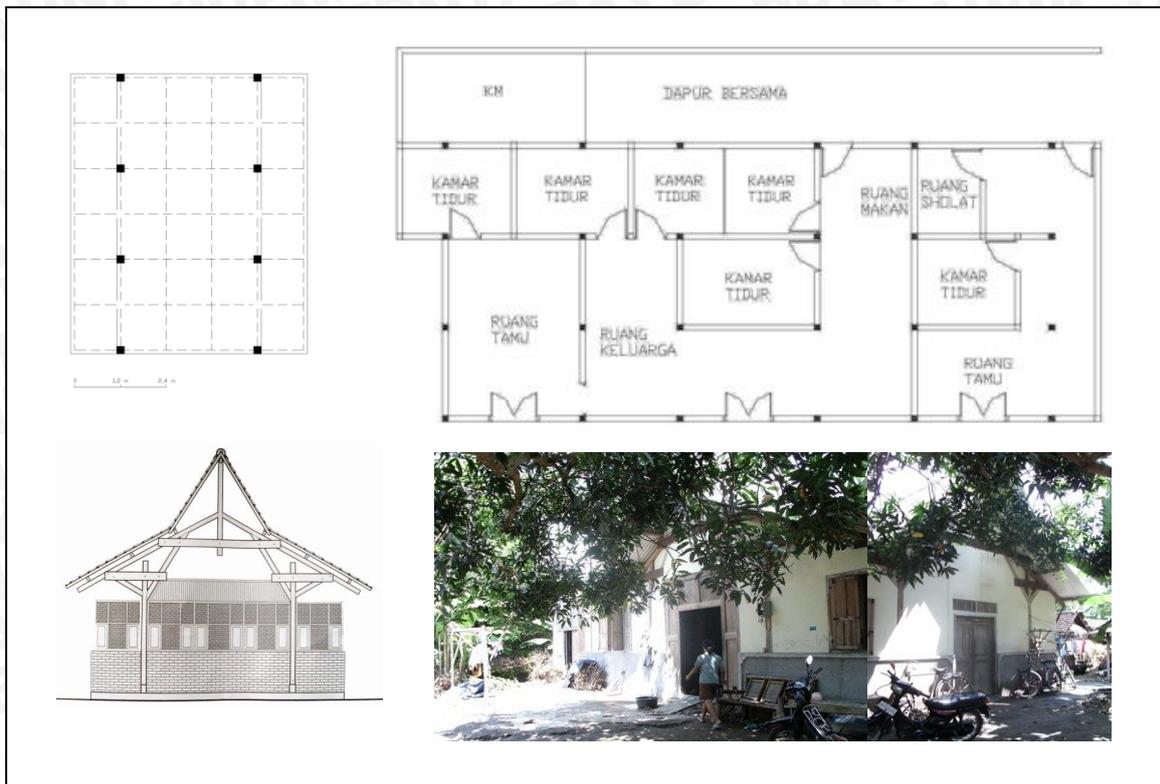


(b)

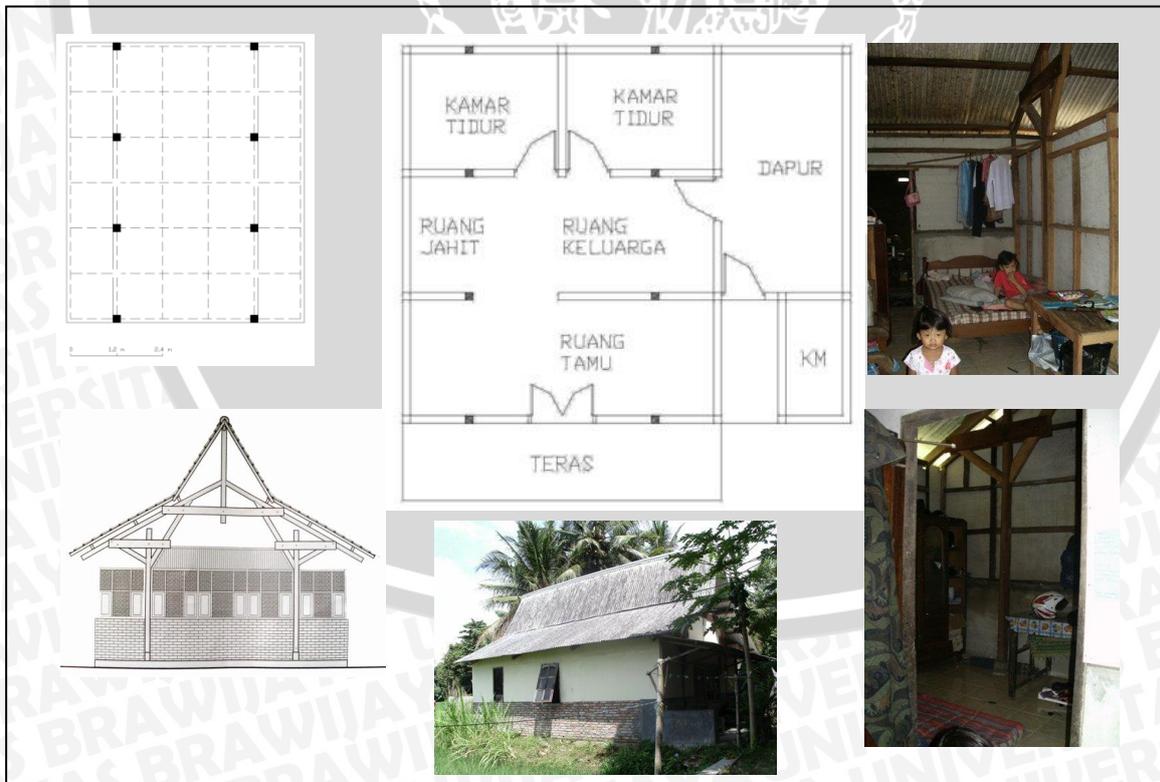


(c)





(d)



(e)

Gambar 4.19 (a-e) Pengembangan Desain Rumah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk hubungan antara arsitek, partisipan dan produk pada proses rekonstruksi dusun Ngibikan menunjukkan suatu bentuk pendekatan partisipatorik. Hal tersebut terlihat dari adanya keterlibatan langsung warga dalam proses perancangan hingga proses pelaksanaan, walaupun gagasan ide desain berasal dari arsitek, namun warga tetap memiliki kendali untuk memutuskan desain yang akan digunakan. Pendekatan partisipatorik juga ditunjukkan dengan adanya kesempatan sebesar-besarnya bagi warga untuk mengembangkan desain yang telah dihasilkan, bahkan warga berperan sebagai desainer ruang dalam (*inside desain*) dan desainer tampilan bangunan. Produk desain yang dihasilkan sangat fleksibel untuk dikembangkan kemudian hari oleh pemilik (penggunanya).

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk pendekatan partisipatorik yang dilakukan pada proses rekonstruksi dusun Ngibikan adalah kewenangan warga dalam pengambilan keputusan dan kesempatan sebesar-besarnya bagi warga untuk berpartisipasi pada pengembangan desain bangunan

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pendekatan Partisipatorik (*Participatory Design Approach*) ala Ngibikan

Pendekatan partisipatorik atau yang dikenal dengan *participatory design approach* adalah pendekatan desain yang melibatkan pengguna secara langsung dalam proses perencanaan maupun perancangan suatu bangunan atau lingkungan. *Participatory design* menunjukkan proses perancangan dimana stake-holders yang berbeda-beda, dilibatkan dalam proses perancangan untuk meningkatkan proses perancangan itu sendiri atau hasil dari proses perancangan (Granath, Lindahl, & Rehal, 1996).

Pada proses rekonstruksi dusun Ngibikan pendekatan partisipatorik ditunjukkan dengan adanya keterlibatan masyarakat selama proses rekonstruksi berlangsung. Warga Ngibikan dengan kesadaran diri dan tekad yang kuat berusaha untuk membangun kembali lingkungannya yang hancur akibat bencana gempa. Bersama-sama warga dengan dibantu oleh arsitek Eko Prawoto merencanakan proses rekonstruksi dusun. Kesetaraan dan keterbukaan antara arsitek dan pengguna (warga Ngibikan) sangat dijunjung tinggi, sehingga kerjasama yang baik dapat terjadi. Seluruh warga berpartisipasi selama proses rekonstruksi berlangsung. Proses partisipasi yang dilakukan oleh warga juga dapat dikatakan sebagai bentuk partisipasi yang spontan, perencanaan

rekonstruksi tidak dilaksanakan dengan terorganisir dan hanya dalam waktu yang sangat singkat. Kegiatan rekonstruksi yang dilaksanakan di Ngibikan berbeda dengan kegiatan rekonstruksi permukiman berbasis komunitas (RE-KOMPAK) seperti yang dilaksanakan di Aceh dan Nias. Kegiatan rekonstruksi berbasis komunitas di Aceh dan Nias juga melibatkan partisipasi masyarakat, namun dengan perencanaan yang terorganisir dan memiliki tahapan-tahapan pelaksanaan yang cukup panjang.

Menurut Sanoff (2000) partisipasi mungkin dilihat sebagai bentuk keterlibatan masyarakat secara langsung di dalam proses pengambilan keputusan. Seperti halnya pernyataan Sanoff tersebut, pada proses rekonstruksi dusun Ngibikan juga memperlihatkan bentuk keterlibatan warga secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang berkenaan dengan perencanaan maupun pelaksanaan rekonstruksi dimana setiap keputusan yang dihasilkan akan berpengaruh pada proses perancangan desain dan pelaksanaan rekonstruksi tersebut. Untuk memulai merancang desain bangunan, sang arsitek Eko Prawoto terlebih dahulu menawarkan gagasan kepada warga dan keputusan diserahkan sepenuhnya kepada warga, pada akhirnya dari proses tersebut arsitek hanya mendesain kerangka bangunan (konstruksi), dan pengembangan desain selanjutnya dilaksanakan oleh masyarakat. Desain yang dihasilkan merupakan desain yang disepakati bersama oleh warga.

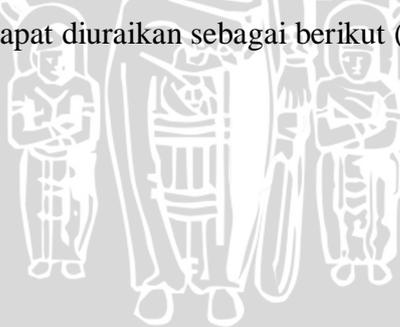
Menurut Albrecht (1988) *Participatory design* sejauh ini akan memiliki arti bahwa arsitek mendesain contoh atau bagian-bagian penting dari proyek, sedangkan partisipan mengerjakan sisanya. Dari pernyataan teori Albrecht dapat dikatakan bahwa bentuk pendekatan partisipatorik (*participatory design*) yang dilakukan pada proses rekonstruksi dusun Ngibikan mengarah pada teori tersebut, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa arsitek hanya mendesain kerangka bangunan (konstruksi bangunan). Dan bagian konstruksi bangunan tersebut adalah bagian terpenting dari proses desain, dimana sesuai tujuan utama proses desain adalah untuk menghasilkan bangunan tahan gempa yang diwujudkan dalam desain konstruksi itu sendiri. Pengembangan desain selanjutnya diserahkan kepada warga.

Keterlibatan warga pada tahap pengembangan desain dilakukan pada saat pelaksanaan pembangunan berlangsung. Pada tahap ini setiap warga memiliki kontrol untuk mengembangkan desain rumah mereka masing-masing. Hasilnya adalah desain rumah yang beragam dari segi penataan ruang dalam maupun dari segi fasade atau tampilan bangunan.

Dari pernyataan-pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan partisipatorik ala Ngibikan adalah partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan desain dan proses pengembangan desain, serta proses pelaksanaan pembangunan. Setiap warga memiliki kontrol terhadap pengembangan desain dan pelaksanaan pembangunan rumahnya. Kegiatan *participatory design* sangat jelas ditunjukkan dengan pelibatan masyarakat dalam pengembangan desain rumah sesuai dengan pemikiran mereka.

4.2.2. Prinsip Pendekatan Partisipatorik ala Ngibikan

Prinsip pendekatan partisipatorik pada proses rekonstruksi dusun Ngibikan adalah bahwa warga dilibatkan secara langsung selama proses rekonstruksi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Tidak hanya memberikan saran maupun gagasan, setiap warga memiliki kontrol terhadap pembangunan rumahnya masing-masing, karena merekalah yang melaksanakan pembangunan dan mereka dapat mengembangkan desain sesuai dengan keinginan mereka. Pada proses rekonstruksi dusun Ngibikan perancang (arsitek) tidak lagi berperan sebagai pengambil keputusan utama melainkan sebagai fasilitator bagi warga. Jika dibandingkan dengan teori mengenai prinsip partisipasi yang dikemukakan oleh Sanoff (2000) maka prinsip partisipasi yang dilakukan pada proses rekonstruksi dusun Ngibikan dapat diuraikan sebagai berikut (tabel 4.9).



Tabel 4.9 Perbandingan Prinsip Partisipasi Sanoff (2000) dan Ngibikan

No.	Prinsip Partisipasi Sanoff (2000)	Prinsip Partisipasi Ngibikan
1.	<p>Tidak terdapat “solusi terbaik” bagi permasalahan desain; setiap permasalahan memiliki beberapa solusi. Solusi pada permasalahan perencanaan dan desain pada dasarnya terdiri dari dua kriteria :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fakta—data empiris mengenai kekuatan material, ekonomis, building codes (peraturan bangunan), dan sebagainya. • Perilaku—interpretasi dari fakta tersebut, langgam tertentu pada suatu daerah, pendekatan secara tradisional dan kebiasaan/adat dan nilai hukum, keputusan perencanaan dan desain dipengaruhi oleh pengambil keputusan. 	<p>Perencanaan rekonstruksi yang dilakukan disesuaikan dengan kemampuan warga, budaya atau kebiasaan warga juga berpengaruh terhadap jalannya proses rekonstruksi. Keputusan perancangan, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai dengan keputusan warga.</p>
2.	<p>Desainer dan perencana yang terlibat dalam pendekatan tersebut dianggap sebagai salah satu dari partisipan yang mampu mengidentifikasi berbagai alternatif yang mungkin dan mendiskusikan konsekuensi dari berbagai macam konsekuensi tersebut dan memberikan opini—bukan keputusan—seperti partisipan (pengguna lainnya)</p>	<p>Pada proses rekonstruksi, arsitek tidak memiliki wewenang untuk mengatur maupun menentukan keputusan. Segala keputusan diserahkan sepenuhnya kepada warga, arsitek hanya memberikan saran dan gagasan ide yang diserahkan kepada warga (pengguna) untuk dipertimbangkan</p>
3.	<p>Perencanaan desain dibuat transparan, para ahli hanya mengkomunikasikan ide mereka untuk didiskusikan dengan masyarakat (warga). Setelah masyarakat memahami ide-ide tersebut, maka diharapkan masyarakat dapat</p>	<p>Arsitek menawarkan gagasan desain kepada warga, warga berdiskusi untuk mengambil keputusan, hasil keputusan akan menjadi acuan arsitek untuk mendesain. Hasil desain yang dibuat bersifat fleksibel sehingga warga</p>

mengembangkan desain tersebut, bukan hanya merespon desain saja. (pengguna) dapat mengembangkannya sesuai dengan keinginan mereka

4. Seluruh individu dan kelompok-kelompok yang terlibat harus berada secara bersama dalam suatu forum yang terbuka. Dengan cara tersebut masing-masing warga dapat mengutarakan pendapat mereka secara langsung dan didiskusikan, dan pada akhirnya tiba pada keputusan yang dapat diterima bagi semua pihak
Warga berkumpul bersama untuk mendiskusikan setiap rencana maupun keputusan yang akan diambil
5. Proses tersebut berlanjut dan berubah. Produk bukan merupakan hasil akhir dari proses, produk harus diolah (diatur), dievaluasi ulang, dan disesuaikan terhadap perubahan kebutuhan. Dan yang paling baik dalam melakukan hal tersebut adalah pengguna sendiri, karena mereka yang berinteraksi langsung dengan produk tersebut.
Produk desain yang dihasilkan berupa konstruksi (rangka bangunan) dan pengolahan atau pengembangannya diserahkan sepenuhnya pada warga (pengguna)

Dari uraian tabel 4.9 tersebut diketahui bahwa prinsip partisipasi yang dilakukan pada proses rekonstruksi dusun Ngibikan memiliki kesamaan dengan prinsip partisipasi yang dikemukakan oleh Sanoff (2000), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi warga dalam proses rekonstruksi dusun Ngibikan telah sesuai dengan prinsip partisipasi. Adanya kesetaraan antara desainer (perancang) dan pengguna, serta keterlibatan warga (pengguna) secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, dan juga adanya proses diskusi bersama yang dilakukan oleh warga untuk mengambil keputusan. Arsitek tidak merancang berdasarkan pemikiran mereka sendiri, melainkan merancang berdasarkan dan bersama pengguna (warga).

4.2.3. Teknik Partisipasi di Ngibikan

Sesuai dengan teknik partisipasi menurut Sanoff (2000) terdapat lima kategori partisipasi, yaitu :

1. Metode Kesadaran (*Awareness Methods*)
2. Metode Tidak Langsung (*Indirect Methods*)
3. Metode Interaksi kelompok (*Group Interaction Methods*)
4. Metode Terbuka (*Open-Ended Methods*)
5. Metode Pengungkapan Pendapat (*Brainstorming Methods*)

Mengacu pada teori tersebut, maka teknik partisipasi yang dilakukan pada proses rekonstruksi dusun Ngibikan dapat dikategorikan sebagai metode terbuka dan pengungkapan pendapat. Metode terbuka adalah forum publik, pertemuan publik mengizinkan pemimpin masyarakat untuk memperkenalkan informasi proyek kapanpun selama proses berlangsung, sedangkan metode pengungkapan pendapat adalah metode lisan dari penyelesaian masalah (Sanoff, 2000).

Metode terbuka dilakukan pada forum diskusi yang dilakukan masyarakat untuk memutuskan desain bangunan dan pada saat pelaksanaan berlangsung. Pemimpin memberikan saran-saran dan pengarahan kepada warga selama proses diskusi berlangsung. Pada forum diskusi tersebut tersebut juga terdapat metode pengungkapan pendapat, dimana setiap warga diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapat maupun pemikiran mereka. Pada akhirnya setiap keputusan yang dihasilkan dapat mewakili kepentingan semua pihak dan dapat diterima serta dijalankan.

Metode terbuka dan pengungkapan pendapat juga dilakukan selama proses pembangunan berlangsung, dimana setiap warga yang memiliki pemikiran-pemikiran

lain terhadap hasil desain dapat mengungkapkan pendapat mereka, sehingga mereka dapat mengembangkan desain yang dihasilkan. Pengarahan yang berkenaan dengan pekerjaan dilakukan oleh pemimpin (koordinator pelaksana) selama proses pelaksanaan pembangunan.

4.2.4. Keterlibatan dan Tingkat Partisipasi Warga Ngibikan dalam Sebuah Pendekatan Partisipatorik

Partisipasi mempunyai arti keterlibatan diri secara utuh penuh pada suatu tekad yang menjadi kesepakatan bersama, tiap pihak yang terlibat, berkepentingan (pemerintah, swasta, masyarakat) merupakan bagian dari proses pembangunan itu (Kadir, 2009). Partisipasi warga Ngibikan diwujudkan dalam keterlibatan mereka dalam proses rekonstruksi dari proses perencanaan hingga proses pelaksanaan. Partisipasi warga juga ditunjukkan dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Kadir (2009) bagian terpenting dari partisipasi adalah kewenangan masyarakat untuk memutuskan sebagai pelaku utama tanpa ada paksaan dan bergerak atas dasar kesadaran sendiri. Pada proses rekonstruksi dusun Ngibikan, warga diberikan wewenang sebesar-sebesarnya untuk mengambil setiap keputusan yang akan dilakukan. Pada awal proses pemimpin memberikan saran-saran dan pertimbangan bagi warga, meskipun pada tahap awal desain warga tidak terlalu aktif, namun tidak terdapat unsur pemaksaan. Hasil keputusan merupakan persetujuan bersama antara warga dan pemimpin warga. Hasil keputusan tersebut yang menjadi acuan bagi arsitek untuk mendesain.

Bentuk lain pemberian wewenang atau partisipasi warga adalah pengembangan desain yang dilakukan pada tahap pelaksanaan pembangunan. Setelah desain telah selesai dibuat oleh arsitek, maka arsitek menyerahkan sepenuhnya desain kepada warga untuk dipertimbangkan dan dikembangkan. Hasilnya adalah pengembangan desain rumah yang beragam oleh warga Ngibikan.

Menurut Pangarsa dalam bukunya *Arsitektur untuk Kemanusiaan* (Teropong *Visual Culture* atas Karya-karya Eko Prawoto)

“... warga mempunyai hak yang sama dalam menentukan rancangan, dapat “menyimpangkan” programming arsitektural yang telah dimufakati bersama di tingkat warga dan dapat pula mengubah programming pembiayaan konstruksi yang disetujui penyandang dana.”

Jika ditinjau dari delapan tingkat partisipasi masyarakat menurut Arnstein (1969), maka pada proses rekonstruksi dusun Ngibikan tersebut, partisipasi masyarakat berada pada tingkat ke delapan. Tingkat kedelapan adalah tingkat kontrol masyarakat, dimana masyarakat diberikan kekuasaan atau kewenangan untuk sebagian atau seluruh program. Pada tingkatan ini warga Ngibikan memiliki kontrol pada setiap pembangunan rumah dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan rekonstruksi. Dari pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi warga Ngibikan pada proses rekonstruksi proses perancangan hingga proses pelaksanaan adalah tinggi.

Kegiatan rekonstruksi tidak banyak melibatkan peran pemerintah daerah, kegiatan rekonstruksi yang dilakukan merupakan kegiatan komunitas. Kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan sebuah pendekatan *bottom-up*, dimana masyarakat turut berpartisipasi menyumbangkan pemikiran dan tenaga mereka dengan kesadaran diri untuk membangun kembali lingkungan mereka, namun terdapat pula pendekatan *top-down* dimana masyarakat menerima arahan dan gagasan dari arsitek.

Dengan melihat tingkat partisipasi warga yang tinggi, maka kegiatan partisipasi pada rekonstruksi dusun Ngibikan menggunakan pendekatan *bottom-up* dengan prosentase yang lebih besar dibandingkan dengan pendekatan *top-down* yang dilakukan.

4.2.5. Pengaruh Budaya Masyarakat terhadap Penerapan Pendekatan Partisipatorik

Salah faktor yang berpengaruh pada keberhasilan penerapan pendekatan partisipatorik di Ngibikan adalah faktor budaya masyarakat. Seperti salah satu prinsip partisipasi yang berkenaan dengan solusi permasalahan perencanaan dan desain, yaitu interpretasi pendekatan secara tradisional dan kebiasaan/adat dan nilai hukum yang dikemukakan oleh Sanoff. Pada proses rekonstruksi dusun Ngibikan faktor budaya juga merupakan salah satu faktor yang mampu menyebabkan partisipasi warga. perbedaan budaya juga akan berpengaruh pada pendekatan partisipatorik yang dilakukan. Pendekatan partisipatorik yang dilakukan di Ngibikan mungkin akan berbeda jika diterapkan pada daerah lain yang memiliki budaya yang berbeda pula.

Warga Ngibikan memiliki budaya hidup sederhana dan apa adanya. Selain itu ketika warga ditimpa musibah bencana gempa yang telah menghancurkan rumah

mereka, mereka tidak berputus asa dan bersama-sama berusaha untuk membangun kembali lingkungan mereka. Warga juga memiliki rasa kegotongroyongan dan kekeluargaan yang tinggi sehingga mereka dapat dengan mudah bekerja sama untuk membangun kembali rumah mereka. Kebiasaan atau budaya masyarakat Ngibikan yang demikian pula yang dapat mendorong kesadaran warga untuk ikut berpartisipasi membangun kembali dusun mereka.

Menurut Pangarsa dalam bukunya *Arsitektur untuk Kemanusiaan* (Teropong *Visual Culture* atas Karya-karya Eko Prawoto)

“Apa yang telah berlangsung di Ngibikan jelas menunjukkan fungsi sosial tak hanya seorang arsitek, tetapi juga para tukang. Kegotongroyongan di Ngibikan pasca gempa adalah pengejawantahan dari peran social individu-individu : para ibu, remaja dan anak-anak, para tukang, pemimpin formal dan informalnya, arsitek dan pihak luar yang terpanggil aktif sebagai sukarelawan....”

Partisipasi dalam desain menciptakan sebuah hubungan antara manusia dengan lingkungan fisiknya serta mampu menciptakan rasa kebersamaan diantara mereka yang terlibat dalam proses perencanaan tersebut (Sommer, 1983). Adanya partisipasi warga Ngibikan dalam proses rekonstruksi memberikan dampak positif pada kehidupan warga Ngibikan, yaitu semakin eratnya rasa kebersamaan dan gotong royong diantara warga.

4.2.6. Konsensus sebagai Bagian dari Budaya Masyarakat

Konsensus memiliki pengertian sebagai persetujuan masyarakat. Pada proses rekonstruksi dusun Ngibikan muncul konsensus-konsensus yang dihasilkan warga selama proses rekonstruksi berlanjut. Proses konsensus seperti pernyataan Brody dalam Sanoff (2000) konsensus terjadi setelah seluruh anggota diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka dan dapat mencapai sebuah keputusan yang dapat didukung oleh semua orang. Proses datangnya sebuah konsensus bersifat bebas dan saling bertukar gagasan secara terbuka, yang berlanjut hingga persetujuan tercapai. Proses tersebut memastikan bahwa setiap kepentingan individu didengar dan dimengerti dan usaha yang sungguh-sungguh dibuat untuk membawa mereka kepada pemikiran untuk mencari sebuah penyelesaian.

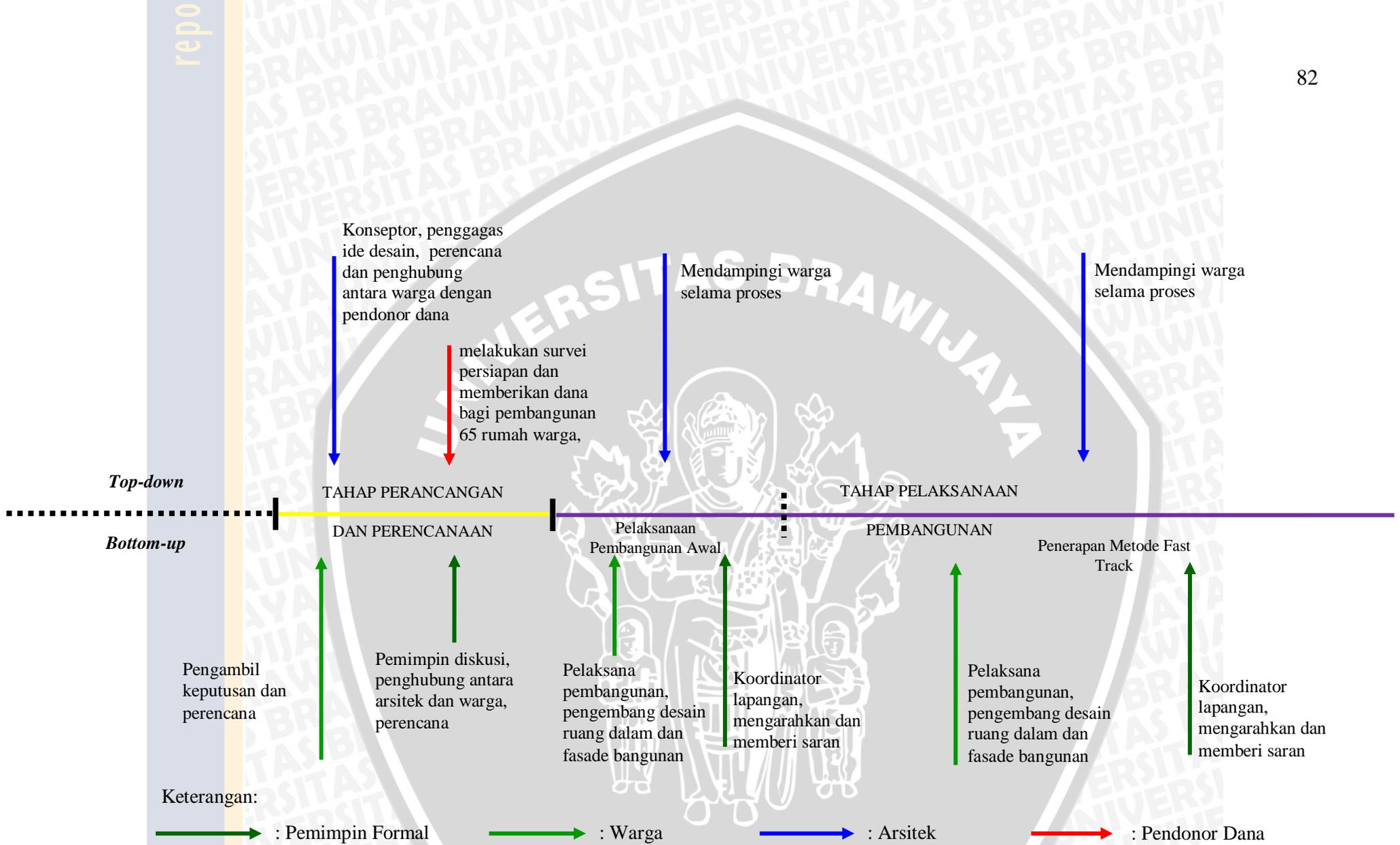
Untuk menuju pada sebuah konsensus maka terlebih dahulu diawali dengan proses musyawarah atau diskusi. Konsensus yang dihasilkan selama proses rekonstruksi

merupakan persetujuan yang dilakukan oleh seluruh warga. Saran-saran maupun pendapat yang disampaikan difikirkan bersama untuk mencapai sebuah kesepakatan. Pada proses rekonstruksi dusun Ngibikan mungkin peran pemimpin dalam proses diskusi sangat kuat, namun pada akhirnya keputusan yang dibuat merupakan keputusan yang telah disepakati bersama. Konsensus pada proses rekonstruksi tersebut dapat dikatakan sebagai bagian dari budaya masyarakat, karena konsensus dapat dipandang sebagai sebuah penyelesaian masalah melalui musyawarah, dan musyawarah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat.

4.2.7. Alur Kegiatan Partisipasi di Ngibikan

Dari uraian *action planning*, tahapan kegiatan, dan jadwal pelaksanaan, maka didapatkan alur pelaksanaan partisipasi di Ngibikan ditinjau dari pendekatan bottom-up dan top-down, seperti yang ditunjukkan pada gambar (gambar 4.20) berikut ini.





Gambar 4.20 Alur Partisipasi

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada Bab empat, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan partisipatorik (*participatory design approach*) yang dilakukan pada proses rekonstruksi dusun Ngibikan pasca-gempa adalah :

- Dimulai dengan adanya kesadaran diri yang tinggi dari masyarakat untuk membangun kembali lingkungannya yang hancur akibat gempa, kesadaran tersebut mewujudkan tindakan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan dan dalam proses pengembangan desain yang telah disepakati, sehingga kegiatan partisipasi yang dilakukan merupakan kegiatan yang berasal dari pendekatan bottom-up (dari masyarakat) dan dipengaruhi oleh budaya masyarakat Ngibikan sendiri.
- Ditinjau dari tingkatan partisipasi masyarakat bentuk partisipasi warga berada pada tingkat kontrol masyarakat, dimana warga memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan dan pengembangan desain.

Posisi Penelitian

Dari hasil dan simpulan penelitian maka pendekatan partisipatorik yang diterapkan di Ngibikan merupakan salah satu bentuk partisipasi yang sama dengan partisipasi yang diungkapkan Arnstein hal tersebut ditinjau dari tingkatan partisipasi masyarakat berdasarkan kewenangan yang diberikan, Namun juga memiliki prinsip partisipasi yang diungkapkan Sanoff, sehingga bentuk pendekatan partisipasi di Ngibikan dapat digolongkan sebagai gabungan dari keduanya.

5.2. Saran

Sebagai sebuah pendekatan perancangan dan perencanaan permukiman pendekatan partisipatorik dapat dilaksanakan dengan efektif dengan cara memahami terlebih dahulu kondisi sosial masyarakat serta kebudayaan masyarakat lokal, sehingga dapat menggerakkan partisipasi warga untuk ikut andil dalam kegiatan perancangan dan perencanaan. Pendekatan partisipatorik pada rekonstruksi dusun Ngibikan

memungkinkan untuk diterapkan pada kasus lain yang memiliki kondisi sama dengan kondisi Ngibikan, yaitu kondisi sosio kultur masyarakat yang sama. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor budaya dan kondisi sosial masyarakat yang sangat berpengaruh pada pendekatan partisipatorik yang diterapkan.

Penelitian ini membahas bentuk pendekatan partisipatorik pada rekonstruksi hunian pasca-bencana, saran bagi selanjutnya adalah meneliti bagaimana bentuk pendekatan partisipatorik yang dapat diterapkan pada perencanaan dan perancangan hunian (perumahan) di Indonesia yang tidak berlatar belakang pasca-bencana, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, J.. 1988. *Towards a Theory of Participation in Architecture: An Examination of Humanistic Planning Theories*. *Journal of Architectural Education* 42, 1:24-31
- Arnstein, Sherry R. 1969. *A Ladder of Citizen Participation*. *JAIP*, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224
- AusAID Guideline. 2005. *The Logical Framework Approach*. Australia Government: AusAID
- Badan Pusat Statistik. 2008. Kecamatan Jetis dalam Angka. Bantul. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul
- Bharuna, Anak Agung Gde Djaja. 2004. *Arsitektur Untuk Rakyat? Suatu Kajian Tentang Pendekatan Perancangan Partisipatif*. *Jurnal Permukiman Natah* Vol. 2 No.1 Pebruari 2004: 1 – 55
- BOND, *Networking for International Development*. 2003. *Logic Framework Analysis*. Regent's Wharf, 8 All Saints Street, London
- Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. *Tata Cara Operasional Kelurahan / Desa, Pedoman Operasional Teknis Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas untuk Wilayah NAD dan Nias RE-KOMPAK*. Jakarta 2005
- Granath, Jan A., Lindahl, Goran A., & Rehal Saddek. 1996. *From Empowerment to Enablement An Evolution of New Dimension in Participatory Design*. Industrial Architecture and Planning, School of Architecture, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden. *Published in Logistik & Arbeit* 28 Juni 1996
- Gunawan. 2009. *Permukiman di Tepi Kali code Karya YB Mangunwijaya*. www.rekaberu.blogspot.com (Diakses 17 April 2010)
- Hall, Kenneth B. & Porterfield, Gerald A. 2001. *Community by Design: New Urbanism for Suburbs and Small Communities*. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Kadir, Ishak. 2009. *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dan Dampak Program Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (Nussp) Terhadap Peningkatan Kualitas Permukiman Masyarakat Kelurahan Kendari Caddi Kota Kendari*. *Metropilar Volume 7 Nomor 4 Oktober 2009*

- Khairina. 2006. Tidak Hanya Bangun Rumah, tetapi Juga Kehidupan. www.kompas.com. (Diakses tanggal 5 Maret 2010 pukul 18.45 WIB)
- Pangarsa, Galih W. 2008. *Arsitektur untuk Kemanusiaan: Teropong Visual Culture* atas Karya-karya Eko Prawoto. Surabaya: PT. Wastu Lanas Grafika
- Pemerintah Kabupaten Bantul. 2009. *Kepadatan Penduduk Menurut Jenis Kelamin*. www.pemkabantul.go.id (Diakses 5 Agustus 2010)
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana
- Qolquhoun, Alan. 2004. *Design Out Crime: Creating Safe and Sustainable Community*. Architectural Press Elsevier
- Rank, Stephen., O'Coill, Carl., Boldyreff, Cornelia. & Doughty, Mark. 2004. *Software, Architecture, and Participatory Design*. www.eprints.lincoln.ac.uk
- Sanoff, Henry. 2000. *Community Participation Methods in Design and Planning*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Sanoff, Henry. 2006. *Multiple Views of Participatory Design*. Published in METU JFA 2006, Vol 23 (2) 131-143
- Sommer, Robert. 1983. *Social Design: Creating Buildings with People in Mind*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs
- www.unosat.org UNOSAT, *Preliminary Damage Assessment : Java Earthquake, 2006*

DAFTAR BACAAN

- Afriani, Irfan. 2009. Artikel: Metode Penelitian Kualitatif. (Diakses tanggal 8 Maret 2010 pukul 07.48 WIB)
- Chariri, Anis. 2009. "Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif", *Paper disajikan pada Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 31 Juli – 1 Agustus 2009
- Groat, Linda & Wang, David. 2002. *Architectural Research Methods*. New York: John Wiley & Sons
- Tim Komunikasi dan Informasi untuk Situasi Darurat –Media Massa. 2006. Membangun Solidaritas di Taman Persaudaraan. www.tikusdarat.net (Diakses 21 April 2010)
- Wikipedia. Gempa Bumi Yogyakarta 2006. www.id.wikipedia.org (Diakses 21 April 2010)



Lampiran 2 :

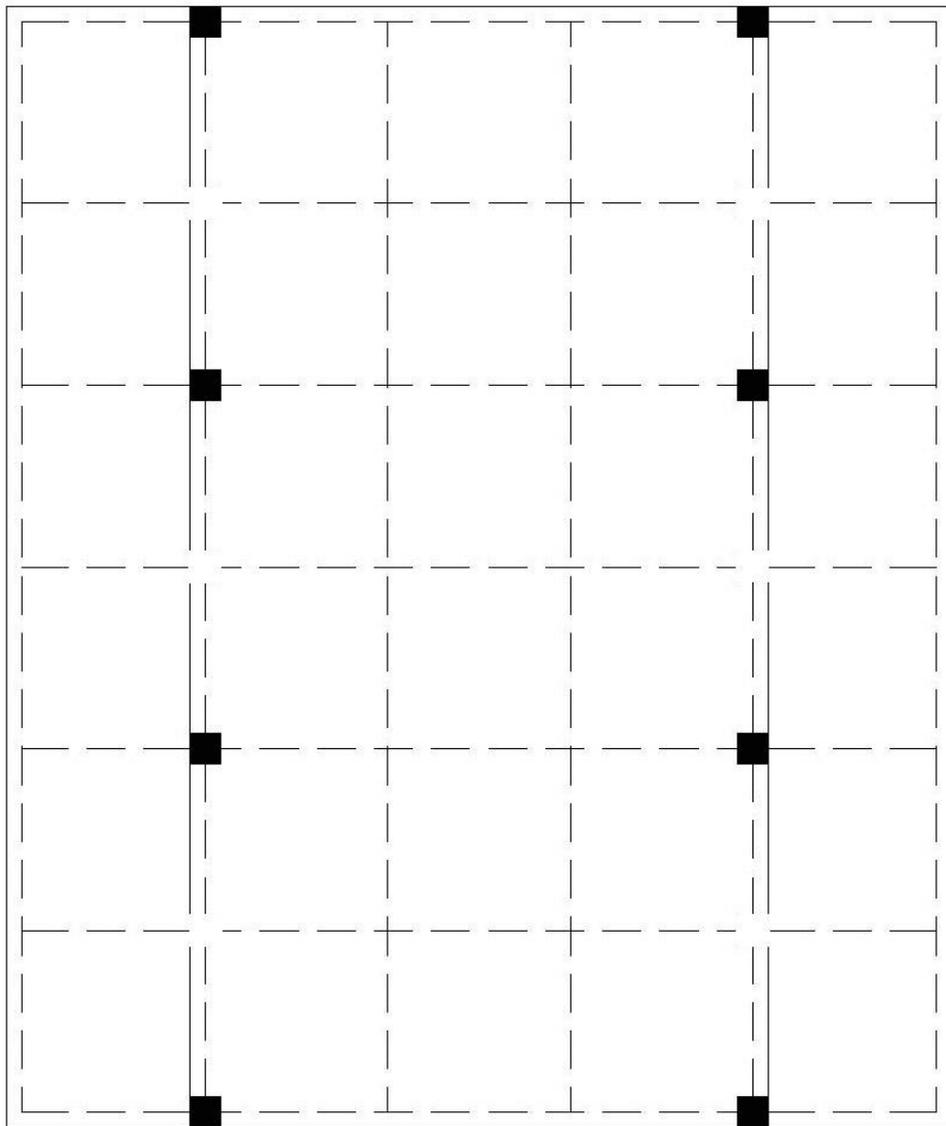
Daftar kelompok pekerja pada proses rekonstruksi dusun Ngibikan pasca-gempa

Pelindung	1. Bp. Suharyanto (Dukuh Ngibikan) 2. Bp. Maryono (Ketua RT / Pengarah Kerja)
Ketua Umum	1. Bp. Salim 2. Bp. Parjan
Kelompok I Membuat kuda-kuda	1. Bp. Salim 2. Bp. Samsuri 1. Bp. Mujiyo 2. Bp. Murdi 1. Bp. Ponijan 2. Bp. Tukiyo 1. Riyono 2. Kasdi
Kelompok II Menyambung Gording	1. Bp. Ngadiman 2. Bp. Sunar
Kelompok III Pasang Gording / Asbes	1. Bp. Sadari 2. Bp. Sadiyo 3. Bp. Pawiro 4. Bp. Sudi 5. Bp. Nana 6. Bp. Ngadilan 7. Bp. Tomat 8. Bp. Hono
Kelompok IV Mendirikan Kuda-kuda	1. Bp. Parjan 2. Bp. Tukiman 3. Bp. Slamet 4. Bp. Sumiyoto 5. Bp. Bero 6. Bp. Sarjiwo
Kelompok V Tukang set Pondasi	1. Bp. Suprihatin 2. Bp. Saryanto 3. Bp. Sakir 4. Bp. Ari
Kelompok VI Menyetel Umpak	1. Purwanto 2. Waluyo (Gayet) 3. Yuwono 4. Bardi
Kelompok VII Tukang Pasrah (Tukang amplas)	1. Bp. Kesmo 2. Bp. Ngaliman 3. Tujilan 4. Bp. Paidin 5. Jumadi 6. Bp. Mugiyo
Kelompok VIII Membuat Umpak	1. Bp. Warsono 2. Bp. Panut 3. Bp. Samidi

Sie Perlengkapan Sie Perlengkapan	4. Bp. Setyo 1. Ngatijo 2. Eko
--------------------------------------	--

Lampiran 3 :

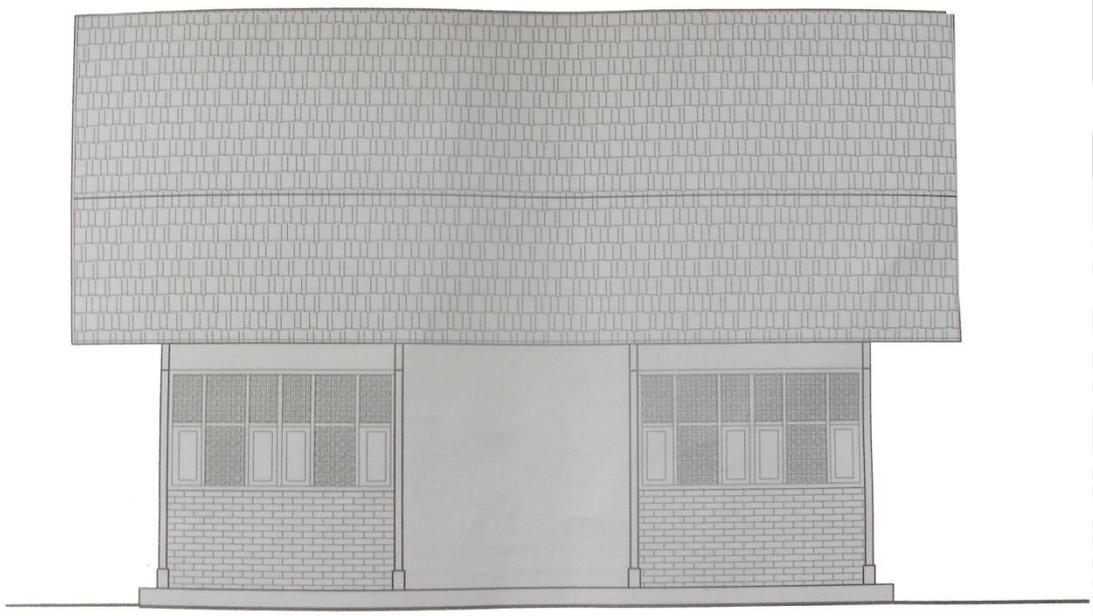
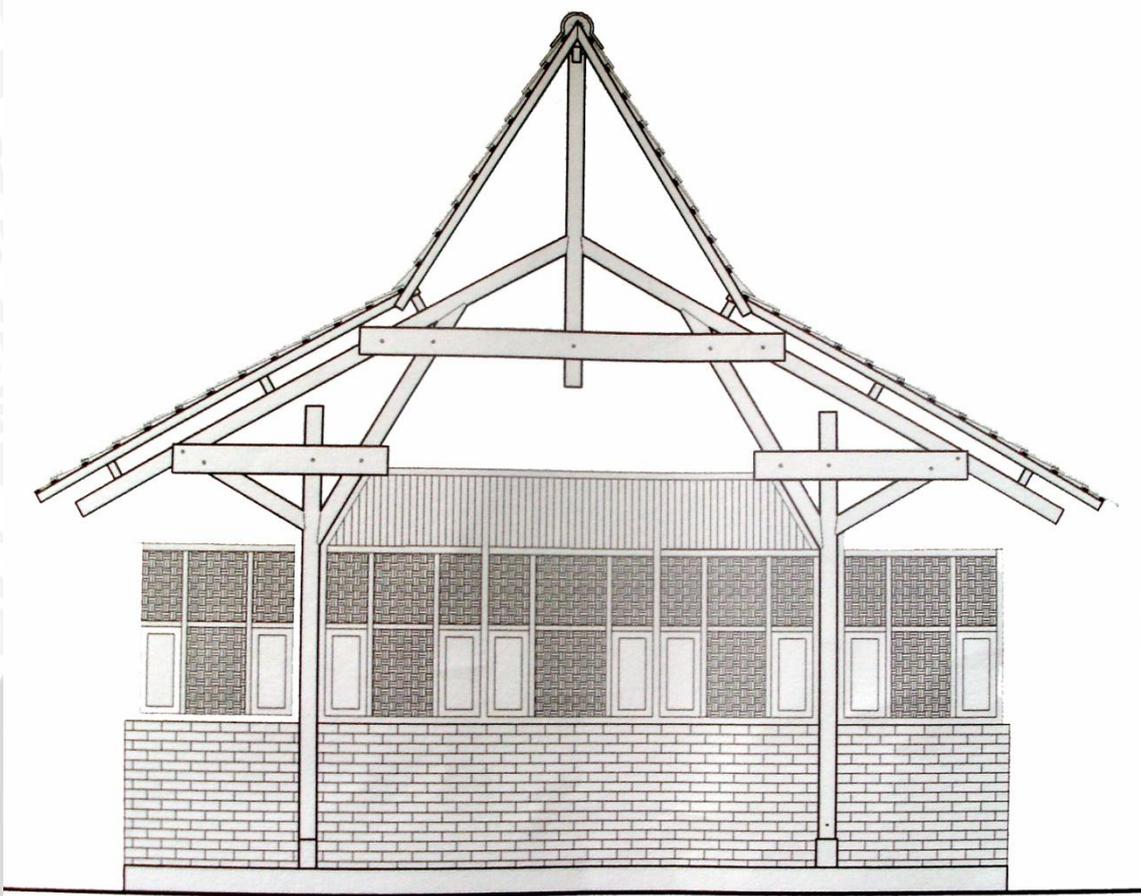
Gambar kerja desain rumah tahan gempa Ngibikan



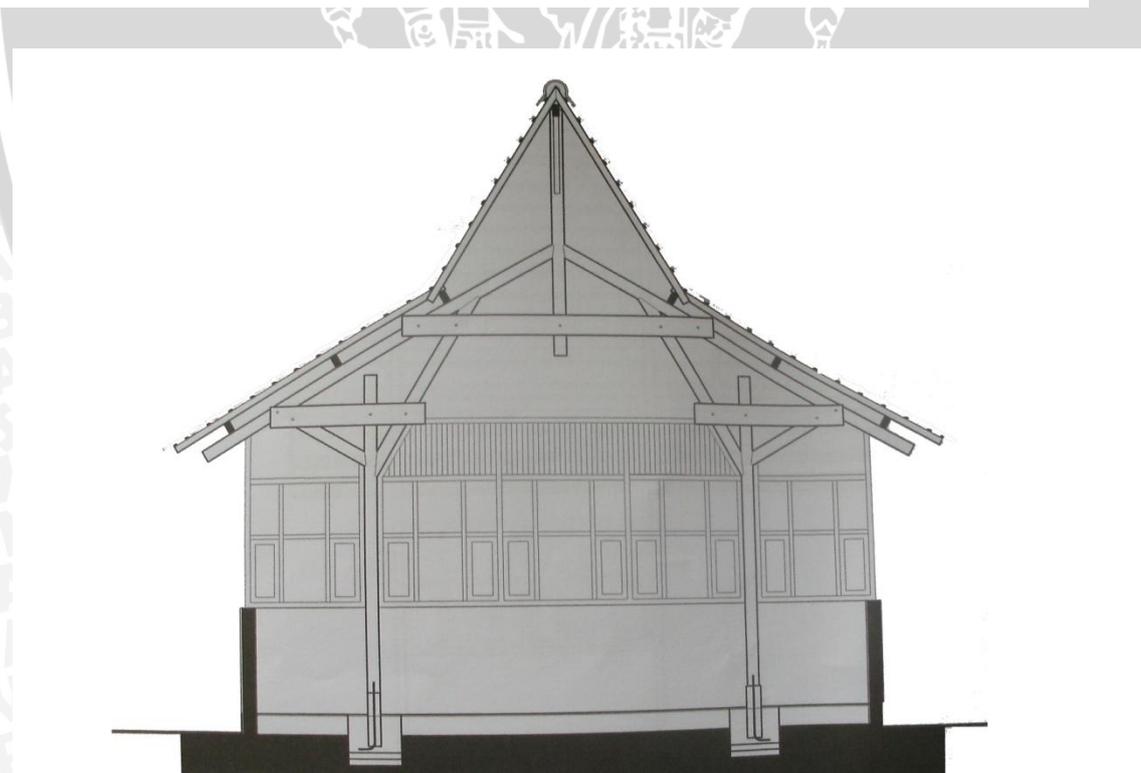
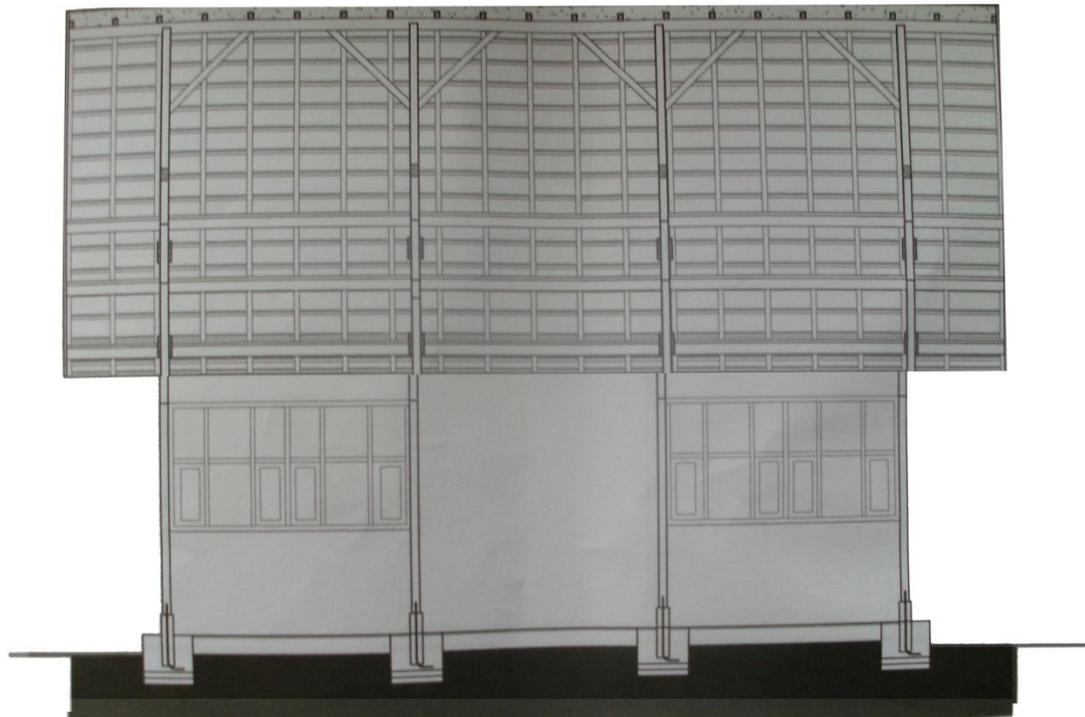
0 1,2 m 2,4 m

Denah





Tampak



Potongan

